

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 901 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016, telah ditetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka menampung perkembangan lingkungan strategis di bidang kepelabuhanan, perlu dilakukan penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

KETIGA : Rencana Induk Pelabuhan Nasional merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.

KEEMPAT: ...

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Menteri Sekretariat Negara;
15. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Kepala Staf Angkatan Laut;
17. Para Gubernur Provinsi;
18. Para Bupati/Walikota.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 901 TAHUN 2016

TENTANG

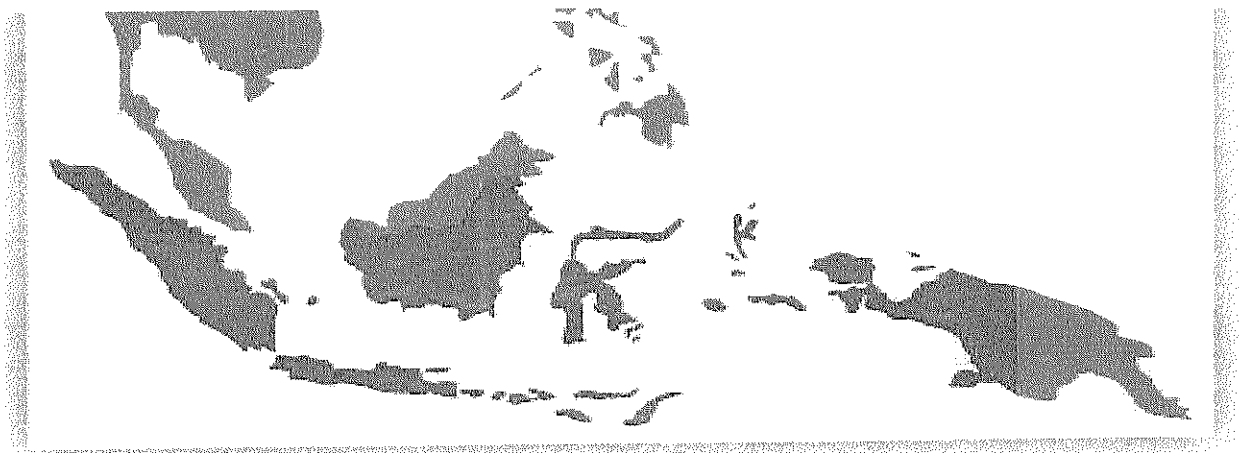
RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL



DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang 1-1
- 1.2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional..... 1-3
- 1.3. Peninjauan Kembali (reviu) atas Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 tahun 2013..... 1-4
- 1.4. Peninjauan Kembali (reviu) atas Cetak Biru Penyeberangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030 KM No. 6 Tahun 2010..... 1-5

BAB 2 KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

- 2.1. Kebijakan Pelabuhan Nasional 2-1
- 2.2. Pelaksanaan atas rencana aksi di bidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan 2-9

BAB 3 PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA

- 3.1. Latar Belakang 3-1
- 3.2. Perkembangan Kebutuhan Pergerakan..... 3-1
- 3.3. Implikasi Terhadap Rencana Pengembangan Pelabuhan..... 3-8
- 3.4. Transportasi Penyeberangan 3-12

BAB 4 LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN

4.1. Definisi/Pengertian.....	4-1
4.2. Kriteria Pelabuhan.....	4-2
4.3. Hasil Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan Nasional	4-7

LAMPIRAN

SUB LAMPIRAN	A1	(Lokasi Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Laut);
SUB LAMPIRAN	A2	(Lokasi Wilayah Kerja Pelabuhan);
SUB LAMPIRAN	A3	(Rencana Lokasi Pelabuhan);
SUB LAMPIRAN	A4	(Lokasi Terminal Umum);
SUB LAMPIRAN	A5	(Pelabuhan Laut Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan);
SUB LAMPIRAN	A6	(Pelabuhan Sungai dan Danau).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau yang membentang dari 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 95 ribu km. Dilihat dari keberadaannya di atas bumi, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia dengan demikian memiliki posisi silang yang sangat strategis dan memiliki kekayaan alam yang melimpah yang meliputi sumber daya alam, serta jumlah penduduk yang cukup besar.

Oleh karena itu kegiatan transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan yang menghubungkan daerah pedalaman dan pulau-pulau di Indonesia serta menghubungkan Indonesia dengan luar negeri terutama dalam angkutan barang ekspor/impor, mempunyai peran yang sangat strategis dan penting sebagai pendukung kegiatan perekonomian, industri, pembangunan dan perdagangan. Saat ini transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan digunakan oleh sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional.

Namun peran dimaksud tentunya **tidak akan terwujud tanpa kehadiran pelabuhan** yang berfungsi sebagai titik simpul antara moda air dengan moda darat. Pelabuhan dapat dikatakan pula sebagai salah satu mata rantai dalam rangka penyelenggaraan *total transport* (berpindahanya barang/penumpang dari tempat asalnya ke tujuan akhir dari barang/penumpang dimaksud yang memerlukan paling tidak 2 (dua) jenis moda transport yang berbeda. Bahkan dalam perkembangannya sekarang, pelabuhan dapat dipandang pula sebagai bagian dari kegiatan logistik. Selain itu keberadaan pelabuhan di sesuatu daerah akan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi perdagangan di daerah yang bersangkutan.

Keberadaan suatu pelabuhan yang bersifat multi fungsi dan memberikan berbagai jenis jasa kepelabuhanan tidak terlepas dari kebutuhan akan adanya wilayah/lokasi tertentu (daratan dan perairan) yang memadai, tersedianya kelengkapan prasarana

dan sarana pelabuhan dan adanya kegiatan pengelolaan pelabuhan baik dari aspek penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan (pengusahaan) maupun dari aspek pengaturannya (pemerintahan). Kesemua itu harus dirancang dan ditata kelola sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan jasa kepelabuhanan baik untuk kapal, penumpang maupun barang, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, yang makin berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional.

Dalam hubungannya dengan fungsi dan peran pelabuhan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1 nomor 16 mendefinisikan pelabuhan sebagai berikut: *"Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi"*.

Selanjutnya fungsi dan peran pelabuhan juga dijelaskan dalam kutipan pernyataan dari *The Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, sebagai berikut: *"Seaports are interfaces between several mode of transport and they are centers for combined transport. Furthermore they are multifunctional markets and industrial areas where goods are not only in transit but they are also sorted, manufactured, and distributed. As a matter of fact, seaports are multi dimensional system which must be intergrated within logistic chains to fulfill properly their function. An efficient seaport requires besides infrastructure, superstructures and equipments, adequate connection to other transport modes, a motivated management and sufficiently qualified employees"*.

Menyadari akan peranan pelabuhan yang multi fungsi sebagaimana diuraikan di atas, dan menyadari pula kenyataan bahwa di Indonesia terdapat ribuan pelabuhan (besar/kecil), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan kepada Menteri Perhubungan untuk menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun (pasal 71 ayat 4)

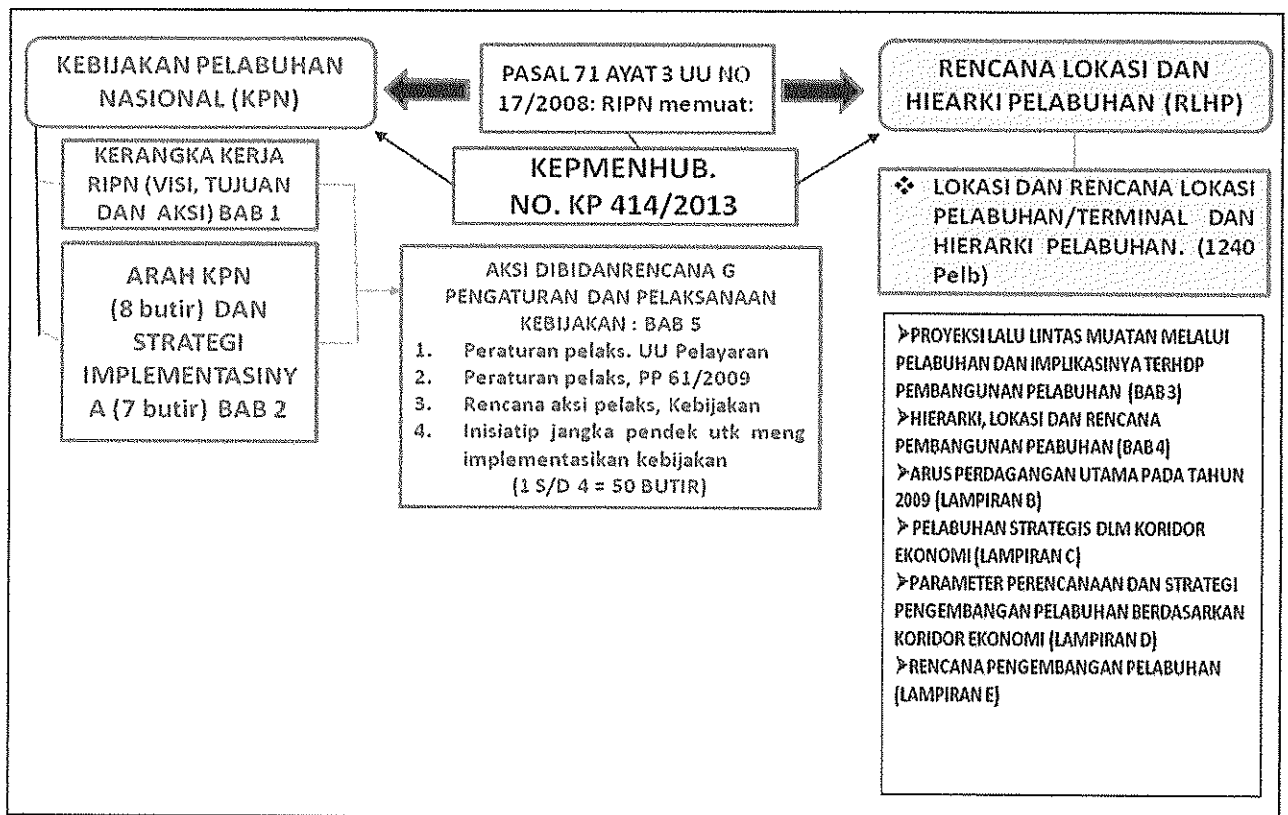
yang di dalamnya harus memuat: **a. Kebijakan Pelabuhan Nasional, dan b. Rencana Lokasi dan Hieraki Pelabuhan** (pasal 71 ayat 3).

Rencana Induk Pelabuhan Nasional dimaksud merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (pasal 71 ayat 1).

1.2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 71 ayat 4 dimaksud yang diulang/dipertegas pula dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, **telah dilaksanakan** oleh Menteri Perhubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang pada intinya menguraikan hal hal sebagai berikut:

- Kebijakan pelabuhan nasional dan strategi implementasinya disertai uraian mengenai Rencana aksi dibidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan
- Proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan dan implikasinya terhadap pembangunanan kepelabuhanan di Indonesia
- Hierarki, lokasi dan rencana pembangunan pelabuhan disertai uraian mengenai Pelabuhan strategis dalam koridor ekonomi, Parameter Perencanaan dan Strategi Pengembangan Pelabuhan berdasarkan Koridor Ekonomi dan Rencana Pengembangan Pelabuhan.



Gambar 1.1 Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013

1.3. Peninjauan Kembali (*reviu*) atas Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 tahun 2013

Meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 baru berusia 3 (tiga) tahun, namun dengan terjadinya lingkungan strategis yang berkembang/berubah khususnya perkembangan di daerah serta perubahan wilayah administratif dalam penyebutan lokasi pelabuhan, dipandang perlu dilakukan *reviu* atas Rencana Induk Pelabuhan yang sudah dirumuskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013.

Pertimbangan untuk melakukan *reviu* meliputi antara lain :

- Pemekaran wilayah Propinsi maupun Kota/Kabupaten serta pengembangannya;
- Perlu memadukan simpul-simpul moda transportasi perairan (laut, sungai, danau dan penyeberangan);

- Ditetapkannya 9 (sembilan) Agenda Pembangunan Pemerintahan yang dikenal NAWACITA yang diantaranya akan diwujudkan dengan program Tol Laut;
- Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada awal Tahun 2016;
- 10 destinasi wisata prioritas nasional.

Hal-hal tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan peninjauan kembali atas beberapa substansi Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sehingga dapat disinkronkan dengan perkembangan lingkungan strategis tersebut di atas.

Peninjauan kembali (*reviu*) dimaksud **utamanya difokuskan pada rencana, lokasi dan hierarki pelabuhan beserta rencana pengembangannya**, sedangkan mengenai **rumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional**, secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerintahan saat ini.

1.4 Peninjauan Kembali (*reviu*) atas Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030 KM No. 6 Tahun 2010

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 selama ini selalu menjadi acuan awal dalam perencanaan lintas penyeberangan, pembangunan pelabuhan dan penyediaan armada penyeberangan. Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota berkoordinasi agar program pengembangan terkait transportasi penyeberangan selalu selaras dengan visi dan misi Cetak Biru Transportasi Penyeberangan 2010-2030. Semangat pembangunan tersebut berjalan dengan sangat dinamis baik dari sisi spasial lokasi maupun percepatan pembangunan ataupun penyediaan layanan transportasi penyeberangan di daerah.

Perkembangan tata ruang, pemekaran otonomi daerah, pengembangan jaringan jalan dan jalan rel maupun perkembangan informasi kebijakan lain yang lebih rinci terkait kebutuhan pengembangan transportasi penyeberangan di daerah menjadikan optimisme atas strategi pengembangan saat ini. Optimisme tersebut mengakibatkan pelaksanaan atas strategi pengembangan tersebut menjadi lebih cepat dari yang dijadwalkan, perubahan lokasi pelabuhan maupun lintas penyeberangan,

BAB II

KEBIJAKAN PELABUHAN NASIONAL DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DI BIDANG PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

2.1. Kebijakan Pelabuhan Nasional

2.1.1. Kebijakan Pelabuhan Nasional dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013, kebijakan Kepelabuhanan Nasional khususnya pada pelabuhan-pelabuhan utama akan merefleksikan perkembangan sektor kepelabuhanan menjadi industri jasa kepelabuhanan kelas dunia yang kompetitif dengan sistim operasi pelabuhan sesuai standar internasional baik dalam bidang keselamatan pelayaran maupun perlindungan lingkungan maritim.

Kebijakan Pelabuhan Nasional diarahkan dalam upaya:

- **Mendorong investasi swasta**
Partisipasi swasta/badan usaha merupakan salah satu sektor yang menunjang keberhasilan dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan karena kemampuan finansial sektor publik terbatas.
- **Mendorong Persaingan**
Mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam usaha kepelabuhanan diharapkan dapat menghasilkan jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien.
- **Pemberdayaan Peran Penyelenggara Pelabuhan**
Upaya perwujudan peran Penyelenggara Pelabuhan sebaagai pemegang hak pengelolaan lahan daratan dan perairan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- **Terwujudnya Integrasi Perencanaan**
Perencanaan pelabuhan harus mampu mengantisipasi dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi, dan terintegrasi dalam sistem transportasi nasional, sistim

logistik nasional, rencana tata ruang wilayah serta keterlibatan masyarakat setempat.

- **Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel**

Peraturan pelaksanaan yang menunjang implementasi yang lebih operasional perlu diterbitkan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang lebih efisien dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.

- **Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin**

Sektor pelabuhan harus memiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas yang baik serta mempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal.

- **Meningkatkan perlindungan maritim**

Pengembangan pelabuhan akan memperluas penggunaan wilayah perairan yang akan meningkatkan dampak terhadap lingkungan maritim. Penyelenggara pelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan guna memperkecil kemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim.

- **Mengembangkan sumberdaya manusia**

Pengembangan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkat efisiensi.

Upaya dimaksud pada hakikatnya merupakan penjabaran dari amanat yang tercantum dalam Konsiderans ("**Menimbang**") Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran huruf d yang menyebutkan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran (termasuk kepelabuhanan) yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran swasta, dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Sejalan dengan itu, dari aspek kelembagaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memperkenalkan kebijakan baru dalam penyelenggaraan pelabuhan yaitu:

- Dipisahkannya fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan secara komersial (disingkat pelabuhan komersial) yang diwujudkan dengan pembentukan Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai regulator dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai operator.
- Pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) sebagai penyelenggara pelabuhan di pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial (disingkat pelabuhan non komersial) yang memiliki fungsi rangkap yaitu sebagai regulator dan operator pelabuhan.
- Diciptakannya hubungan kontraktual antara Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan dalam rangka penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam bentuk pemberian konsesi atau instrumen hukum dalam bentuk lainnya (selain pemberian konsesi).
- Pembentukan Syahbandar sebagai lembaga yang berdiri sendiri di pelabuhan komersial.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, pada Bab X, Ketentuan Lain-Lain, pasal 162 menjelaskan bahwasannya pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersil untuk kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, sesuai dengan PM No. 85 Tahun 2011).

Penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersil dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi atau Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Implementasi Konsep Tol Laut

Perumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional sebagaimana diuraikan diatas bertitik tolak dari Undang Undang Pelayaran, namun perlu diperhatikan pula lingkungan strategis yang terjadi saat ini yaitu dengan ditetapkannya 9 (sembilan) Agenda Pembangunan pemerintahan dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang dikenal dengan Nawacita yaitu:

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui : Indonesia Pintar, Indonesia sehat, Indonesia Sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Nawacita dimaksud khususnya butir 3 (tiga), yang menyebutkan "akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan" akan diwujudkan dengan program Tol Laut yang dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan angkutan laut yang menghubungkan wilayah Indonesia yang sudah maju dan wilayah Indonesia yang belum maju atau tertinggal termasuk daerah perbatasan secara tetap dan teratur (berjadwal).

Disamping itu, dalam upaya untuk melaksanakan program Tol Laut, Dirjen Perhubungan Laut dalam Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut, yang telah diubah dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut AL.108/7/8/DJPL-15 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Jaringan Trayek Pelayaran Tol Laut Tahun Anggaran 2016 dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya telah menetapkan 6 (enam) jaringan Trayek Angkutan Barang Melalui Laut atas dasar Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) yaitu:

- Trayek 1 : Tg. Perak – Wanci – Namlea – Fak-fak – Kaimana – Timika – Kaimana – Fak-fak – Namlea – Wanci – Tg. Perak
- Trayek 2 : Tg Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki – Dobo – Merauke – Dobo – Saumlaki – Moa – Kalabahi – Tg. Perak
- Trayek 3 : Tg Perak – Larantuka – Lewoleba – Rote – Sabu – Waingapu – Sabu – Rote – Lewoleba – Larantuka – Tg. Perak
- Trayek 4 : Tg Priok – Makassar – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari – Makassar – Tg. Priok
- Trayek 5 : Makassar – Tahuna – Lirung – Morotai – Tobelo – Ternate – Babang – Ternate – Tobelo – Morotai – Lirung – Tahuna – Makassar
- Trayek 6 : Tg. Priok – Tarempa – Natuna – Tarempa – Tg. Priok

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan transportasi laut dalam trayek-trayek dimaksud, maka pelabuhan-pelabuhan yang akan dikunjungi kapal yang bersangkutan harus dilengkapi sarana dan prasarananya yang memadai serta ditingkatkan kinerja operasionalnya.

Di samping itu salah satu program untuk menunjang konsep “Tol Laut” adalah program pengembangan kepelabuhanan antara lain melalui perubahan kelembagaan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) yaitu : dengan merubah pola pengelolaan keuangan beberapa Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sepanjang (khususnya) yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pelayanan umum penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan.

Selanjutnya tugas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) yang bersifat menjalankan fungsi pemerintahan (Keselamatan Pelayaran) menjadi unit yang terpisah.

2.1.3. Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional

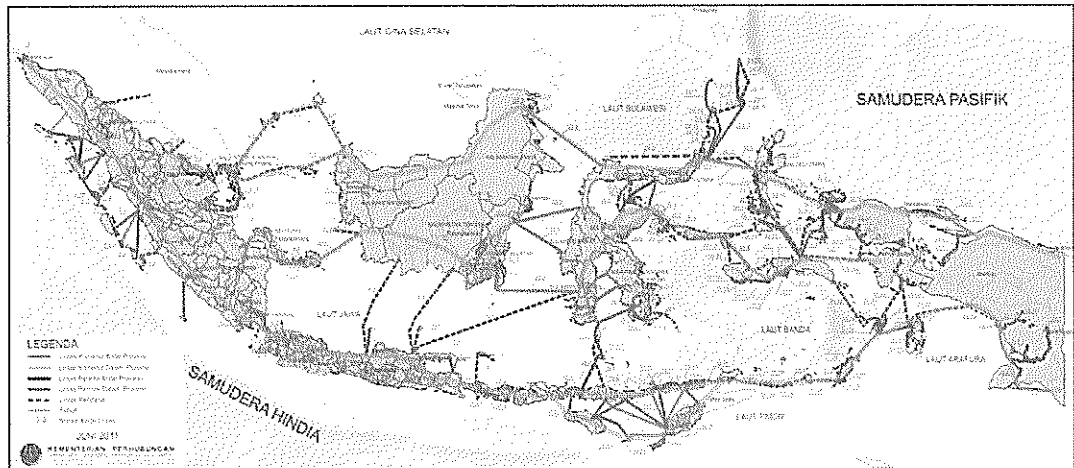
Salah satu kebijakan untuk menunjang konsep tol laut adalah pengembangan Sabuk Penyeberangan Nasional.

Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional adalah konsepsi spasial terkait pengembangan jaringan transportasi penyeberangan nasional sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan jaringan jalan rel yang terputus oleh perairan sehingga menjadi suatu kesatuan pengembangan transportasi darat nasional yang utuh dan tidak terpisahkan.

Sabuk Utara adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian utara Indonesia. Sabuk Tengah adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian tengah Indonesia. Sabuk Selatan adalah koridor pengembangan jaringan penyeberangan nasional di bagian selatan Indonesia dan penghubung Antar Sabuk adalah koridor dan lintas penyeberangan yang menghubungkan antar sabuk dari arah utara ke tengah ke selatan Indonesia.

Untuk mewujudkan kebijakan sabuk penyeberangan nasional harus didukung dengan penyelenggaraan pelabuhan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pada Bab X, Ketentuan Lain-Lain, pasal 162 menjelaskan bahwasannya pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersil untuk kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan Laut yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, sesuai dengan PM No. 85 Tahun 2011).

Penyelenggaraan pelabuhan laut serta pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersil dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemerintah, Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi atau Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten/Kota.



Gambar 2.1 Kebijakan Sabuk Penyeberangan Nasional

2.1.4. Kebijakan Pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau

2.1.4.1. Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung antar wilayah, mencakup:

- Penghubung wilayah antar negara;
- Penghubung wilayah antar provinsi;
- Penghubung wilayah antar kabupaten dalam provinsi;
- Penghubung wilayah dalam kabupaten.

2.1.4.2. Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung antar simpul dalam jaringan prasarana transportasi secara terpadu, intra atau antar moda, mencakup:

- Penghubung Antarmoda Sungai-Laut;
- Penghubung Antarmoda Sungai-Udara;
- Penghubung Antarmoda Sungai-Kereta Api;
- Penghubung Antarmoda Sungai-Jalan Raya.

2.1.4.3. Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penghubung logistik, mencakup:

- Penghubung Logistik Batubara;
- Penghubung Logistik CPO;
- Penghubung Logistik Karet;
- Penghubung Logistik BBM dan Gas;

- Penghubung Logistik Hasil Hutan.
- Penghubung Logistik Tanaman Pangan dan Perikanan Darat

2.1.4.4. Peran jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai sebagai penyedia jasa perpindahan orang atau barang, mencakup:

- Penyedia Jasa Perpindahan Orang-Barang;
- Penyedia Jasa Perpindahan Barang.

2.1.5. Aksesibilitas 10 Destinasi Wisata Nasional

Pelabuhan-pelabuhan yang menunjang 10 destinasi wisata nasional sesuai surat Sekretaris Kabinet Nomor B.652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 06 November 2015 tentang Tutorial Presiden Republik Indonesia tentang Pariwisata, adalah sebagai berikut :

1. Destinasi wisata Danau Toba dapat dilayani oleh pelabuhan laut Belawan dan pelabuhan danau Tigaras, Simanindo, Muara, Sippingan Nainggolan, Tomok, Ajibata, Onanrunggu dan Balige;
2. Destinasi wisata Tanjung Kelayang dapat dilayani oleh pelabuhan laut Tanjung Pandan, Tanjung Batu dan Tanjung Ruu;
3. Destinasi wisata Tanjung Lesung dapat dilayani oleh pelabuhan laut Banten, Labuhan, Panimbang, Anyer Lor dan Merak;
4. Destinasi wisata Kepulauan Seribu dapat dilayani oleh pelabuhan laut P. Pramuka, P. Bidadari, P. Kelapa, P. Lancang, P. Pari, P. Payung, P. Sebir, P. Tidung dan P. Untung Jawa;
5. Destinasi wisata Borobudur dapat dilayani oleh pelabuhan laut Tanjung Emas dan Tanjung Intan;
6. Destinasi wisata Bromo-Tengger-Semeru dapat dilayani oleh pelabuhan laut Tanjung Perak, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi dan Ketapang;
7. Destinasi wisata Mandalika dapat dilayani oleh pelabuhan laut Kayangan dan Lembar;
8. Destinasi wisata Labuhan Bajo dapat dilayani oleh pelabuhan laut Labuhan Bajo;

9. Destinasi wisata Wakatobi dapat dilayani oleh pelabuhan laut Baubau, Wanci, Kaledupa, Tomea dan Binongko;
10. Destinasi wisata Morotai dapat dilayani oleh pelabuhan laut Daruba dan Wayabula.

2.1.6. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) berlaku awal tahun 2016 yang merupakan integrasi ekonomi regional 10 negara Asia Tenggara.

Perdagangan bebas lintas batas akan mengalir cepat dan massal. Aliran bebas investasi, modal, dan tenaga kerja profesional akan mewarnai pergerakan ekonomi ASEAN. Potensi pasar ASEAN cukup besar yaitu 622 juta orang, dimana 250 juta orang diantaranya ada di Indonesia. Total nilai perdagangan Intra ASEAN sebesar 1,5 Trilyun \$ US pertahun dan produk domestik bruto ASEAN sebesar 2,6 Trilyun \$ US pertahun.

Sebagai antisipasi dari diberlakukannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan meningkatkan volume perdagangan regional ASEAN yang pada gilirannya akan meningkatnya kunjungan kapal dan angkutan barang melalui laut ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia perlu kesiapan pelabuhan dari aspek penyediaan fasilitas fisik pelabuhan serta kinerja operasionalnya perlu menjadi perhatian.

Untuk mendukung kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah direncanakan pengembangan lintas penyeberangan internasional Dumai – Malaka (Malaysia), Belawan – Penang (Malaysia) dan Bitung – General Santos (Filipina).

2.2. Pelaksanaan Atas Rencana Aksi Dibidang Pengaturan dan Pelaksanaan Kebijakan

Dalam rangka menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel telah dirumuskan **rencana aksi dibidang pengaturan dan pelaksanaan kebijakan** yang meliputi :

- Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

- Rencana aksi lebih lanjut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan;
- Inisiatif jangka pendek untuk mengimplementasikan kebijakan.

Dalam kurun waktu hampir 3 (tiga) tahun setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 telah banyak dikeluarkan regulasi dalam rangka pelaksanaan rencana aksi dimaksud antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 Tahun 2016 tentang Tarif dan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan & Reklamasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan & Reklamasi;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan.

BAB III

PROYEKSI LALU LINTAS MUATAN MELALUI PELABUHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KEPELABUHANAN DI INDONESIA

3.1. Latar Belakang

Proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan di masa mendatang dibuat dengan memperbaharui (*updating*) prediksi kebutuhan pergerakan transportasi laut pada RIPN sebelumnya yang berbasis kepada pergerakan sampai dengan tahun 2009, dengan menyertakan data pergerakan dan bongkar muat di pelabuhan pada tahun 2013 dan 2014.

Pendekatan utama dalam prediksi kebutuhan pengembangan pelabuhan dalam reviu RIPN ini adalah dengan pendekatan tingkat pertumbuhan pergerakan di pelabuhan, yang dalam pola distribusinya memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pengembangan Tol Laut, dan kebijakan pemerintah dalam konektivitas multimoda.

Dengan demikian, perkembangan lalu lintas di pelabuhan dan pola distribusinya didasarkan kepada pendekatan tingkat pertumbuhan kebutuhan pergerakan di pelabuhan dan juga memperhatikan pendekatan model jaringan multimoda untuk melihat peran pelabuhan dalam pengembangan Tol Laut dan *Short-Sea Shipping*.

Dengan tumbuh dan berkembangnya lalu lintas muatan di masa mendatang memberikan implikasi terhadap pembangunan kepelabuhanan di Indonesia, tidak hanya dalam pengembangan kapasitasnya, melainkan pula peningkatan konektivitasnya dengan wilayah yang dilayaninya.

3.2. Perkembangan Kebutuhan Pergerakan

3.2.1. Tingkat Pertumbuhan Eksisting

Dalam RIPN terdahulu, tingkat pertumbuhan kebutuhan pergerakan yang digunakan untuk Skenario Dasar (*Base Case*) adalah 7.6% rata-rata untuk seluruh jenis komoditas. Sementara itu, data muatan pelayaran setelah tahun 2009

menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat pertumbuhan (perlambatan) dengan rata-rata tingkat pertumbuhan 5,09%.

Sementara pola pergerakan nampak tidak jauh berbeda.

Tabel 3.1. Perkembangan Muatan di Pelabuhan Indonesia Tahun 2009-2013

No	Tahun	Muatan (Ton)	Perkembangan	
			Ton	%
1	2009	79,953,771		
2	2010	93,805,476	13,851,705	17.32
3	2011	97,636,973	3,831,497	4.08
4	2012	108,601,276	10,964,303	11.23
5	2013	111,870,322	3,269,046	3.01
Perkembangan Kumulatif			31,916,551	35.65
Perkembangan Rata-Rata per Tahun			4,559,507	5.09

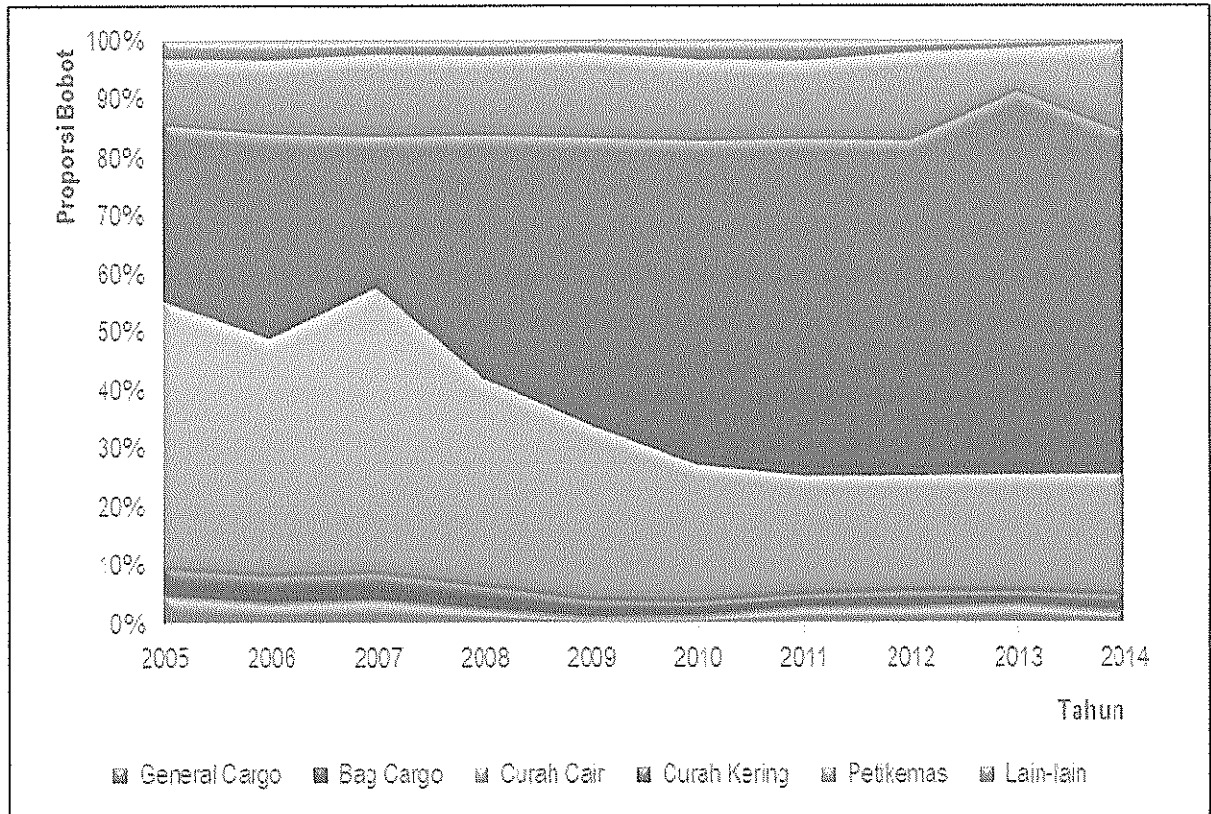
Bila dilihat untuk masing-masing komoditas (berdasarkan jenis kemasan), kecenderungan perkembangan volume bongkar muat adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Tingkat Perkembangan Muatan menurut jenis kemasan tahun 2004-2014

Komoditas Menurut Jenis Kemasan	Perkembangan (%/tahun)		
	2004-2009	2009-2014	Rata-rata
General Cargo	-17.5	23.4	3.0
Bag Cargo	-1.3	4.9	1.8
Curah Cair	-3.5	1.4	-1.1
Curah Kering	19.7	10.1	14.9
Petikemas	7.9	19.2	13.5
Lain-lain	-1.4	-1.9	-1.6

Tampak bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan volume bongkar muat barang yang cukup signifikan, kecuali pada tahun 2014 dan setelahnya yang mengalami perlambatan. Tingginya pertumbuhan volume peti kemas didorong juga oleh kontainerisasi. Sementara komoditas curah cair cenderung mengalami penurunan sedangkan curah kering pertumbuhannya masih tinggi.

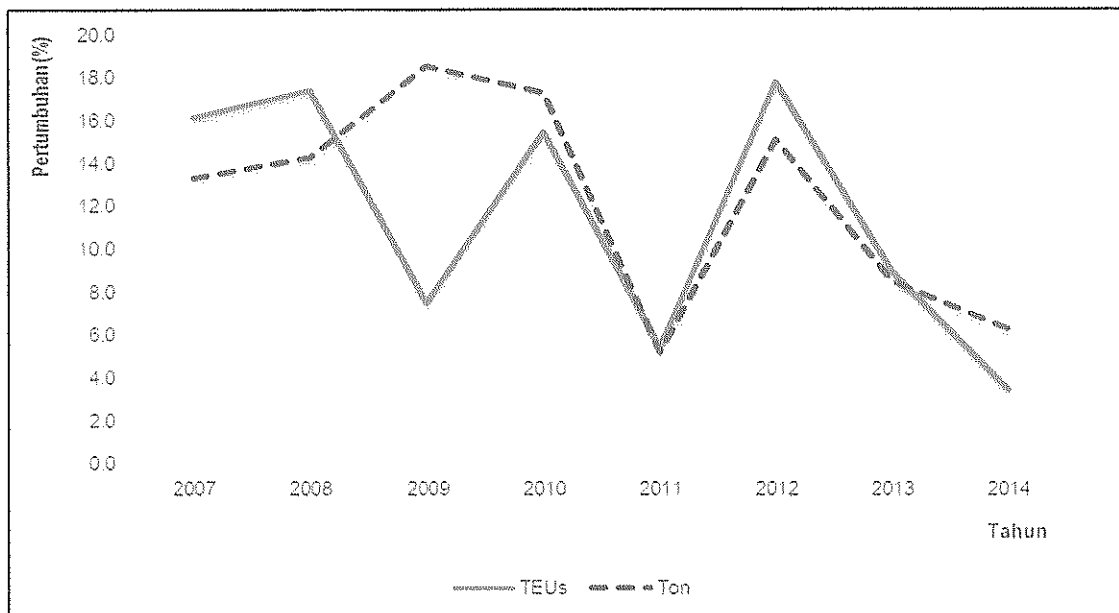
Ditinjau dari total bobot (ton), proporsi masing-masing jenis kemasan komoditas mengalami perubahan yang berbeda-beda seperti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Proporsi Bobot Bongkar Muat Menurut Jenis Kemasan

Barang curah kering pada tahun 2014 meliputi 58,4% total bobot barang yang dibongkar-muat di pelabuhan, naik dari 30,3% pada tahun 2005. Sebaliknya curah cair yang pada tahun 2005 cukup mendominasi dengan 45,8% dari total bobot, turun menjadi 20,9% pada tahun 2014. Sementara itu, komoditas jenis kemasan lain tidak banyak berubah proporsi bobotnya dengan peti kemas yang cenderung mengalami sedikit kenaikan.

Khusus, untuk peti kemas, pertumbuhannya dalam 7 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan (lihat gambar di bawah), dengan perbedaan yang mencolok pada tahun-tahun tertentu antara bobot muatan (ton) dengan TEUs-nya. Perbedaan ini dimungkinkan karena adanya pergerakan peti kemas kosong. Namun secara rata-rata, bobot muatan per TEUs tidak banyak berubah, yaitu sekitar 11,5 – 12,8 ton/TEU.



Gambar 3.2. Fluktuasi Perkembangan Volume Bongkar Muat Peti kemas dalam TEUs dan Bobot Muatan (ton)

3.2.2. Peran Pelabuhan dalam Pengembangan Tol Laut dan *Short-Sea Shipping*

Dalam RIPN yang terdahulu, terdapat beberapa rencana pengembangan transportasi laut yang belum dielaborasi sejauh mana peran pelabuhan serta pengaruh dari implementasi rencana-rencana tersebut terhadap pelabuhan. Rencana pengembangan atau kebijakan yang kemudian dikaji dalam reviu RIPN ini diantaranya adalah:

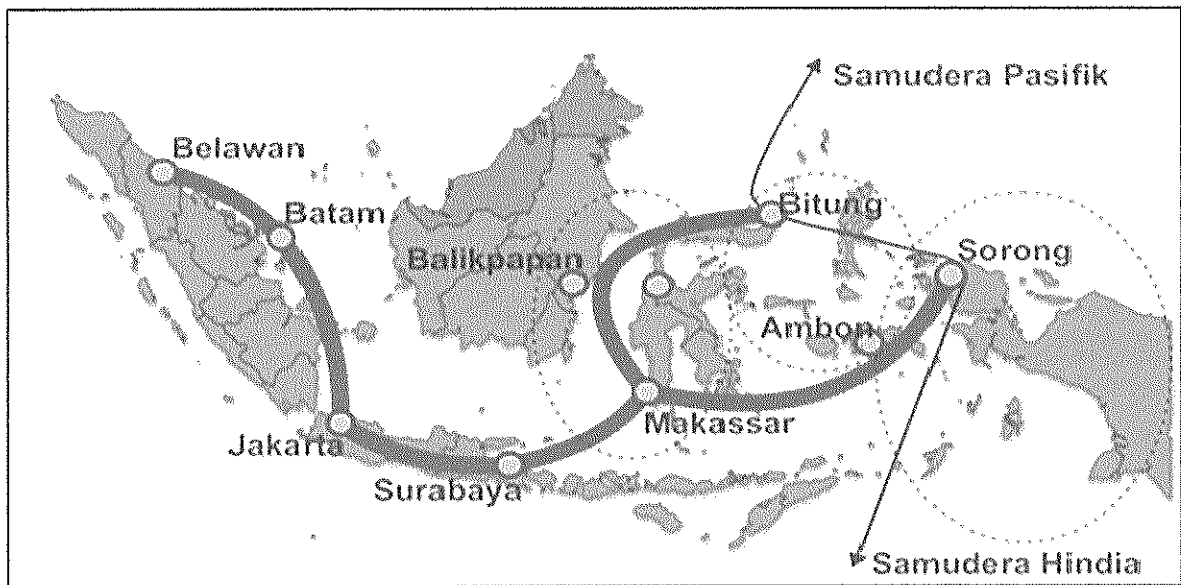
- Pengembangan Jaringan Tol Laut
- Pengembangan Jaringan *Short Sea Shipping* (SSS)

Kajian kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu pemodelan jaringan multimoda-multikomoditas¹, yang memperhitungkan jaringan pelayaran, jaringan jalan dan jaringan kereta api untuk komoditas barang berdasarkan jenis kemasan. Di mana pelabuhan (dan terminal atau stasiun) juga dimodelkan sebagai ruas dan titik dimana arus barang berpindah dari satu moda ke moda lainnya.

Terdapat beberapa definisi mengenai Tol Laut, salah satu yang cukup mengemuka adalah bahwa Tol Laut merupakan jaringan pelayaran peti kemas terjadwal (liner) yang menyinggahi beberapa pelabuhan utama di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Papua.

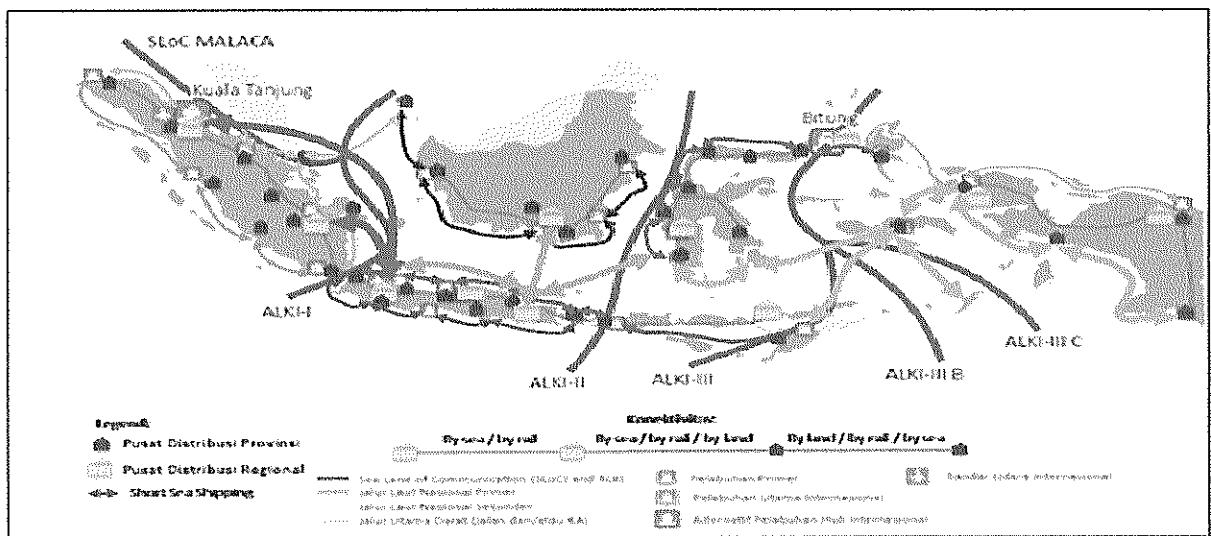
¹ Hasil pemodelan dan kajian kebijakan ini juga dibahas dalam tulisan berjudul Analisis Kebijakan Jaringan Angkutan Laut Indonesia dengan Pendekatan Model Jaringan Multimoda Multikomoditas, ITB dan IPC, 2015

Kapal yang digunakan adalah kapal peti kemas berukuran di atas 1000 TEUs. Tentu saja pengembangan jaringan pelayaran ini (rutennya lihat gambar) akan didukung dengan pengembangan terminal peti kemas yang dapat mengakomodasi kapal peti kemas dengan ukuran tersebut serta ketersediaan dermaga dan kinerja bongkar muat yang tinggi.



Gambar 3.3 Rute Tol Laut

Sementara itu, di dalam Dokumen Sistem Logistik Nasional, direkomendasikan untuk dikembangkan Jaringan Pelayaran *Short Sea Shipping* yang merupakan jaringan rute pelayaran yang bergerak di sepanjang garis pantai atau di antara pulau-pulau yang berdekatan, yang tujuan utamanya adalah mengurangi penggunaan truk di jalan. Rute yang direkomendasikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.4 Jaringan pelayaran *Short Sea Shipping*

Pengembangan Jaringan Pelayaran Tol Laut dan *Short Sea Shipping* maupun kombinasinya diprediksi akan meningkatkan *share* moda laut. Namun, Jaringan Tol Laut ini seharusnya didukung oleh pengaturan rute pelayaran lain yang membentuk rute *feeder*. Dengan sistem rute seperti ini, diperkirakan akan memperbaiki biaya transportasi total (semua moda) sebesar 2,66% (atau sekitar 20% dari total biaya transportasi laut saja) dan mengurangi biaya transportasi moda jalan sebesar 8,64% dari kondisi eksiting. Sebaliknya tanpa pengaturan rute *feeder*, yang berarti harus bersaing dengan pelayaran yang mempunyai jadwal yang lebih fleksibel dan sering, Tol Laut dengan ukuran kapal 3000 TEUs diperkirakan akan memiliki muatan yang lebih rendah, sehingga efisiensi biaya transport tidak terwujud.

Skenario *Short Sea Shipping* mempunyai biaya transportasi total yang lebih mahal dan hanya memberikan sedikit kontribusi pada peningkatan *sharing* moda transportasi laut untuk pergerakan dalam pulau, akibat dari biaya yang dikeluarkan pemilik barang bila menggunakan rute *Short Sea Shipping* yang jauh lebih mahal di bandingkan dengan transportasi menggunakan moda truk.

Short Sea Shipping belum memberikan perbaikan yang signifikan, kecuali untuk rute antar pulau. Hal ini disebabkan tarif yang lebih murah dengan menggunakan truk untuk pelayanan *door-to-door* dari pada menggunakan moda laut. Peraturan dalam operasi truk, pendanaan dan subsidi untuk *Short Sea Shipping* serta penegakkan peraturan tersebut akan meningkatkan manfaat *Short Sea Shipping*.

3.2.3. Prediksi Pertumbuhan Kebutuhan Pergerakan

Dengan kondisi perkembangan kebutuhan pergerakan barang berdasarkan data tahun 2013 yang menunjukkan sedikit perlambatan, maka untuk prediksi kebutuhan pergerakan di masa yang akan datang dalam studi ini digunakan tingkat pertumbuhan berdasarkan skenario yang terkoreksi seperti tabel berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Pertumbuhan Pergerakan Barang di Pelabuhan

Jenis	Skenario	Pertumbuhan/Tahun (%)		
		2015	2020	2030
Domestik	Rendah	3.2	2.7	2.3
	Dasar	5.1	4.0	2.8
	Tinggi	5.4	4.4	3.2
Internasional	Rendah	2.1	1.7	1.4
	Dasar	7.5	2.1	1.8
	Tinggi	11.1	3.0	2.7

Maka besarnya total kebutuhan pergerakan di pelabuhan menurut skenario dan jenis perdagangan serta tahun prediksi dapat ditentukan sebagai berikut:

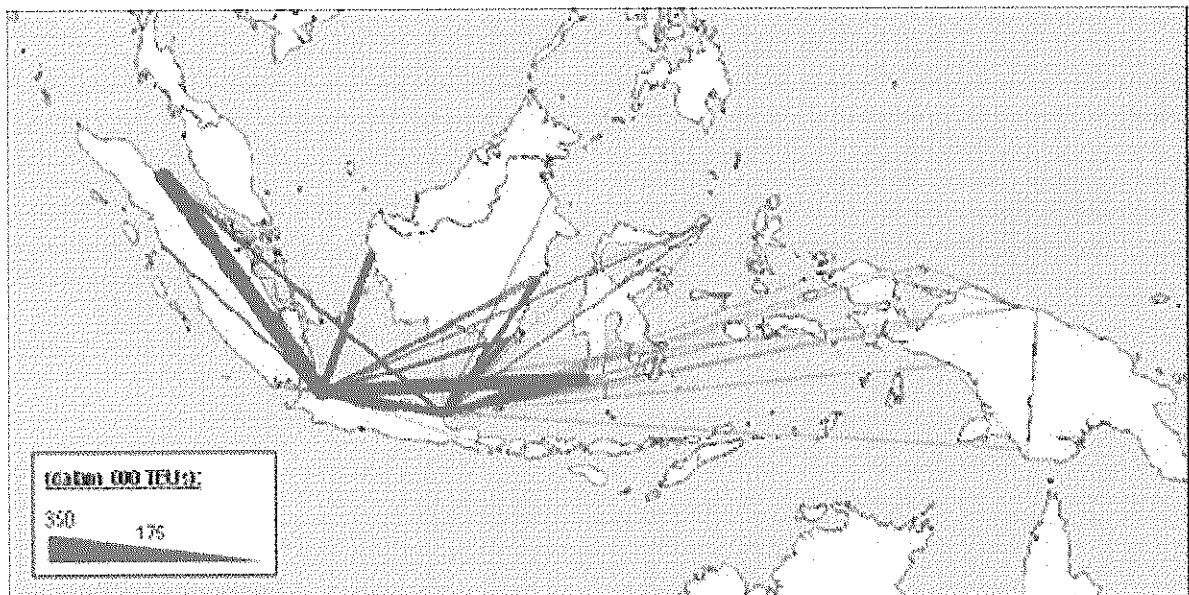
Tabel 3.4 Prediksi Kebutuhan Pergerakan Barang Total di Pelabuhan

Jenis	Skenario	Total Kebutuhan Pergerakan (juta ton/th)		
		2015	2020	2030
Domestik	Rendah	523.7	597.6	751.9
	Dasar	584.1	711.1	941.1
	Tinggi	594.1	736.1	1,012.5
Internasional	Rendah	615.7	670.0	769.7
	Dasar	836.4	929.8	1,115.6
	Tinggi	1,022.2	1,185.2	1,547.5
Total	Rendah	1,139.5	1,267.6	1,267.6
	Dasar	1,420.5	1,640.9	2,056.7
	Tinggi	1,616.3	1,921.3	2,560.1

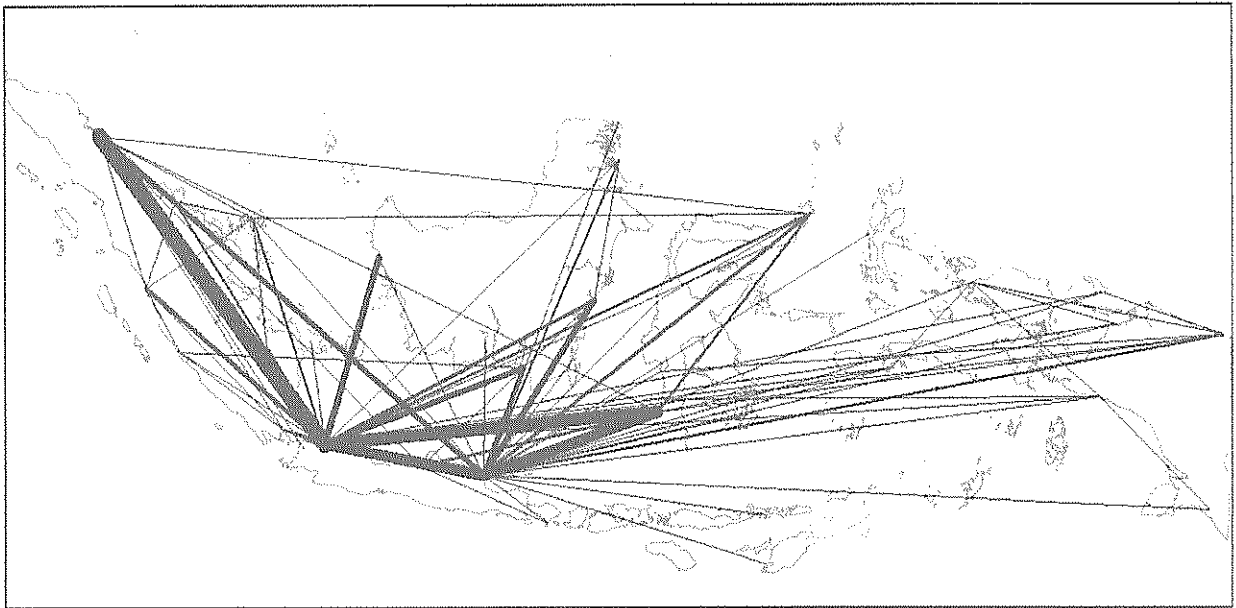
Selanjutnya hasil prediksi yang didetailkan menurut jenis komoditas akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan. Hal ini, berarti secara umum, kebutuhan pengembangan fasilitas pelabuhan akan sedikit melambat namun lebih merata.

3.2.4. Pola Pergerakan Barang

Pola pergerakan peti kemas (domestik) tidak banyak mengalami perubahan antara tahun 2009 dan 2013, seperti yang dapat dibandingkan pada gambar-gambar dibawah ini:



Gambar 3.5 Pola Pergerakan Peti Kemas Domestik tahun 2009



Gambar 3.6 Pola Pergerakan Peti kemas Domestik tahun 2013

Hanya terdapat beberapa pergerakan (pasangan asal-tujuan pelabuhan) yang meningkat terutama di bagian timur Indonesia. Sementara itu, untuk komoditas curah kering (domestik) yang cukup mendominasi secara bobot, juga memiliki pola yang hampir mirip antara 2009 dan 2013.

3.3. Implikasi Terhadap Rencana Pengembangan Pelabuhan

3.3.1. Pengembangan Kapasitas Pelabuhan

Dengan perkembangan muatan yang diprediksi dilayani di masa mendatang, tentu mengharuskan pelabuhan Indonesia mengembangkan kapasitas pelayanannya, baik melalui perbaikan kelembagaan (institusional), peningkatan kinerja pelayanan dalam bentuk produktivitas bongkar muat, maupun pengembangan fisik pelabuhan. Tidak hanya pada pelabuhan yang sudah beroperasi, melainkan pula pelabuhan-pelabuhan baru yang menjadi kebijakan pemerintah.

Dalam RIPN yang terdahulu, terdapat beberapa rencana pengembangan transportasi laut yang belum dielaborasi sejauh mana peran pelabuhan serta pengaruh dari implementasi rencana-rencana tersebut terhadap pelabuhan. Rencana pengembangan atau kebijakan yang kemudian diadopsi dalam reviu RIPN ini adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Yaitu antara lain:

- a. Pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Pelabuhan KEK Maloy Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Pembangunan Pelabuhan Jawa Barat (Utara) Provinsi Jawa Barat;
- e. Pembangunan Pelabuhan Sorong Provinsi Papua Barat;
- f. Pembangunan Pelabuhan Kalibaru Provinsi DKI Jakarta;
- g. Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. Pengembangan Pelabuhan Wayabula, Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara;
- i. Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu) Provinsi Sulawesi Tengah;
- j. Pengembangan kapasitas Pelabuhan Parigi Provinsi Sulawesi Tengah;
- k. Pengembangan Pelabuhan Kijing Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Pengembangan Pelabuhan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Sebagai penjabar, berikut ini uraian singkat mengenai penetapan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional petikemas, terkait dengan rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung dan rencana pembangunan Pelabuhan Patimban di Pantai Utara Jawa Barat.

Wacana untuk mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional petikemas di Indonesia dipandang tidak tepat. Permintaan lalu lintas ekspor/impor yang utama pada kondisi eksisting terjadi di antara pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) – Singapura. Penerapan kebijakan semua arus petikemas ekspor/impor melakukan konsolidasi/distribusi melalui Pelabuhan Kuala Tanjung akan menyebabkan biaya total transportasi meningkat 1,31%. Hal ini diakibatkan oleh arus lalu lintas truk yang lebih tinggi yang mengakses Pelabuhan Kuala Tanjung dari/ke Jawa dan Sumatera. Dengan demikian sudah tepat kebijakan pemerintah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Yaitu, yang antara lain

menetapkan fungsi Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung Provinsi Sumatera Utara sebagai pelabuhan internasional, dan bukan sebagai pelabuhan hub internasional.

Adapun rencana pengembangan Pelabuhan Patimban termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang menyebutkan salah satu proyek infrastruktur strategis adalah Pelabuhan Jawa Barat (Utara) Propinsi Jawa Barat. Memang belum dinyatakan spesifik lokasinya, tetapi dalam berbagai kesempatan Kementerian Perhubungan mendeklarasikan salah satu lokasi, dan bukan satu-satunya alternatif, adalah berlokasi di Patimban Kabupaten Subang.

Dasar hukum rencana pembangunan Pelabuhan Patimban adalah Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional. Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan pembinaan manajemen pengoperasional pelabuhan serta pembinaan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan.

Pelabuhan Patimban dikembangkan sebagai komplementer Pelabuhan Tanjung Priok, yang dimasa mendatang industri yang berkembang di Jawa Bagian Barat tidak bisa lagi mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua pelabuhan dikembangkan, dengan industri di Jabodetabek yang dekat ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan untuk industri di Cikarang, Karawang dan sekitarnya, yang akan lebih dekat ke pelabuhan baru Patimban. Pada intinya, pemerintah mendorong terbangunnya pelabuhan utama di pantai Jawa Barat yang mampu melayani industrialisasi yang besar di wilayah Jawa Barat.

Dengan uraian tersebut di atas, maka kebijakan pemerintah yang menetapkan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok (bersama dengan Pelabuhan Patimbang secara komplementer) sebagai pelabuhan hub internasional petikemas adalah tepat. Karena skenario pengembangan pelabuhan hub internasional diperkirakan akan meningkatkan mode share angkutan laut sebesar 6,42% atau sekitar 0,30% dari kondisi eksisting. Terlebih pelabuhan tersebut memiliki posisi sentral dalam

pengembangan Tol Laut, terutama dalam menyediakan waktu serta biaya pelayanan yang rendah yang berkontribusi meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional.

3.3.2. Pengembangan Konektivitas Antarmoda di Pelabuhan

Pada dasarnya pelabuhan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan moda lainnya. Tingkat keterhubungan atau lebih dikenal dengan konektivitas ini semestinya dapat dikuantifikasi.

Untuk konektivitas pelabuhan dan moda jalan dapat dinyatakan dalam indikator kualitas keterhubungan yang dapat dikorelasikan dengan besarnya kebutuhan pergerakan di Pelabuhan, sedemikian sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan (kapasitas) jalan akses Pelabuhan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Kebutuhan konektivitas pelabuhan dan jaringan jalan (jalan akses pelabuhan)

Total Kebutuhan Pergerakan Barang (juta ton/tahun)	Kebutuhan Jalan Akses Minimum	Referensi (tahun 2012)
Kurang dari 5	2 lajur 2 arah	Bitung ~ 5 jt ton/th
5 – 10	4 lajur 2 arah	Makassar ~ 12 jt ton/th
10 – 40	Lajur Khusus Truk	Pontianak ~ 30 jt ton/th
Lebih dari 40	Jalur Khusus Truk atau Jalan Bebas Hambatan	Tj. Perak ~ 70 jt ton/th Tj. Priok ~ > 75 jt ton/th

Diharapkan, dengan penyediaan jalan akses seperti di tabel di atas, aksesibilitas pelabuhan dapat dipertahankan, atau tidak terjadi kemacetan yang terlalu parah. Itupun bila hambatan samping dan guna lahan di sekitar pelabuhan bisa tetap terkontrol dengan baik.

Sementara itu, akses jaringan kereta api ke/dari pelabuhan disarankan masuk sampai kepada lapangan penumpukan atau gudang, supaya kecepatan dan jadwal bongkar muat kapal dapat diimbangi oleh jadwal dan kapasitas angkut kereta api atau sebaliknya.

Merupakan perkembangan baru bahwa pemerintah merencanakan pembangunan *Inland Waterways/CBL* Cikarang-Bekasi-Laut Jawa, di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yang menjadi salah satu moda konektivitas Pelabuhan Tanjung Priok/Kalibaru dengan wilayah belakang (*hinterland*) nya. Proyek tersebut

merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

3.4. Transportasi Penyeberangan

Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran).

Keberadaan angkutan penyeberangan, mampu mengatasi keterbatasan angkutan jalan atau angkutan kereta api dalam menghubungkan dua lokasi yang terpisah oleh perairan atau dapat dikatakan sebagai penyambung sistem jaringan yang terputus oleh perairan. Pengembangan transportasi penyeberangan sebagai penghubung jaringan jalan atau jalan rel menjadi cukup mendesak mengingat laju perkembangan otonomi daerah yang ditandai dengan semangat pemekaran wilayah, yang disertai pesatnya pembangunan infrastruktur wilayah terutama jalan raya. Beberapa daerah yang semula relatif terisolasi pun diharapkan dapat dikembangkan dengan penyelenggaraan moda penyeberangan.

Transportasi penyeberangan untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan, dimana berdasarkan Peraturan presiden RI nomor 56 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara Pasal 6 ayat 8 Strategi untuk pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia bagian tenggara meliputi :

- a. Mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antar pulau dan antar wilayah
- b. Mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan dan Bandar udara.
- c. Mendorong pengembangan pelabuhan disepanjang ALKI II, ALKI IIIA, ALKI IIID untuk mendukung pelayaran internasional.
- d. Mengembangkan Bandar udara untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan antar Negara

Selain mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan, transportasi penyeberangan juga mendukung sistem logistik nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 5, disebutkan bahwa jalan memiliki fungsi:

- a. sebagai bagian dari prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam ekonomi sosial budaya politik, pertahanan dan keamanan, dan lingkungan hidup serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;
- c. sebagai satu kesatuan sistem jaringan jalan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya pengembangan jalan mengacu kepada rencana tata ruang untuk mendukung terwujudnya kerangka strategis penataan ruang nasional. Jaringan jalan yang ada tidak saja berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan, tapi juga berperan untuk menyeimbangkan pengembangan kawasan, mengamankan teritorial dan sebagai perekat keutuhan NKRI.

3.4.1 Tingkat Pertumbuhan Eksisting

Berdasarkan data produksi angkutan penumpang tahun 2011 sampai dengan 2015, pertumbuhan produksi angkutan penumpang pada lintas penyeberangan komersil di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan 3,54% per tahun.

Tabel 3.6. Perkembangan Produksi Angkutan Penumpang di Indonesia Tahun 2011-2015

Tahun	Penumpang	Perkembangan	
	(orang)	orang	%
2011	53.112.421		
2012	58.132.058	5.019.637	8,635
2013	60.736.082	2.604.024	4,287
2014	65.772.211	5.036.129	7,657
2015	61.793.202	(3.979.009)	(6,439)
Perkembangan Kumulatif		8.680.781	14,14
Perkembangan Rata-rata per tahun		2.170.195	3,54

Disamping angkutan penumpang, muatan dalam angkutan penyeberangan juga berupa kendaraan beserta barang yang ada didalamnya. Pada umumnya muatan

angkutan untuk kendaraan akan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu angkutan kendaraan roda dua (R2) dan angkutan kendaraan roda empat (R4).

Tabel 3.7. Perkembangan Produksi Angkutan Kendaraan R2 di Indonesia Tahun 2011-2015

Tahun	Kendaraan R2	Perkembangan	
	(unit)	unit	%
2011	5.472.872		
2012	5.467.651	(5.221)	-0,095
2013	7.395.761	1.928.110	26,070
2014	8.037.416	641.655	7,983
2015	7.733.716	(303.700)	-3,927
Perkembangan Kumulatif		2.260.844	30,03
Perkembangan Rata-rata per tahun		565.211	7,51

Berdasarkan data produksi angkutan kendaraan R2 tahun 2011 sampai dengan 2015 tersebut diatas, pertumbuhan produksi angkutan penumpang pada lintas penyeberangan komersil di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan 7,51% per tahun.

Tabel 3.8. Perkembangan Produksi Angkutan Kendaraan R4 di Indonesia Tahun 2011-2015

Tahun	Kendaraan R4	Perkembangan	
	(unit)	unit	%
2011	7.183.681		
2012	7.212.450	28.769	0,399
2013	7.663.029	450.579	5,880
2014	8.498.154	835.125	9,827
2015	8.078.772	(419.382)	-5,191
Perkembangan Kumulatif		895.091	10,91
Perkembangan Rata-rata per tahun		223.773	2,73

Dari data produksi angkutan kendaraan R4 dari tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun mencapai 2,73%.

3.4.2. Peran Angkutan Penyeberangan

Transportasi penyeberangan saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam sektor transportasi sejalan dengan program pemerintah melalui konsep NAWACITA, dimana transportasi penyeberangan dapat menghubungkan daerah yang terluar,

terpencil, terdepan serta sebagai *feeder* transportasi laut untuk mendukung konsep Tol Laut.

Transportasi penyeberangan secara tidak langsung berperan sebagai penghubung lintas pada jalur pelayaran laut maupun pelayaran perintis. Keberadaan transportasi penyeberangan juga dapat bersifat sebagai *shortcut* atau memperpendek jarak tempuh, sebagaimana definisi dari angkutan penyeberangan. Pada prinsipnya transportasi penyeberangan menyediakan layanan ulang alik yang memiliki jadwal tetap dan teratur yang menghubungkan dua titik, dimana barang yang diangkut harus dimasukkan dalam kendaraan atau bukan barang lepas. Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan. Hal ini sebagai bentuk upaya transportasi penyeberangan dalam membuka keterisolasian wilayah, dimana perlu didukung dengan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan alat mobilitas penduduk di wilayah tersebut.

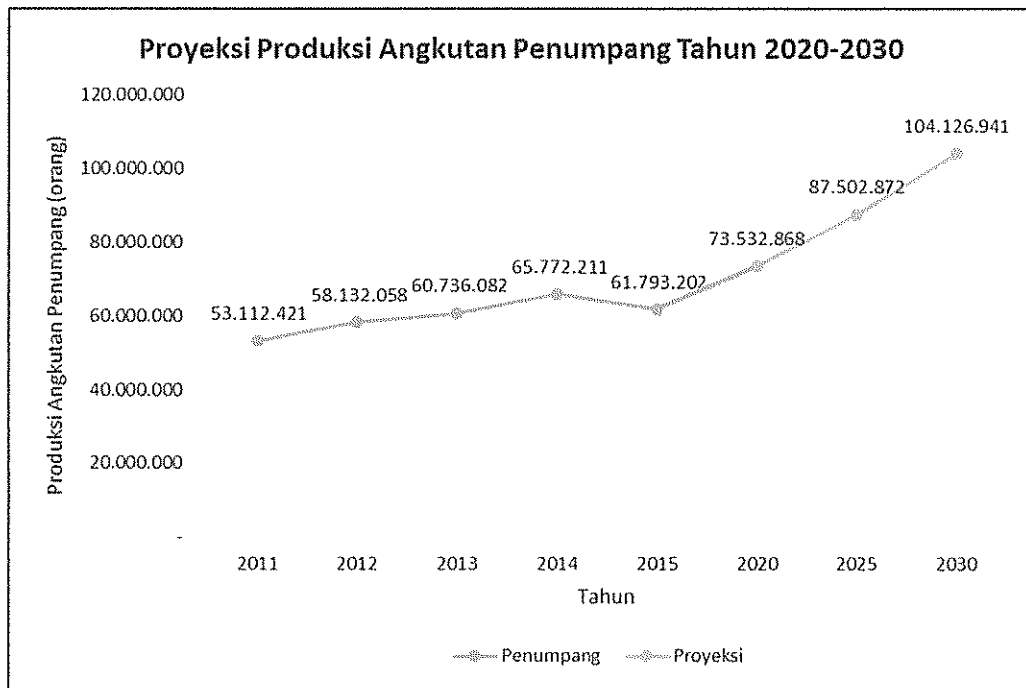
3.4.3. Prediksi Pertumbuhan Angkutan Penyeberangan

Dari data angkutan penyeberangan tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan pada setiap tahunnya, maka untuk memprediksi produksi angkutan penyeberangan baik penumpang, kendaraan roda dua (R2) maupun kendaraan roda empat (R4) di masa mendatang dianalisa dengan menggunakan metode pertumbuhan linear.

Tabel 3.9. Proyeksi Produksi Angkutan Penumpang Tahun 2020 - 2030

Tahun	Penumpang	Proyeksi
2011	53.112.421	
2012	58.132.058	
2013	60.736.082	
2014	65.772.211	
2015	61.793.202	
2020		73.532.868
2025		87.502.872
2030		104.126.941

Dari hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan penumpang pada tahun 2020 – 2030, menunjukkan bahwa pada tahun akhir pengembangan jangka panjang, produksi angkutan penumpang diproyeksi akan mencapai 104 juta penumpang dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,54% per tahun. Grafik pertumbuhan sebagaimana dalam Gambar 3.7.



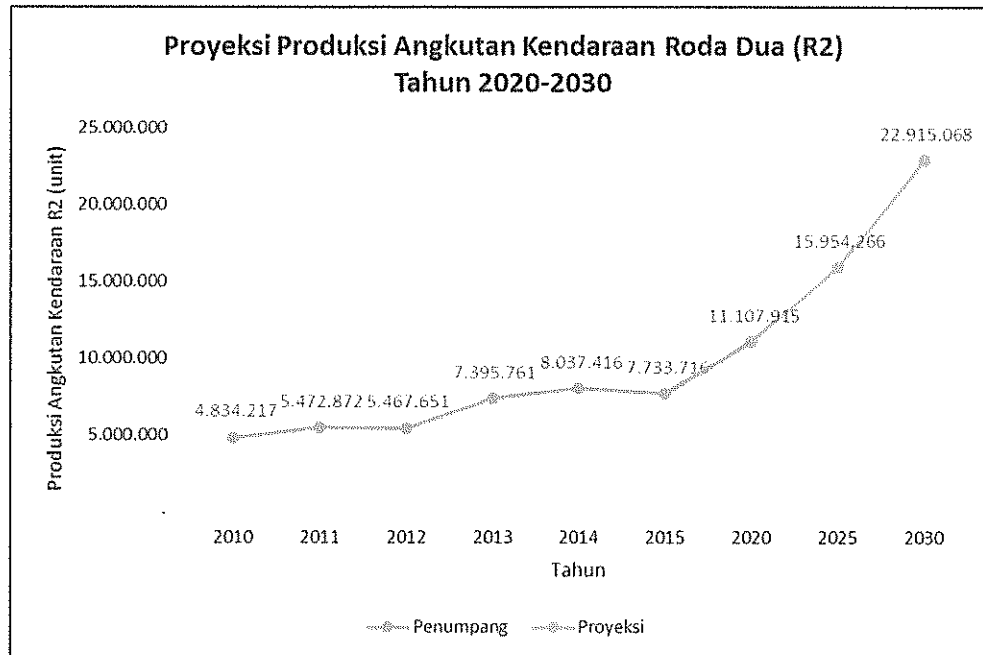
Gambar 3.7. Proyeksi Produksi Angkutan Penumpang Tahun 2020-2030

Berdasarkan data produksi kendaraan roda dua (R2), maka hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan kendaraan R2 pada tahun 2020 – 2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Proyeksi Produksi Angkutan Kendaraan R2 Tahun 2020 – 2030

Tahun	Penumpang	Proyeksi
2010	4.834.217	
2011	5.472.872	
2012	5.467.651	
2013	7.395.761	
2014	8.037.416	
2015	7.733.716	
2020		11.107.915
2025		15.954.266
2030		22.915.068

Hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan kendaraan R2 pada tahun 2020 - 2030 dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,51%, mencapai 11 juta unit kendaraan R2 sedangkan pada tahun 2030 mencapai 22 juta penumpang. Jika digambarkan dalam grafik, maka proyeksi produksi angkutan kendaraan roda dua (R2) adalah sebagaimana dalam Gambar 3.8.



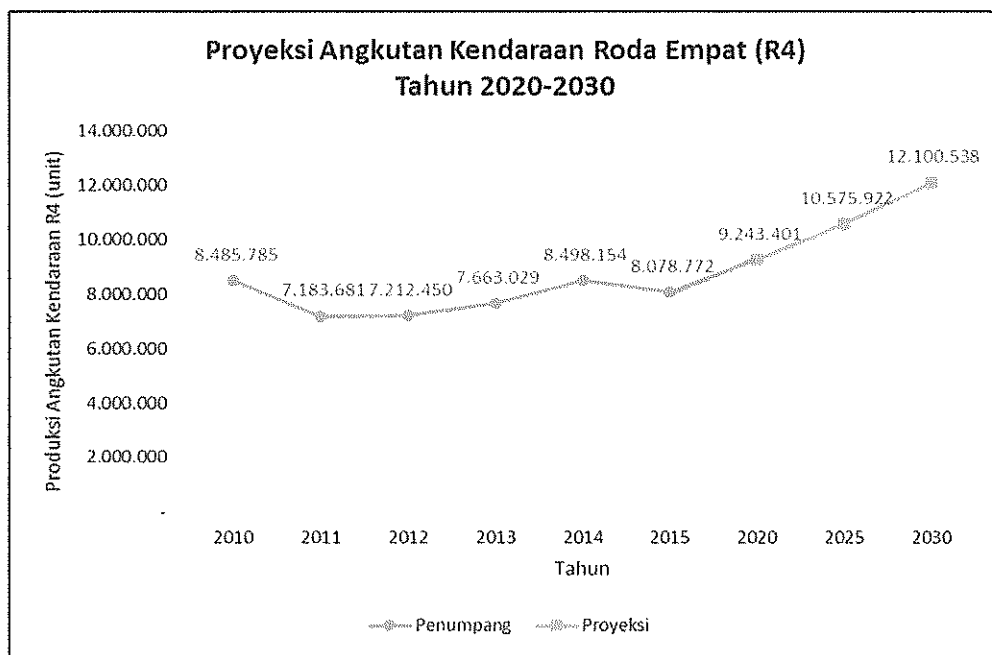
Gambar 3.8. Proyeksi Produksi Angkutan Kendaraan R2 Tahun 2020 – 2030

Dari data produksi kendaraan roda empat (R4), maka hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan kendaraan R4 pada tahun 2020 – 2030 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Proyeksi Produksi Angkutan Kendaraan R4 Tahun 2020 – 2030

Tahun	Penumpang	Proyeksi
2010	8.485.785	
2011	7.183.681	
2012	7.212.450	
2013	7.663.029	
2014	8.498.154	
2015	8.078.772	
2020		9.243.401
2025		10.575.922
2030		12.100.538

Hasil perhitungan proyeksi produksi angkutan kendaraan roda empat (R4) pada tahun 2020 – 2030, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Proyeksi Produksi Angkutan Kendaraan R4 Tahun 2020 – 2030

Dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,73% per tahun, maka proyeksi angkutan kendaraan roda empat (R4) pada tahun 2020 mencapai 9 juta unit kendaraan R4 sedangkan pada tahun 2030 mencapai 12 juta unit kendaraan R4.

BAB IV

LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN

4.1. Definisi/Pengertian

4.1.1. Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

4.1.2. Pelabuhan Utama

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

4.1.3. Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

4.1.4. Pelabuhan Pengumpan

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam

provinsi.

4.1.5. Wilayah Kerja Pelabuhan

Wilayah Kerja Pelabuhan adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang membawahinya.

Wilayah kerja pelabuhan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan dan keselamatan pelayaran dan/ atau penyediaan pelayanan jasa kepelabuhanan di perairan pelabuhan untuk mempelancar angkutan laut.

4.1.6. Terminal

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Terminal Umum adalah terminal yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

4.1.7. Rencana Lokasi Pelabuhan

Rencana Lokasi Pelabuhan adalah usulan lokasi pelabuhan yang masih memerlukan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Kriteria Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor PP. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dalam Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Hierarki Peran dan Fungsi Pelabuhan sebagai berikut :

1. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut :
 - a. Pelabuhan Utama
 - b. Pelabuhan Pengumpul
 - c. Pelabuhan Pengumpan Regional
 - d. Pelabuhan Pengumpan Lokal
2. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan :
 - a. Pelabuhan Kelas I
 - b. Pelabuhan Kelas II
 - c. Pelabuhan Kelas III
3. Pelabuhan Sungai dan Danau

4.2.1. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut :

4.2.1.1. Pelabuhan Utama

Lokasi Pelabuhan Utama berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

1. Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional kurang dari 500 mil dan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
2. Memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
3. Kedalaman kolam pelabuhan minimal –9 m-LWS;
4. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT;
5. Panjang dermaga minimal 350 m’;
6. Luas lahan pelabuhan minimal 50 Ha;

7. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

4.2.1.2. Pelabuhan Pengumpul

Lokasi pelabuhan pengumpul berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut :

1. Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil;
2. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 mil;
3. Kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 sampai dengan -9 mLWS;
4. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT;
5. Panjang dermaga 120 - 350 m';
6. Luas lahan pelabuhan minimal 10 Ha;
7. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

4.2.1.3. Pelabuhan Pengumpan Regional

Lokasi pelabuhan pengumpan regional berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

1. Memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya minimal 20-50 mil;
2. Kedalaman kolam pelabuhan mulai – 5 sampai dengan -7 mLWS;
3. Kapasitas dermaga maksimal 3.000 DWT;
4. Panjang dermaga 80 - 120 m';
5. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang.

4.2.1.4. Pelabuhan Pengumpan Lokal

Lokasi pelabuhan pengumpan lokal berpedoman pada kriteria teknis sebagai berikut:

1. Memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya minimal 5-20 mil;
2. Kedalaman kolam pelabuhan maksimal - 5 m-LWS;
3. Kapasitas dermaga maksimal 1.000 DWT;
4. Panjang dermaga maksimal 80 m';

4.2.2. Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Penyeberangan:

4.2.2.1. Pelabuhan Kelas I

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas I harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

1. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
2. Menghubungkan Jalan Arteri Primer (JAP); Jalan tol, Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), jalan strategis nasional dan antar negara;
3. Lokasi pelabuhan secara strategis berada pada sabuk penyeberangan nasional dan penghubung antar sabuk;
4. Pelabuhan yang diusahakan secara komersil.

4.2.2.2. Pelabuhan Kelas II

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas II harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

1. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
2. Menghubungkan JAP, jalan tol, JKP-1 dan jalan strategis nasional;
3. Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
4. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

4.2.2.3. Pelabuhan Kelas III

Penetapan pelabuhan laut yang melayani angkutan penyeberangan kelas III harus memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut :

1. Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
2. Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jalan JKP-2, JKP-3, JKP-4 dan jalan yang tidak termasuk pada kriteria pelabuhan untuk angkutan penyeberangan kelas 1 maupun kelas 2.

3. Lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
4. Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.

4.2.3. Pelabuhan Sungai dan Danau:

4.2.3.1. Hierarki Pelayanan

Dalam Tataan Kepelabuhan Nasional pelabuhan sungai, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15, PP 61/2009, secara hierarki pelayanannya terdiri atas:

1. pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau; dan/ atau
2. pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan penyeberangan, hierarki pelayanannya adalah sebagai berikut:
 - antar provinsi dan/atau antar negara;
 - antar kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi; dan/ atau
 - dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

4.2.3.1. Tataan Trayek

Trayek lalu-lintas angkutan sungai terdiri dari trayek tetap teratur, dan tidak tetap dan tidak teratur. **Hierarki trayek tetap dan teratur lalu-lintas angkutan sungai** ditentukan berdasarkan fungsi simpul transportasi sungai yang terhubung dan cakupan wilayah pelayanan, terdiri dari:

1. **Trayek utama** sebagaimana huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat penyebaran. Trayek Utama dapat berupa:
 - a. Trayek lalu-lintas angkutan sungai antar propinsi; atau
 - b. Trayek lalu-lintas angkutan sungai antar kabupaten dalam propinsi.
2. **Trayek cabang** sebagaimana dimaksud pada huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antar pelabuhan sungai yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran. Trayek Cabang dapat berupa:
 - a. Trayek lalu-lintas angkutan sungai antar kabupaten dalam propinsi; atau
 - b. Trayek lalu-lintas angkutan sungai dalam kabupaten.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REKAPITULASI JUMLAH PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT	2011	2015	2020	2030
PELABUHAN UTAMA (PU)	26	28	29	30
PELABUHAN PENGUMPUL (PP)	167	181	186	185
PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL (PR)	115	105	103	103
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL (PL)	32	26	22	22
TOTAL PELABUHAN	340	340	340	340
REKAPITULASI WILAYAH KERJA, RENCANA LOKASI DAN TERMINAL UMUM	2011	2015	2020	2030
WILAYAH KERJA PELABUHAN	389	389	389	389
RENCANA LOKASI PELABUHAN	1246	1246	1246	1246
TERMINAL (BAGIAN DARI PELABUHAN)	36	36	36	36

Keterangan :

- 1) **Wilayah Kerja Pelabuhan** adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kantor penyelenggara pelabuhan yang membawahinya.
- 2) **Terminal Umum** adalah terminal yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang dikelola oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau/dapat diberikan hak untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya.
- 3) **Rencana Lokasi Pelabuhan** adalah usulan lokasi pelabuhan yang masih memerlukan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*) Terdapat Kantor UPT Ditjen Hubla sesuai :

- 1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

*) Kantor Pelabuhan

SUB LAMPIRAN A1

LOKASI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK ANGKUTAN LAUT

KETERANGAN :

* Kantor Pelabuhan

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
I. Provinsi Aceh								
1	Aceh Barat	1	Meulaboh	PP	PP	PP	PP	*
2	Aceh Barat Daya	2	Susoh	PR	PR	PR	PR	*
3	Aceh Besar	3	Malahayati	PP	PP	PP	PP	*
4	Aceh Jaya	4	Calang	PP	PP	PP	PP	*
5	Aceh Selatan	5	Tapaktuan	PR	PP	PP	PP	*
6	Aceh Singkil	6	Singkil	PP	PP	PP	PP	*
7	Aceh Timur	7	Idi	PL	PL	PL	PL	*
8	Aceh Utara	8	Lhokseumawe/Kreung Geukeh	PP	PP	PP	PP	*
9	Langsa	9	Kuala Langsa	PP	PP	PP	PP	*
10	Sabang	10	Sabang	PU	PU	PU	PU	*
11	Simeulue	11	Sinabang	PP	PP	PP	PP	*
II. Provinsi Sumatera Utara								
12	Asahan	1	Tg. Balai Asahan/Bagan Asahan	PP	PP	PP	PP	*
13	Batubara	2	Kuala Tanjung	PP	PU	PU	PU	*
14	Batubara	3	Pangkalan Dodek	PR	PR	PR	PR	*
15	Batubara	4	Tanjung Tiram	PR	PR	PR	PR	*
16	Gunung Sitoli	5	Gunung Sitoli	PR	PR	PR	PR	*
17	Labuhan Batu	6	Sei Barombong	PR	PR	PR	PR	*
18	Labuhan Batu	7	Tanjung Sarang Elang	PR	PR	PR	PR	*
19	Labuhan Batu Utara	8	Teluk Leidong	PP	PP	PP	PP	*
20	Langkat	9	Pangkalan Susu	PP	PP	PP	PP	*
21	Langkat	10	Pangkalan Brandan	PP	PP	PP	PP	
22	Langkat	11	Pulau Kampai	PL	PL	PL	PL	*
23	Langkat	12	Tanjung Pura	PR	PR	PR	PR	*
24	Mandailing Natal	13	Natal / Sikara-kara	PR	PR	PR	PR	*
25	Medan	14	Belawan	PU	PU	PU	PU	*
26	Nias Barat	15	Sirombu	PR	PR	PR	PR	*
27	Nias Selatan	16	Pulau Tello	PP	PP	PP	PP	*
28	Nias Selatan	17	Teluk Dalam	PR	PR	PR	PR	*
29	Nias Utara	18	Lahewa	PR	PR	PR	PR	*
30	Serdang Bedagai	19	Tanjung Beringin	PR	PR	PR	PR	*
31	Serdang Bedagai	20	Pantai Cermin	PR	PR	PR	PR	*
32	Sibolga	21	Sibolga	PP	PP	PP	PP	*
33	Tapanuli Tengah	22	Barus	PL	PL	PL	PL	*
III. Provinsi Sumatera Barat								
34	Kep. Mentawai	1	Siberut / Simaliepet	PR	PR	PR	PR	*
35	Kep. Mentawai	2	Sikakap	PP	PP	PP	PP	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
36	Kep. Mentawai	3	Sioban	PR	PR	PR	PR	*
37	Padang	4	Teluk Bayur	PU	PU	PU	PU	*
38	Pasaman Barat	5	Teluk Tapang	PR	PP	PP	PP	
39	Pesisir Selatan	6	Carocok Painan	PR	PP	PP	PP	
IV. Provinsi Kepulauan Riau								
40	Batam	1	Batam/Batu Ampar	PU	PU	PU	PU	*
41	Batam	2	Pulau Sambu	PP	PP	PP	PP	*
42	Batam	3	Teluk Senimba	PR	PR	PP	PP	
43	Bintan	4	Lobam	PP	PP	PP	PP	
44	Bintan	5	Sei Kolak Kijang	PP	PP	PP	PP	*
45	Bintan	6	Tanjung Berakit	PP	PP	PP	PP	
46	Bintan	7	Tanjung Uban / Bulang Linggi	PR	PR	PR	PR	*
47	Karimun	8	Malarko	PP	PP	PP	PP	
48	Karimun	9	Tanjung Balai Karimun	PP	PP	PP	PP	*
49	Karimun	10	Tanjung Batu Kundur	PP	PP	PP	PP	*
50	Kep. Anambas	11	Tarempa	PP	PP	PP	PP	*
51	Lingga	12	Dabo Singkep	PR	PR	PR	PR	*
52	Lingga	13	Pekajang	PR	PP	PP	PP	
53	Lingga	14	Senayang	PL	PL	PL	PL	*
54	Natuna	15	Selat Lampa	PP	PP	PP	PP	
55	Tanjung Pinang	16	Tanjung Pinang	PP	PP	PP	PP	*
V. Provinsi Riau								
56	Bengkalis	1	Batu Panjang	PL	PL	PL	PL	*
57	Bengkalis	2	Bengkalis	PP	PP	PP	PP	*
58	Bengkalis	3	Sungai Pakning	PP	PP	PP	PP	*
59	Bengkalis	4	Tanjung Medang	PP	PP	PP	PP	*
60	Dumai	5	Dumai	PU	PU	PU	PU	*
61	Indragiri Hilir	6	Kuala Enok	PP	PP	PP	PP	*
62	Indragiri Hilir	7	Sungai Guntung	PP	PP	PP	PP	*
63	Indragiri Hilir	8	Tembilahan	PP	PP	PP	PP	*
64	Indragiri Hulu	9	Rengat/Kuala Cinaku	PP	PP	PP	PP	*
65	Kepulauan Meranti	10	Selat Panjang	PP	PP	PP	PP	*
66	Kepulauan Meranti	11	Meranti/Dorak	PR	PR	PR	PR	
67	Pekanbaru	12	Pekanbaru	PP	PP	PP	PP	*
68	Rokan Hilir	13	Kuala Gaung	PR	PR	PR	PR	*
69	Rokan Hilir	14	Bagan Siapi-api	PR	PR	PR	PR	*
70	Rokan Hilir	15	Panipahan	PR	PR	PR	PR	*
71	Rokan Hilir	16	Sinaboi	PL	PL	PL	PL	*
72	Siak	17	Perawang	PP	PP	PP	PP	
73	Siak	18	Tanjung Buton	PP	PP	PP	PP	

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
VI. Provinsi Bengkulu								
74	Bengkulu Utara	1	Malakoni/P. Enggano	PR	PR	PR	PR	*
75	Kaur	2	Bintuhan/Linau	PR	PP	PP	PP	*
76	Bengkulu	3	Pulau Baai	PP	PU	PU	PU	*
VII. Provinsi Jambi								
77	Muaro Jambi	1	Talang Duku	PP	PP	PP	PP	*
78	Tg. Jabung Barat	2	Kuala Tungkal	PP	PP	PP	PP	*
79	Tg. Jabung Timur	3	Kuala Mendahara	PR	PR	PR	PR	*
80	Tg. Jabung Timur	4	Muara Sabak	PP	PP	PP	PP	*
81	Tg. Jabung Timur	5	Nipah Panjang	PR	PR	PR	PR	*
82	Tg. Jabung Timur	6	Ujung Jabung	PP	PP	PP	PP	
VIII. Provinsi Sumatera Selatan								
83	Banyuasin	1	Tanjung Api-Api	PP	PP	PP	PP	
84	Ogan Komering Ilir	2	Sungai Lumpur	PP	PP	PP	PP	*
85	Palembang	3	Boom Baru/Palembang	PU	PU	PU	PU	*
86	Palembang	4	Kertapati	PP	PP	PP	PP	
IX. Provinsi Bangka Belitung								
87	Bangka	1	Belinyu	PP	PP	PP	PP	
88	Bangka Barat	2	Muntok	PP	PP	PP	PP	*
89	Bangka Seiatan	3	Toboali	PR	PR	PR	PR	*
90	Bangka Selatan	4	Sadai	PP	PP	PP	PP	
91	Belitung	5	Tanjung Pandan	PP	PP	PP	PP	*
92	Belitung Timur	6	Manggar	PL	PL	PL	PL	*
93	Pangkalpinang	7	Pangkal Balam	PP	PP	PP	PP	*
X. Provinsi Lampung								
94	Bandar Lampung	1	Panjang	PU	PU	PU	PU	*
95	Bandar Lampung	2	Teluk Betung	PR	PP	PP	PP	*
96	Lampung Selatan	3	Sebalang	PR	PP	PP	PP	
97	Lampung Timur	4	Labuhan Maringgai	PR	PR	PR	PR	*
98	Mesuji	5	Mesuji	PR	PR	PR	PR	*
99	Tanggamus	6	Kota Agung/Batu Balai	PP	PP	PP	PP	*
100	Tulang Bawang	7	Menggala	PL	PR	PR	PR	*
XI. Provinsi Banten								
101	Cilegon	1	Banten	PU	PU	PU	PU	*
102	Pandeglang	2	Labuhan	PR	PR	PR	PR	*
103	Serang	3	Anyer Lor	PR	PR	PR	PR	*
104	Serang	4	Bojonegara	PP	PP	PP	PP	*
105	Serang	5	Karangantu	PR	PR	PR	PR	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
XII. Provinsi Jawa Barat								
106	Cirebon	1	Cirebon	PP	PP	PP	PP	*
107	Indramayu	2	Indramayu/Losarang	PL	PL	PR	PR	*
108	Pangandaran	3	Pangandaran/Bojongsalawe	PL	PL	PL	PL	*
109	Subang	4	Pamanukan-Blanakan	PL	PL	PL	PL	*
110	Subang	5	Patimban	PU	PU	PU	PU	
111	Sukabumi	6	Palabuhan Ratu	PR	PR	PR	PR	*
XIII. Provinsi DKI Jakarta								
112	Jakarta Utara	1	Kalibaru	PR	PR	PR	PR	*
113	Jakarta Utara	2	Marunda	PP	PP	PP	PP	*
114	Jakarta Utara	3	Muara Angke	PR	PR	PR	PR	*
115	Jakarta Utara	4	Muara Baru	PP	PP	PP	PP	*
116	Jakarta Utara	5	Sunda Kelapa	PP	PP	PP	PP	*
117	Jakarta Utara	6	Tg. Priok	PU	PU	PU	PU	*
118	Kep. Seribu	7	Kep. Seribu (P. Pramuka)	PL	PL	PL	PL	*
XIV. Provinsi Jawa Tengah								
119	Batang	1	Batang	PR	PR	PP	PP	*
120	Brebes	2	Brebes	PR	PR	PR	PR	*
121	Cilacap	3	Tanjung Intan	PP	PP	PP	PP	*
122	Jepara	4	Jepara	PR	PR	PR	PR	*
123	Jepara	5	Karimun Jawa	PR	PR	PR	PR	*
124	Pati	6	Juwana	PR	PR	PR	PR	*
125	Pekalongan	7	Pekalongan	PR	PR	PR	PR	*
126	Rembang	8	Rembang/Tasik Agung	PR	PR	PR	PR	*
127	Rembang	9	Rembang/Sluke	PR	PR	PP	PP	
128	Semarang	10	Tanjung Emas	PU	PU	PU	PU	*
129	Tegal	11	Tegal	PP	PP	PP	PP	*
XV. Provinsi Jawa Timur								
130	Bangkalan	1	Telaga Biru	PR	PR	PR	PR	*
131	Banyu Wangi	2	Tanjung Wangi	PP	PP	PP	PP	*
132	Gresik	3	Bawean	PR	PR	PR	PR	*
133	Gresik	4	Gresik	PP	PP	PP	PP	*
134	Lamongan	5	Brondong	PR	PR	PR	PR	*
135	Lamongan	6	Tanjung Pakis	PR	PP	PP	PU	
136	Pamekasan	7	Branta	PR	PR	PR	PR	*
137	Pasuruan	8	Pasuruan	PR	PR	PR	PR	*
138	Probolinggo	9	Probolinggo	PR	PR	PP	PP	*
139	Sampang	10	Ketapang	PR	PR	PR	PR	*
140	Situbondo	11	Kalbut	PR	PR	PR	PR	*
141	Situbondo	12	Panarukan	PR	PR	PR	PR	*
142	Sumenep	13	Kalianget	PR	PR	PR	PR	*
143	Sumenep	14	Masalembo	PR	PR	PR	PR	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
144	Sumenep	15	Sapudi	PR	PR	PR	PR	*
145	Sumenep	16	Sapeken	PR	PR	PR	PR	*
146	Surabaya	17	Tanjung Perak	PU	PU	PU	PU	*
XVI. Provinsi Bali								
147	Buleleng	1	Buleleng (Sangsit)	PR	PR	PR	PR	*
148	Buleleng	2	Celukan Bawang	PP	PP	PP	PP	*
149	Denpasar	3	Benoa	PU	PU	PU	PU	*
150	Jembrana	4	Gilimanuk	PR	PR	PR	PR	*
151	Karangasem	5	Labuan Amuk/Tanahampo	PP	PP	PP	PP	
152	Karangasem	6	Padang Bai	PL	PL	PL	PL	*
153	Klungkung	7	Nusa Penida (Toyapakeh)	PR	PR	PR	PR	*
XVII. Provinsi Nusa Tenggara Barat								
154	Bima	1	Bima	PP	PP	PP	PP	*
155	Bima	2	Sape	PR	PR	PR	PR	*
156	Dompu	3	Calabai	PL	PL	PR	PR	*
157	Lombok Barat	4	Lembar	PP	PP	PP	PP	*
158	Lombok Timur	5	Labuhan Lombok	PP	PP	PP	PP	*
159	Lombok Utara	6	Pemenang	PR	PR	PR	PR	*
160	Sumbawa	7	Badas	PP	PP	PP	PP	*
161	Sumbawa Barat	8	Benete	PP	PP	PP	PP	*
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur								
162	Alor	1	Baranusa	PR	PR	PR	PR	*
163	Alor	2	Kalabahi	PR	PR	PR	PR	*
164	Belu	3	Atapupu	PP	PP	PP	PP	*
165	Ende	4	Ende	PP	PP	PP	PP	*
166	Flores Timur	5	Larantuka	PP	PP	PP	PP	*
167	Kupang	6	Tenau/ Kupang	PU	PU	PU	PU	*
168	Lembata	7	Balauring	PP	PP	PP	PP	
169	Lembata	8	Lewoleba	PP	PP	PP	PP	
170	Manggarai	9	Reo	PP	PP	PP	PP	*
171	Manggarai Barat	10	Labuan Bajo	PP	PP	PP	PP	*
172	Nagekeo	11	Marapokot	PR	PR	PR	PR	*
173	Rote Ndao	12	Baa	PL	PL	PL	PL	*
174	Rote Ndao	13	Ndao	PP	PP	PP	PP	
175	Sabu Raijua	14	Seba	PP	PP	PP	PP	*
176	Sikka	15	Maumere / Lorens Say	PR	PP	PP	PP	*
177	Sumba Barat Daya	16	Waikelo	PR	PR	PR	PR	*
178	Sumba Timur	17	Waingapu	PP	PP	PP	PP	*
179	Timor Tengah Utara	18	Wini	PP	PP	PP	PP	
XIX. Provinsi Kalimantan Barat								
180	Kayong Utara	1	Teluk Melano/Teluk Batang	PP	PP	PP	PP	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
181	Ketapang	2	Kendawangan	PP	PP	PP	PP	*
182	Ketapang	3	Ketapang	PP	PP	PP	PP	*
183	Kubu Raya	4	Teluk Air / Padang Tikar	PR	PR	PR	PR	*
184	Pontianak	5	Pontianak	PU	PU	PU	PU	*
185	Sambas	6	Sintete	PP	PP	PP	PP	*
186	Sambas	7	Paloh/Sakura	PP	PP	PP	PP	*
XX. Provinsi Kalimantan Tengah								
187	Barito Selatan	1	Rangga Ilung	PL	PL	PR	PR	*
188	Kapuas	2	Batanjung	PR	PR	PR	PR	
189	Katingan	3	Pegatan Mendawai	PR	PR	PR	PR	*
190	Kotawaringin Barat	4	Kumai	PP	PP	PP	PP	*
191	Kotawaringin Barat	5	Pangkalan Bun	PR	PR	PR	PR	*
192	Kotawaringin Timur	6	Sampit	PP	PP	PP	PP	*
193	Kotawaringin Timur	7	Samuda	PL	PL	PL	PL	*
194	Pulang Pisau	8	Pulang Pisau	PP	PP	PP	PP	*
195	Seruyan	9	Kuala Pembuang	PR	PR	PR	PR	*
196	Seruyan	10	Teluk Sigintung/Seruyan	PP	PP	PP	PP	
197	Sukamara	11	Sukamara	PP	PP	PP	PP	*
XXI. Provinsi Kalimantan Utara								
198	Bulungan	1	Bunyu	PP	PP	PP	PP	*
199	Bulungan	2	Tanjung Selor Kayu / Kayan I	PR	PR	PR	PR	*
200	Nunukan	3	Sungai Nyamuk/Sebatik	PP	PP	PP	PP	*
201	Nunukan	4	Nunukan/Tunon Taka	PP	PP	PP	PP	*
202	Tarakan	5	Tarakan/Malundung	PU	PU	PU	PU	*
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan								
203	Banjarmasin	1	Banjarmasin	PU	PU	PU	PU	*
204	Kotabaru	2	Kota Baru	PP	PP	PP	PP	*
205	Kotabaru	3	Mekar Putih	PP	PP	PP	PP	
206	Kotabaru	4	Sebuku	PL	PL	PL	PL	*
207	Kotabaru	5	Stagen	PP	PP	PP	PP	
208	Kotabaru	6	Tanjung Batu	PR	PR	PR	PR	*
209	Tanah Bumbu	7	Satui/Sel Danau	PL	PL	PL	PL	*
210	Tanah Bumbu	8	Simp. Empat Batu Licin	PP	PP	PP	PP	
211	Tanah Laut	9	Kintap	PP	PP	PP	PP	*
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
212	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU	*
213	Berau	2	Tanjung Redeb	PP	PP	PP	PP	*
214	Bontang	3	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP	*
215	Bontang	4	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP	*
216	Kutai Kertanegara	5	Kuala Semboja/Sebulu	PP	PP	PP	PP	*
217	Kutai Kertanegara	6	Tanjung Santan	PR	PR	PR	PR	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
218	Kutai Timur	7	Maloy	PP	PP	PP	PP	
219	Kutai Timur	8	Sangatta	PP	PP	PP	PP	*
220	Kutai Timur	9	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR	*
221	Paser	10	Tanah Paser/Pondong	PP	PP	PP	PP	*
222	Penajam Paser Utara	11	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP	*
223	Samarinda	12	Samarinda	PP	PP	PP	PP	*
XXIV. Provinsi Sulawesi Utara								
224	B. Mangondow	1	Labuhan Uki	PP	PP	PP	PP	*
225	B. Mangondow Timur	2	Kotabunan	PL	PL	PL	PL	*
226	Bitung	3	Bitung	PU	PU	PU	PU	*
227	Kep. Sangihe	4	Petta	PP	PP	PP	PP	
228	Kep. Sangihe	5	Tahuna	PP	PP	PP	PP	*
229	Kep. Sitaro	6	Ulu Siau	PL	PL	PL	PL	*
230	Kep. Talaud	7	Karatung	PP	PP	PP	PP	
231	Kep. Talaud	8	Lirung	PR	PR	PR	PR	*
232	Kep. Talaud	9	Miangas	PP	PP	PP	PP	
233	Manado	10	Manado	PP	PP	PP	PP	*
234	Minahasa Selatan	11	Amurang	PL	PR	PR	PR	*
235	Minahasa Utara	12	Likupang	PL	PL	PL	PL	*
XXV. Provinsi Gorontalo								
236	Boalemo	1	Tilamuta	PR	PR	PR	PR	*
237	Gorontalo	2	Gorontalo	PP	PP	PP	PP	*
238	Gorontalo Utara	3	Anggrek	PP	PP	PP	PP	*
239	Gorontalo Utara	4	Kwandang	PR	PR	PR	PR	*
240	Pohuwato	5	Bumbulan	PR	PR	PR	PR	
XXVI. Provinsi Sulawesi Barat								
241	Majene	1	Majene	PR	PP	PP	PP	*
242	Mamuju	2	Belang-Belang	PP	PP	PP	PP	*
243	Mamuju	3	Mamuju	PP	PP	PP	PP	*
244	Polewali Mandar	4	Tanjung Silopo/Polewali	PR	PP	PP	PP	*
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah								
245	Banggai	1	Bunta	PR	PR	PR	PR	*
246	Banggai	2	Pagimana	PP	PP	PP	PP	*
247	Banggai	3	Luwuk	PP	PP	PP	PP	*
248	Banggai	4	Tangkang	PP	PP	PP	PP	
249	Banggai Kepulauan	5	Banggai	PP	PP	PP	PP	*
250	Buol	6	Leok	PR	PR	PR	PR	*
251	Donggala	7	Donggala	PP	PP	PP	PP	*
252	Donggala	8	Ogoamas	PR	PR	PR	PR	*
253	Donggala	9	Wani	PP	PP	PP	PP	*
254	Morowali	10	Kolonodale	PP	PP	PP	PP	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
255	Palu	11	Pantoloan	PU	PU	PU	PU	*
256	Parigi Moutong	12	Parigi	PR	PR	PR	PR	*
257	Poso	13	Poso	PP	PP	PP	PP	*
258	Tojo Una-Una	14	Ampana	PL	PL	PL	PL	*
259	Tojo Una-Una	15	Mantangisi	PL	PL	PR	PR	
260	Toli-Toli	16	Toli-toli	PP	PP	PP	PP	*
XXVIII. Provinsi Sulawesi Tenggara								
261	Bau-Bau	1	Bau-Bau/Murhum	PP	PP	PP	PP	*
262	Kendari	2	Kendari/Bungkutoko	PP	PP	PP	PP	*
263	Kolaka	3	Kolaka	PP	PP	PP	PP	*
264	Kolaka	4	Pomalaa	PR	PR	PP	PP	*
265	Konawe Kepulauan	5	Langara	PL	PL	PL	PL	*
266	Muna	6	Raha	PP	PP	PP	PP	*
267	Wakatobi	7	Wanci	PP	PP	PP	PP	
XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan								
268	Bantaeng	1	Bantaeng/ Bonthain	PP	PP	PP	PP	
269	Barru	2	Garongkong	PP	PP	PP	PP	*
270	Bone	3	Bajoe	PP	PP	PP	PP	*
271	Bone	4	Pattirobajo	PR	PR	PR	PR	*
272	Bulukumba	5	Bulukumba/Lappe'e	PP	PP	PP	PP	*
273	Bulukumba	6	Maccini Baji	PP	PP	PP	PP	
274	Jeneponto	7	Jeneponto/Bunging	PR	PR	PR	PR	*
275	Luwu Timur	8	Mallii (Sungai)	PP	PP	PP	PP	*
276	Makasar	9	Makasar/Makasar New Port	PU	PU	PU	PU	*
277	Makasar	10	Paotere	PR	PR	PR	PR	
278	Palopo	11	Palopo/Tg. Ringgit	PP	PP	PP	PP	*
279	Pangkajene Kepulauan	12	Biringkasi	PR	PR	PR	PR	*
280	Pare-pare	13	Capa Ujung / Pare-pare	PP	PP	PP	PP	*
281	Pare-pare	14	Pare-Pare/Nusantara	PP	PP	PP	PP	
282	Pinrang	15	Marabombang	PL	PR	PR	PR	
283	Selayar	16	P. Jampea (Banteng)	PR	PR	PR	PR	*
284	Selayar	17	Selayar/Benteng/Rauf Rahman	PP	PP	PP	PP	*
285	Selayar	18	Galesong/Takalar	PP	PP	PP	PP	
286	Sinjai	19	Sinjai/Larea-rea	PP	PP	PP	PP	*
287	Wajo	20	Siwa/Bangsala'e	PR	PR	PP	PP	*
XXX. Provinsi Maluku Utara								
288	Halmahera Barat	1	Jailolo	PR	PR	PR	PR	*
289	Halmahera Selatan	2	Babang	PP	PP	PP	PP	*
290	Halmahera Selatan	3	Laiwui	PR	PP	PP	PP	*
291	Halmahera Selatan	4	Mafa	PR	PP	PP	PP	
292	Halmahera Tengah	5	Weda	PR	PR	PR	PR	*
293	Halmahera Timur	6	Buli	PR	PR	PR	PR	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
294	Halmahera Utara	7	Tobelo	PP	PP	PP	PP	*
295	Kepulauan Sula	8	Falabisahaya	PR	PP	PP	PP	
296	Kepulauan Sula	9	Sanana	PR	PR	PR	PR	*
297	Morotai	10	Daruba	PR	PR	PR	PR	*
298	Pulau Morotai	11	Wayabula	PP	PP	PP	PP	
299	Ternate	12	Ternate/A.Yani	PU	PU	PU	PU	*
300	Tidore Kepulauan	13	Mangole	PR	PP	PP	PP	
301	Tidore Kepulauan	14	Soasio/Goto	PR	PR	PR	PR	*
302	Tidore Kepulauan	15	Sofifi	PP	PP	PP	PP	
XXXI. Provinsi Maluku								
303	Ambon	1	Ambon	PU	PU	PU	PU	*
304	Buru	2	Namlea	PP	PP	PP	PP	*
305	Buru Selatan	3	Leksula	PR	PR	PR	PR	*
306	Kepulauan Aru	4	Dobo	PP	PP	PP	PP	*
307	Maluku Barat Daya	5	Wonreli	PR	PR	PR	PR	*
308	Maluku Tengah	6	Amahai	PP	PP	PP	PP	*
309	Maluku Tengah	7	Tulehu	PP	PP	PP	PP	*
310	Maluku Tengah	8	Banda Naira	PR	PR	PR	PR	*
311	Maluku Tengah	9	Wahai	PR	PR	PR	PR	*
312	Maluku Tenggara Barat	10	Saumlaki	PP	PP	PP	PP	*
313	Seram Bagian Barat	11	Waisarisa	PL	PL	PL	PL	*
314	Seram Bagian Timur	12	Bula	PP	PP	PP	PP	
315	Seram Bagian Timur	13	Geser	PL	PL	PL	PL	*
316	Tual	14	Tual	PP	PP	PP	PP	*
XXXII. Provinsi Papua Barat								
317	Fak-fak	1	Fak-fak	PP	PP	PP	PP	*
318	Fak-fak	2	Kokas	PL	PR	PR	PR	*
319	Kab. Sorong	3	Arar	PP	PP	PP	PP	
320	Kaimana	4	Kaimana	PP	PP	PP	PP	*
321	Manokwari	5	Manokwari	PP	PP	PP	PP	*
322	Manokwari Selatan	6	Oransbari	PL	PR	PR	PR	*
323	Raja Ampat	7	Saonek	PL	PR	PR	PR	*
324	Sorong	8	Sorong	PU	PU	PU	PU	*
325	Sorong Selatan	9	Teminabuan	PP	PP	PP	PP	*
326	Teluk Bintuni	10	Bintuni	PP	PP	PP	PP	*
327	Teluk Wondama	11	Wasior	PP	PP	PP	PP	*
XXXIII. Provinsi Papua								
328	Asmat	1	Agats	PP	PP	PP	PP	*
329	Biak Numfor	2	Biak	PP	PP	PP	PP	*
330	Jayapura	3	Depapre	PP	PP	PU	PU	
331	Jayapura	4	Jayapura	PU	PU	PU	PU	*
332	Mappi	5	Bade	PP	PP	PP	PP	*

No.	PENETAPAN LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
333	Merauke	6	Merauke	PU	PU	PU	PU	*
334	Mimika	7	Amamapare	PP	PP	PP	PP	*
335	Mimika	8	Pomako	PP	PP	PP	PP	*
336	Nabire	9	Nabire	PP	PP	PP	PP	*
337	Sarmi	10	Sarmi	PP	PP	PP	PP	*
338	Supiori	11	Korido	PR	PR	PR	PR	*
339	Waropen	12	Waren	PR	PP	PP	PP	*
340	Yapen	13	Serui	PP	PP	PP	PP	*

**SUB LAMPIRAN A2
LOKASI WILAYAH KERJA PELABUHAN**

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
I. Provinsi Aceh								
1	Aceh Selatan	1	Sibadeh	PL	PL	PL	PL	
2	Aceh Singkil	2	P. Banyak	PL	PL	PL	PL	
3	Aceh Singkil	3	P. Sarok	PL	PL	PL	PL	
4	Pidie	4	Sigli	PL	PL	PL	PL	
5	Simeulue	5	Sibigo	PL	PL	PL	PL	
II. Provinsi Sumatera Utara								
6	Labuhan Batu	1	Labuhan Bilik	PL	PL	PL	PL	
7	Mandailing Natal	2	Parlimbungan Ketek	PL	PL	PL	PL	
8	Nias Barat	3	Hinako	PL	PL	PL	PL	
9	Nias Selatan	4	Sigolo-golo	PL	PL	PL	PL	
10	Tapanuli Tengah	5	Oswald Siahaan/Labuhan Angin	PR	PR	PR	PR	
III. Provinsi Sumatera Barat								
11	Kep. Mentawai	1	Bakai	PL	PL	PL	PL	
12	Kep. Mentawai	2	Pasapat	PL	PL	PL	PL	
13	Kep. Mentawai	3	Sikabalu / Pokai	PL	PL	PL	PL	
14	Kep. Mentawai	4	Tua Pejat	PR	PR	PR	PR	
15	Padang	5	Muara Padang	PL	PL	PL	PL	
16	Padang	6	Tiku	PL	PL	PL	PL	
17	Pasaman Barat	7	Air Bangis	PL	PL	PL	PL	
IV. Provinsi Kepulauan Riau								
18	Bintan	1	Tambelan	PL	PL	PL	PL	
19	Karimun	2	Tanjung Tiram	PR	PR	PR	PR	
20	Kep. Anambas	3	Letung	PL	PL	PL	PL	
21	Lingga	4	Kuala Raya	PL	PL	PL	PL	
22	Lingga	5	Penuba	PL	PL	PL	PL	
23	Lingga	6	Sei Buluh	PL	PL	PL	PL	
24	Natuna	7	Midai	PL	PL	PL	PL	
25	Natuna	8	Pulau Seluan	PL	PL	PL	PL	
26	Natuna	9	Ranai	PR	PR	PR	PR	
27	Natuna	10	Sedanau	PL	PL	PL	PL	
28	Natuna	11	Serasan	PR	PR	PR	PR	
29	Natuna	12	Subi	PR	PR	PR	PR	
30	Tanjung Pinang	13	Dompok	PR	PR	PR	PR	
31	Tanjung Pinang	14	Tanjung Moch	PR	PR	PR	PR	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
V. Provinsi Riau								
32	Bengkalis	1	Bandul	PL	PL	PL	PL	
33	Indragiri Hilir	2	Kuala Mandah	PL	PL	PL	PL	
34	Indragiri Hilir	3	Pulau Kijang	PL	PL	PL	PL	
35	Kep.Meranti	4	Tanjung Samak	PL	PL	PL	PL	
36	Rokan Hilir	5	Batu Enam	PL	PL	PL	PL	
37	Siak	6	Siak Sri Indrapura	PL	PL	PL	PL	
VI. Provinsi Bengkulu								
38	Muko - Muko	1	Muko-Muko	PL	PR	PR	PR	
VII. Provinsi Jambi								
39	Tg. Jabung Timur	1	Simbur Naik	PL	PL	PL	PL	
40	Tg. Jabung Timur	2	Sungai Jambat	PL	PL	PL	PL	
41	Tg. Jabung Timur	3	Sungai Lokan	PL	PL	PL	PL	
VIII. Provinsi Sumatera Selatan								
IX. Provinsi Bangka Belitung								
42	Belitung	1	Tanjung Batu	PL	PL	PL	PL	
X. Provinsi Lampung								
43	Lampung Selatan	1	Lagundi	PL	PL	PL	PL	
44	Lampung Selatan	2	Kalianda	PL	PL	PL	PL	
45	Lampung Selatan	3	P. Sebesi	PL	PL	PL	PL	
46	Lampung Tengah	4	Way Seputih	PL	PL	PL	PL	
47	Lampung Timur	5	Kuala Penat	PL	PL	PL	PL	
48	Lampung Timur	6	Way Sekampung	PL	PL	PL	PL	
49	Pesisir Barat	7	Krui	PL	PL	PL	PL	
50	Tanggamus	8	P. Tabuan	PL	PL	PL	PL	
51	Tulang Bawang	9	Teladas	PL	PL	PL	PL	
52	Tulang Bawang	10	Sungai Burung	PL	PL	PL	PL	
XI. Provinsi Banten								
53	Tangerang	1	Cituis	PL	PL	PL	PL	
54	Tangerang	2	Kresiek/Kronjo	PL	PL	PL	PL	
XII. Provinsi Jawa Barat								
55	Bekasi	1	Muara Gembong	PL	PL	PL	PL	
56	Cirebon	2	Muara Gebang	PL	PL	PL	PL	
XIII. Provinsi DKI Jakarta								
XIV. Provinsi Jawa Tengah								
57	Jepara	1	Legok Bajak	PL	PL	PL	PL	
58	Kendal	2	Kendal	PR	PR	PR	PR	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
59	Pekalongan	3	Wiradesa	PL	PL	PL	PL	
60	Pemalang	4	Pemalang	PL	PL	PL	PL	
XV. Provinsi Jawa Timur								
61	Banyu Wangi	1	Banyu Wangi/ Boom	PL	PL	PL	PL	
62	Pacitan	2	Pacitan	PL	PL	PL	PL	
63	Pamekasan	3	Pasean	PL	PL	PL	PL	
64	Probolinggo	4	Giliketapang	PL	PL	PL	PL	
65	Sampang	5	Glimandangin	PL	PL	PL	PL	
66	Sampang	6	Sampang	PR	PR	PR	PR	
67	Sumenep	7	Gayam	PL	PL	PL	PL	
68	Sumenep	8	Kangean	PR	PR	PR	PR	
69	Sumenep	9	Keramaian	PL	PL	PL	PL	
70	Sumenep	10	P. Raas	PL	PL	PL	PL	
XVI. Provinsi Bali								
71	Buleleng	1	Labuhan Lalang	PL	PL	PL	PL	
72	Buleleng	2	Lovina	PL	PL	PL	PL	
73	Klungkung	3	Nusa Lembongan	PL	PL	PL	PL	
XVII. Provinsi Nusa Tenggara Barat								
74	Bima	1	Sape	PR	PR	PR	PR	
75	Bima	2	Waworada	PR	PR	PR	PR	
76	Dompu	3	Kempo	PL	PL	PL	PL	
77	Lombok Barat	4	Ampenan	PL	PL	PL	PL	
78	Lombok Timur	5	Labuhan Haji	PL	PL	PL	PL	
79	Lombok Utara	6	Carik	PR	PR	PR	PR	
80	Sumbawa	7	Alas	PL	PL	PL	PL	
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur								
81	Alor	1	Dulionong	PL	PL	PL	PL	
82	Alor	2	Kabir	PL	PL	PL	PL	
83	Alor	3	Maritaing	PL	PL	PL	PL	
84	Alor	4	Moru	PL	PL	PL	PL	
85	Ende	5	Ippi	PL	PL	PL	PL	
86	Ende	6	Maurole	PL	PL	PL	PL	
87	Flores Timur	7	Lamakera	PL	PL	PL	PL	
88	Flores Timur	8	Lato	PL	PL	PL	PL	
89	Flores Timur	9	Menanga	PL	PL	PL	PL	
90	Flores Timur	10	Pamakayo	PL	PL	PL	PL	
91	Flores Timur	11	Tabilota	PL	PL	PL	PL	
92	Flores Timur	12	Terong	PL	PL	PL	PL	
93	Flores Timur	13	Waiwadan	PL	PL	PL	PL	
94	Flores Timur	14	Waiwerang	PL	PL	PL	PL	
95	Flores Timur	15	Waiwuring	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
137	Palangkaraya	4	Kereng Bengkirai	PL	PL	PL	PL	
138	Sukamara	5	Kuala Jelay	PL	PL	PL	PL	
XXI. Provinsi Kalimantan Utara								
139	Nunukan	1	Simenggaris	PL	PL	PL	PL	
140	Tana Tidung	2	Sesayap	PL	PL	PL	PL	
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan								
141	Kotabaru	1	Marabatuan	PL	PL	PL	PL	
142	Kotabaru	2	Matasiri	PL	PL	PL	PL	
143	Kotabaru	3	Serongga/Tanjung Batu	PR	PR	PR	PR	
144	Tanah Laut	4	Pelaihari/Swarangan	PL	PL	PL	PL	
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
145	Berau	1	Mataritip	PL	PL	PL	PL	
146	Berau	2	Tanjung Batu	PL	PL	PL	PL	
147	Paser	3	Teluk Adang	PL	PL	PL	PL	
XXIV. Provinsi Sulawesi Utara								
148	B. Mangondow Selatan	1	Torosik	PR	PR	PR	PR	
149	B. Mangondow Utara	2	Tg. Sidupa	PL	PL	PL	PL	
150	Kep. Sangihe	3	Bukide	PL	PL	PL	PL	
151	Kep. Sangihe	4	Kahakitang	PL	PL	PL	PL	
152	Kep. Sangihe	5	Kalama	PL	PL	PL	PL	
153	Kep. Sangihe	6	Kawaluso	PL	PL	PL	PL	
154	Kep. Sangihe	7	Kawio	PR	PR	PR	PR	
155	Kep. Sangihe	8	Lipang	PL	PL	PL	PL	
156	Kep. Sangihe	9	Makalehi	PR	PR	PR	PR	
157	Kep. Sangihe	10	Marore	PR	PR	PR	PR	
158	Kep. Sangihe	11	Matutuang	PL	PL	PL	PL	
159	Kep. Sangihe	12	Ngalipaeng	PL	PL	PL	PL	
160	Kep. Sangihe	13	Para	PL	PL	PL	PL	
161	Kep. Sangihe	14	Tamako	PL	PL	PL	PL	
162	Kep. Sitaro	15	Biaro	PL	PL	PL	PL	
163	Kep. Sitaro	16	Buhias	PL	PL	PL	PL	
164	Kep. Sitaro	17	Pehe	PL	PR	PR	PR	
165	Kep. Sitaro	18	Sawang	PL	PL	PL	PL	
166	Kep. Sitaro	19	Tagulandang	PR	PR	PR	PR	
167	Kep. Talaud	20	Beo	PL	PL	PL	PL	
168	Kep. Talaud	21	Dapalan	PL	PL	PL	PL	
169	Kep. Talaud	22	Essang	PL	PL	PL	PL	
170	Kep. Talaud	23	Kakorotan	PR	PR	PR	PR	
171	Kep. Talaud	24	Mangarang	PL	PL	PL	PL	
172	Kep. Talaud	25	Marampit	PL	PR	PR	PR	
173	Kep. Talaud	26	Melangoane	PL	PR	PR	PR	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
174	Kep. Talaud	27	Rainis	PL	PL	PL	PL	
175	Minahasa Tenggara	28	Belang	PR	PR	PR	PR	
176	Minahasa Utara	29	Kema	PL	PL	PL	PL	
177	Minahasa Utara	30	Munte/Likupang Barat	PR	PR	PR	PR	
XXV. Provinsi Gorontalo								
XXVI. Provinsi Sulawesi Barat								
178	Mamuju	1	Ambo	PL	PL	PL	PL	
179	Mamuju	2	Budong-Budong	PL	PL	PL	PL	
180	Mamuju	3	Popongan	PL	PL	PL	PL	
181	Mamuju	4	Salisingan	PR	PR	PR	PR	
182	Mamuju	5	Tujuh-tujuh	PL	PL	PL	PL	
183	Mamuju Utara	6	Pasang Kayu	PR	PR	PR	PR	
184	Polewali Mandar	7	Campalagian	PL	PL	PL	PL	
185	Polewali Mandar	8	Tinambung	PL	PL	PL	PL	
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah								
186	Banggai Kepulauan	1	Salakan	PR	PR	PR	PR	
187	Morowali	2	Bungku	PR	PR	PR	PR	
188	Morowali	3	Wosu	PL	PL	PL	PL	
189	Morowali Utara	4	Baturube	PL	PL	PL	PL	
190	Morowali Utara	5	Manui	PR	PR	PR	PR	
191	Parigi Moutong	6	Moutong	PR	PR	PR	PR	
192	Parigi Moutong	7	Tinombo	PL	PL	PL	PL	
193	Poso	8	Tojo	PL	PL	PL	PL	
194	Tojo Una-Una	9	Dolong	PL	PL	PL	PL	
195	Tojo Una-Una	10	Matenge	PL	PL	PL	PL	
196	Tojo Una-Una	11	Pasokan	PL	PL	PL	PL	
197	Tojo Una-Una	12	Popolii	PL	PL	PL	PL	
198	Tojo Una-Una	13	Una-Una	PL	PL	PL	PL	
199	Tojo Una-Una	14	Wakai	PR	PR	PR	PR	
200	Toli-Toli	15	Malala	PL	PL	PL	PL	
XXVIII. Provinsi Sulawesi Tenggara								
201	Bau-Bau	1	Binongko	PL	PL	PL	PL	
202	Bau-Bau	2	Tomia	PL	PL	PL	PL	
203	Bombana	3	Boepinang	PL	PL	PL	PL	
204	Bombana	4	Kasipute	PL	PL	PL	PL	
205	Bombana	5	Sikeli	PL	PR	PR	PR	
206	Buton	6	Banabungi Pasarwajo	PR	PR	PR	PR	
207	Buton	7	Lasalimu	PL	PL	PL	PL	
208	Buton	8	Lawele	PL	PL	PL	PL	
209	Buton Selatan	9	Batu Atas	PL	PL	PL	PL	
210	Buton Selatan	10	Kadatua	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
211	Buton Selatan	11	Siempu	PL	PL	PL	PL	
212	Buton Tengah	12	Liana Banggai	PL	PL	PL	PL	
213	Buton Tengah	13	Talaga Raya	PL	PL	PL	PL	
214	Buton Tengah	14	Wamengkoli	PL	PL	PL	PL	
215	Buton Utara	15	Buranga	PL	PL	PL	PL	
216	Buton Utara	16	Ereke	PR	PR	PR	PR	
217	Buton Utara	17	Labuhan Belanda	PL	PL	PL	PL	
218	Kolaka	18	Dawi-dawi	PL	PL	PL	PL	
219	Kolaka	19	Tanggetada/Toari	PL	PL	PL	PL	
220	Kolaka	20	Rante Angin	PL	PL	PL	PL	
221	Kolaka	21	Wollo	PL	PL	PL	PL	
222	Kolaka Utara	22	Lasusua	PL	PL	PL	PL	
223	Kolaka Utara	23	Watunohu	PL	PL	PL	PL	
224	Konawe Selatan	24	Lakara	PL	PL	PL	PL	
225	Konawe Selatan	25	Lapuko	PR	PR	PR	PR	
226	Konawe Utara	26	Lameluru	PL	PL	PL	PL	
227	Konawe Utara	27	Matarape	PL	PL	PL	PL	
228	Konawe Utara	28	Molawe	PL	PL	PL	PL	
229	Muna	29	Maligano	PL	PL	PL	PL	
230	Wakatobi	30	Kaledupa	PL	PL	PL	PL	
XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan								
231	Barru	1	Barebbo/Kading	PL	PL	PL	PL	
232	Barru	2	Uloe	PL	PL	PL	PL	
233	Bone	3	P. Balang Lompo	PL	PL	PL	PL	
234	Bone	4	P. Kalukalukuang	PL	PL	PL	PL	
235	Bone	5	P. Matalaang	PL	PL	PL	PL	
236	Bone	6	P. Sabutung	PL	PL	PL	PL	
237	Luwu Timur	7	Awarange/ Barru	PR	PR	PR	PR	
238	Luwu Utara	8	P. Bonerate	PL	PL	PL	PL	
239	Pangkajene Kepulauan	9	Kalatoa	PL	PL	PL	PL	
240	Pangkajene Kepulauan	10	Kayuadi	PL	PL	PL	PL	
241	Pangkajene Kepulauan	11	P. Jinato	PL	PL	PL	PL	
242	Pangkajene Kepulauan	12	P. Sailus	PL	PL	PL	PL	
243	Pangkajene Kepulauan	13	P. Sapuka	PL	PL	PL	PL	
244	Selayar	14	Munte	PL	PL	PL	PL	
245	Selayar	15	P. Jampea (Ujung Toa)	PL	PL	PL	PL	
246	Selayar	16	Pamatata	PL	PL	PL	PL	
247	Selayar	17	Ulo-Ulo/Belopa	PL	PL	PL	PL	
248	Sinjai	18	Cappa Ujung Sinjai	PL	PL	PL	PL	
249	Sinjai	19	Tuju-Tuju	PL	PL	PL	PL	
250	Pangkajene Kepulauan	20	Balang Lompo	PL	PL	PL	PL	
XXX. Provinsi Maluku Utara								
251	Halmahera Barat	1	Bataka	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
252	Halmahera Barat	2	Kedi/Loloda	PL	PL	PL	PL	
253	Halmahera Barat	3	Matui	PR	PR	PR	PR	
254	Halmahera Selatan	4	Bisui	PL	PL	PL	PL	
255	Halmahera Selatan	5	Busua	PL	PL	PL	PL	
256	Halmahera Selatan	6	Guruapin	PL	PL	PL	PL	
257	Halmahera Selatan	7	Manu/Gamunu	PL	PL	PL	PL	
258	Halmahera Selatan	8	Pulau Kayoa	PL	PL	PL	PL	
259	Halmahera Selatan	9	Indari	PL	PL	PL	PL	
260	Halmahera Selatan	10	Koititi	PL	PL	PL	PL	
261	Halmahera Selatan	11	Labuha	PL	PL	PL	PL	
262	Halmahera Selatan	12	Loleo Jaya	PL	PL	PL	PL	
263	Halmahera Selatan	13	Madopolo/Jojame	PL	PL	PL	PL	
264	Halmahera Selatan	14	Makian	PL	PL	PL	PL	
265	Halmahera Selatan	15	Palamea	PL	PL	PL	PL	
266	Halmahera Selatan	16	Pasipalele	PL	PL	PL	PL	
267	Halmahera Selatan	17	Pelita	PL	PL	PL	PL	
268	Halmahera Selatan	18	Pigaraaja	PL	PL	PL	PL	
269	Halmahera Selatan	19	Saketa	PL	PL	PL	PL	
270	Halmahera Selatan	20	Wayaloar	PR	PR	PR	PR	
271	Halmahera Selatan	21	Wayauwa	PL	PL	PL	PL	
272	Halmahera Selatan	22	Wosi	PL	PL	PL	PL	
273	Halmahera Selatan	23	Yaba	PL	PL	PL	PL	
274	Halmahera Tengah	24	Banemo	PL	PL	PL	PL	
275	Halmahera Tengah	25	Paniti	PL	PL	PL	PL	
276	Halmahera Tengah	26	P. Gebe	PL	PL	PL	PL	
277	Halmahera Tengah	27	Patani	PL	PL	PL	PL	
278	Halmahera Tengah	28	Sagea	PL	PL	PL	PL	
279	Halmahera Tengah	29	Sepo	PL	PL	PL	PL	
280	Halmahera Tengah	30	Tapaleo/Gemia	PL	PL	PL	PL	
281	Halmahera Timur	31	Bicoli	PR	PR	PR	PR	
282	Halmahera Timur	32	Dorosagu	PL	PL	PL	PL	
283	Halmahera Timur	33	Manitingting	PR	PR	PR	PR	
284	Halmahera Timur	34	Subaim/Wasile	PL	PL	PL	PL	
285	Halmahera Utara	35	Dama	PL	PL	PL	PL	
286	Halmahera Utara	36	Dedeta	PL	PL	PL	PL	
287	Halmahera Utara	37	Dorume	PL	PL	PL	PL	
288	Halmahera Utara	38	Galela	PL	PR	PR	PR	
289	Halmahera Utara	39	Kao	PL	PL	PL	PL	
290	Kepulauan Sula	40	Dofa	PL	PL	PL	PL	
291	Kepulauan Sula	41	Maitina / Mangole	PL	PL	PL	PL	
292	Kepulauan Sula	42	Malbufa	PL	PL	PL	PL	
293	Pulau Morotai	43	Bere - Bere	PL	PL	PL	PL	
294	Pulau Morotai	44	Posi-Posi	PL	PL	PL	PL	
295	Pulau Morotai	45	Sopi	PL	PL	PL	PL	
296	Pulau Taliabu	46	Bobong	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
297	Pulau Taliabu	47	Loseng	PL	PL	PL	PL	
298	Pulau Taliabu	48	Tikong	PR	PR	PR	PR	
299	Ternate	49	Armada Semut Mangga Dua	PL	PL	PL	PL	
300	Ternate	50	Moti	PL	PL	PL	PL	
301	Ternate	51	Tifure	PL	PL	PL	PL	
302	Tidore Kepulauan	52	Gita/Payahe	PL	PL	PL	PL	
303	Tidore Kepulauan	53	Maidi/Lifofa	PL	PL	PL	PL	
304	Tidore Kepulauan	54	Rum	PL	PL	PL	PL	
XXXI. Provinsi Maluku								
305	Ambon	1	Batu Merah	PL	PL	PL	PL	
306	Ambon	2	Gudang Arang	PL	PL	PL	PL	
307	Buru	3	Air Buaya	PL	PL	PL	PL	
308	Buru Selatan	4	Fogi	PL	PL	PL	PL	
309	Buru Selatan	5	Namrole	PR	PR	PR	PR	
310	Buru Selatan	6	Tifu	PL	PL	PL	PL	
311	Kepulauan Aru	7	Batu Goyang/Kalar-Kalar	PL	PL	PL	PL	
312	Kepulauan Aru	8	Benjina	PL	PL	PL	PL	
313	Kepulauan Aru	9	Kobroor	PL	PL	PL	PL	
314	Kepulauan Aru	10	Marlasi	PL	PL	PL	PL	
315	Maluku Barat Daya	11	Dawelor	PL	PL	PL	PL	
316	Maluku Barat Daya	12	Damar	PL	PL	PL	PL	
317	Maluku Barat Daya	13	Eray	PL	PL	PL	PL	
318	Maluku Barat Daya	14	Hila/Romang	PL	PL	PL	PL	
319	Maluku Barat Daya	15	Ilwaki	PR	PR	PR	PR	
320	Maluku Barat Daya	16	Kaiwatu/Moa	PL	PL	PL	PL	
321	Maluku Barat Daya	17	Kroing	PL	PL	PL	PL	
322	Maluku Barat Daya	18	Lakor	PL	PL	PL	PL	
323	Maluku Barat Daya	19	Lerokis	PL	PL	PL	PL	
324	Maluku Barat Daya	20	Lirang	PL	PL	PL	PL	
325	Maluku Barat Daya	21	Lurang	PL	PL	PL	PL	
326	Maluku Barat Daya	22	Mahaleta	PL	PL	PL	PL	
327	Maluku Barat Daya	23	Marsela	PL	PL	PL	PL	
328	Maluku Barat Daya	24	Serwaru	PL	PL	PL	PL	
329	Maluku Barat Daya	25	Tepa	PR	PR	PR	PR	
330	Maluku Barat Daya	26	Upisera	PL	PL	PL	PL	
331	Maluku Barat Daya	27	Wulur	PL	PL	PL	PL	
332	Maluku Barat Daya	28	Wunlah	PL	PL	PL	PL	
333	Maluku Tengah	29	Banda Besar	PL	PL	PL	PL	
334	Maluku Tengah	30	Hitu	PL	PL	PL	PL	
335	Maluku Tengah	31	Kobisonta	PL	PL	PL	PL	
336	Maluku Tengah	32	Saparua/Haria	PL	PL	PL	PL	
337	Maluku Tengah	33	Tehoru	PL	PL	PL	PL	
338	Maluku Tengah	34	Tuhaha	PL	PL	PL	PL	
339	Maluku Tengah	35	Wolu	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
340	Maluku Tengah	36	Bula	PL	PL	PL	PL	
341	Maluku Tenggara	37	Elat	PL	PR	PR	PR	
342	Maluku Tenggara Barat	38	Adault	PL	PL	PL	PL	
343	Maluku Tenggara Barat	39	Larat	PL	PL	PL	PL	
344	Maluku Tenggara Barat	40	Seira	PL	PL	PL	PL	
345	Maluku Tenggara Barat	41	Tutu Kembong	PL	PL	PL	PL	
346	Seram Bagian Barat	42	Buano	PL	PL	PL	PL	
347	Seram Bagian Barat	43	Hatu Piru	PL	PL	PL	PL	
348	Seram Bagian Barat	44	Kairatu	PL	PL	PL	PL	
349	Seram Bagian Barat	45	Manipa	PL	PL	PL	PL	
350	Seram Bagian Barat	46	Taniwel	PL	PL	PL	PL	
351	Seram Bagian Timur	47	Bemo	PL	PL	PL	PL	
352	Seram Bagian Timur	48	Gorom/Ondor	PL	PL	PL	PL	
353	Seram Bagian Timur	49	Kataloka/Ondor	PL	PL	PL	PL	
354	Seram Bagian Timur	50	Kesui	PL	PL	PL	PL	
355	Seram Bagian Timur	51	Pulau Tior	PL	PL	PL	PL	
356	Tual	52	Kur	PL	PL	PL	PL	
357	Tual	53	Toyando	PL	PL	PL	PL	
XXXII. Provinsi Papua Barat								
358	Kab. Sorong	1	Seget	PL	PL	PL	PL	
359	Manokwari	2	Mansinam	PL	PL	PL	PL	
360	Manokwari	3	Saukorem	PL	PL	PL	PL	
361	Manokwari Selatan	4	Ransiki	PL	PL	PL	PL	
362	Raja Ampat	5	Fani	PL	PL	PL	PL	
363	Raja Ampat	6	Fatanlap	PL	PL	PL	PL	
364	Raja Ampat	7	Kabare	PL	PL	PL	PL	
365	Raja Ampat	8	Kalobo	PL	PL	PL	PL	
366	Raja Ampat	9	Pam	PL	PL	PL	PL	
367	Raja Ampat	10	Waigama	PR	PR	PR	PR	
368	Raja Ampat	11	Waisai	PL	PL	PL	PL	
369	Sorong Selatan	12	Inawatan	PL	PL	PL	PL	
370	Sorong Selatan	13	Segun	PL	PL	PL	PL	
371	Tambrau	14	Mega	PL	PL	PL	PL	
372	Tambrau	15	Sausapor	PL	PL	PL	PL	
373	Teluk Bintuni	16	Babo	PL	PL	PL	PL	
374	Teluk Wondama	17	Windesi	PL	PL	PL	PL	
XXXIII. Provinsi Papua								
375	Asmat	1	Atsy	PL	PL	PL	PL	
376	Asmat	2	Bayun	PL	PL	PL	PL	
377	Asmat	3	Mumugu	PL	PL	PL	PL	
378	Biak Numfor	4	Numford	PL	PL	PL	PL	
379	Biak Numfor	5	Pulau Owi	PL	PL	PL	PL	
380	Boven Digul	6	Asiki	PL	PL	PL	PL	

No.	LOKASI WILAYAH KERJA							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Wilayah Kerja	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
381	Mappi	7	Eci	PL	PL	PL	PL	
382	Mappi	8	Mur/Moor	PL	PL	PL	PL	
383	Merauke	9	Kimaam	PL	PL	PL	PL	
384	Sarmi	10	Teba	PL	PL	PL	PL	
385	Supiori	11	Janggerbun	PL	PL	PL	PL	
386	Yapen	12	Ansus	PL	PL	PL	PL	
387	Yapen	13	Dawai	PL	PL	PL	PL	
388	Yapen	14	Kaipuri	PL	PL	PL	PL	
389	Yapen	15	Poom	PL	PL	PL	PL	

**SUB LAMPIRAN A3
RENCANA LOKASI PELABUHAN**

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
I. Provinsi Aceh								
1	Aceh Barat	1	Johan Pahlawan	PL	PL	PL	PL	
2	Aceh Barat	2	Kuala Bubon	PL	PL	PL	PL	
3	Aceh Barat	3	Meureubo	PL	PL	PL	PL	
4	Aceh Barat Daya	4	Teluk Surin	PL	PR	PR	PR	
5	Aceh Besar	5	Lamteng	PL	PL	PL	PL	
6	Aceh Besar	6	Meulingge	PL	PL	PL	PL	
7	Aceh Jaya	7	Lhok Kruet	PL	PL	PL	PL	
8	Aceh Selatan	8	Labuhan Haji	PL	PL	PL	PL	
9	Aceh Selatan	9	Meukek	PL	PL	PL	PL	
10	Aceh Singkil	10	Gosong telaga	PL	PL	PL	PL	
11	Aceh Tamiang	11	Seruway	PL	PL	PL	PL	
12	Aceh Timur	12	Kuala Beukah	PL	PL	PL	PL	
13	Aceh Utara	13	Lhok Nga	PL	PL	PL	PL	
14	Aceh Utara	14	Pulau Aceh	PL	PL	PL	PL	
15	Bireun	15	Kuala Raja	PL	PL	PL	PL	
16	Langsa	16	Pusong	PL	PL	PL	PL	
17	Nagan Raya	17	Kuala Pesisir	PL	PL	PL	PL	
18	Pidie	18	Laweung	PL	PL	PL	PL	
19	Sabang	19	Balohan	PL	PL	PL	PL	
20	Simeulue	20	Kolok	PL	PL	PL	PL	
21	Simeulue	21	Ujung Sarang	PL	PL	PL	PL	
II. Provinsi Sumatera Utara								
22	Asahan	1	Sei Nangka	PL	PL	PL	PL	
23	Asahan	2	Sei Sembilang	PL	PL	PL	PL	
24	Asahan	3	Silau Baru	PL	PL	PL	PL	
25	Batubara	4	Kampung Lalang	PL	PL	PL	PL	
26	Batubara	5	Perupuk/Medang Deras	PL	PL	PL	PL	
27	Deli Serdang	6	Pantai Labu	PL	PL	PL	PL	
28	Deli Serdang	7	Percut	PL	PL	PL	PL	
29	Deli Serdang	8	Rantau Panjang	PL	PL	PL	PL	
30	Labuhan Batu	9	Ajamu	PL	PL	PL	PL	
31	Labuhan Batu	10	Gajah Mati	PL	PL	PL	PL	
32	Labuhan Batu	11	Pantai Pukat	PL	PL	PL	PL	
33	Labuhan Batu	12	Sei Kubung	PL	PL	PL	PL	
34	Labuhan Batu Utara	13	Simandulang	PL	PL	PL	PL	
35	Langkat	14	Kuala Sarapuh	PL	PL	PL	PL	
36	Langkat	15	Tapak Kuda	PL	PL	PL	PL	
37	Mandailing Natal	16	Batahan	PL	PL	PL	PL	
38	Mandailing Natal	17	Singkuang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
39	Mandailing Natal	18	Tabuyung	PL	PL	PL	PL	
40	Nias Selatan	19	Labuhan Hiu	PL	PL	PL	PL	
41	Nias Selatan	20	Lagundri	PL	PL	PL	PL	
42	Nias Selatan	21	Lahusa	PL	PL	PL	PL	
43	Nias Selatan	22	Moale	PL	PL	PL	PL	
44	Nias Selatan	23	Pulau Simuk	PL	PL	PL	PL	
45	Nias Selatan	24	Pulau Tanah masa	PL	PL	PL	PL	
46	Nias Selatan	25	Pulau Bais	PL	PL	PL	PL	
47	Nias Selatan	26	Pulau Tanah Bala	PL	PL	PL	PL	
48	Nias Selatan	27	Saero	PL	PL	PL	PL	
49	Nias Selatan	28	Solonako	PL	PL	PL	PL	
50	Nias Utara	29	Afulu	PL	PL	PL	PL	
51	Nias Utara	30	Lehelewu	PL	PL	PL	PL	
52	Nias Utara	31	Tuhemberua	PL	PL	PL	PL	
53	Serdang Bedagai	32	Sialang Buah	PL	PL	PL	PL	
54	Tanjung Balai	33	Teluk Nibung	PL	PL	PL	PL	
55	Tapanuli Tengah	34	Mandumas	PL	PL	PL	PL	
56	Tapanuli Tengah	35	Muara Tapus	PL	PL	PL	PL	
57	Tapanuli Tengah	36	Sorkam	PL	PL	PL	PL	
III. Provinsi Sumatera Barat								
58	Kep. Mentawai	1	Air Haji	PL	PL	PL	PL	
59	Kep. Mentawai	2	Labuhan Bajau	PR	PR	PR	PR	
60	Kep. Mentawai	3	Mabukkuk	PL	PL	PL	PL	
61	Kep. Mentawai	4	Pagai Selatan	PL	PL	PL	PL	
62	Kep. Mentawai	5	Sagitci	PL	PL	PL	PL	
63	Kep. Mentawai	6	Selat Bunga	PL	PL	PL	PL	
64	Kep. Mentawai	7	Simabuk	PL	PL	PL	PL	
65	Kep. Mentawai	8	Sinakak	PL	PL	PL	PL	
66	Kep. Mentawai	9	Subelen	PL	PL	PL	PL	
67	Kep. Mentawai	10	Tanopo	PL	PL	PL	PL	
68	Kep. Mentawai	11	Teluk Katurai	PL	PL	PL	PL	
69	Kota Pariaman	12	Muara	PL	PL	PL	PL	
70	Padang	13	Carocok Terusan	PL	PL	PL	PL	
71	Padang Pariaman	14	Pariaman	PL	PL	PL	PL	
72	Padang Pariaman	15	Tiram	PR	PR	PR	PR	
73	Pasaman Barat	16	Sasak	PL	PL	PL	PL	
74	Pesisir Selatan	17	Muara Air Haji	PL	PL	PL	PL	
75	Pesisir Selatan	18	Surantih	PL	PL	PL	PL	
IV. Provinsi Kepulauan Riau								
76	Batam	1	Air Raja	PL	PL	PL	PL	
77	Batam	2	Batu Besar	PL	PL	PL	PL	
78	Batam	3	Belakang Padang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
79	Batam	4	Bulang Lintang	PL	PL	PL	PL	
80	Batam	5	Cengkui	PL	PL	PL	PL	
81	Batam	6	Jaloh	PL	PL	PL	PL	
82	Batam	7	Kampung Baru	PL	PL	PL	PL	
83	Batam	8	Kepala Jerih	PL	PL	PL	PL	
84	Batam	9	Lenggang	PL	PL	PL	PL	
85	Batam	10	Ngenang	PL	PL	PL	PL	
86	Batam	11	Pantai Gelam	PL	PL	PL	PL	
87	Batam	12	Pecong	PL	PL	PL	PL	
88	Batam	13	Pemping	PL	PL	PL	PL	
89	Batam	14	Pulau Abang	PL	PL	PL	PL	
90	Batam	15	Pulau Buluh	PL	PL	PL	PL	
91	Batam	16	Pulau Karas	PL	PL	PL	PL	
92	Batam	17	Pulau Labun	PL	PL	PL	PL	
93	Batam	18	Pulau Mecan	PL	PL	PL	PL	
94	Batam	19	Pulau Mubut	PL	PL	PL	PL	
95	Batam	20	Pulau Petong	PL	PL	PL	PL	
96	Batam	21	Pulau Sarang	PL	PL	PL	PL	
97	Batam	22	Pulau Bulan	PL	PL	PL	PL	
98	Batam	23	Pulau Jangkat	PL	PL	PL	PL	
99	Batam	24	Pulau Nipah	PL	PL	PL	PL	
100	Batam	25	Sagulung	PL	PL	PL	PL	
101	Batam	26	Selat Nenek	PL	PL	PL	PL	
102	Batam	27	Sembulang	PL	PL	PL	PL	
103	Batam	28	Setokok	PL	PL	PL	PL	
104	Batam	29	Sijantung	PL	PL	PL	PL	
105	Batam	30	Subang Mas	PL	PL	PL	PL	
106	Batam	31	Tanjung Riau	PL	PL	PL	PL	
107	Batam	32	Tanjung Uma	PL	PL	PL	PL	
108	Batam	33	Teluk Bakau	PL	PL	PL	PL	
109	Batam	34	Temoyong	PL	PL	PL	PL	
110	Batam	35	Terong	PL	PL	PL	PL	
111	Bintan	36	Barek Motor	PL	PL	PL	PL	
112	Bintan	37	Batu Besar	PL	PL	PL	PL	
113	Bintan	38	Batulicin	PL	PL	PL	PL	
114	Bintan	39	Busung	PL	PL	PL	PL	
115	Bintan	40	Galang Batang	PL	PL	PL	PL	
116	Bintan	41	Gentong Pasir Batu	PL	PL	PL	PL	
117	Bintan	42	Keke Baru	PL	PL	PL	PL	
118	Bintan	43	Malang Rapat	PL	PL	PL	PL	
119	Bintan	44	Jembatan Kawal	PL	PL	PL	PL	
120	Bintan	45	Lagoi	PL	PL	PL	PL	
121	Bintan	46	P. Numbing	PL	PL	PL	PL	
122	Bintan	47	P. Pangkil	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
123	Bintan	48	P. Buton	PL	PL	PL	PL	
124	Bintan	49	P. Gobing	PL	PL	PL	PL	
125	Bintan	50	P. Hantu	PL	PL	PL	PL	
126	Bintan	51	P. Kelong	PL	PL	PL	PL	
127	Bintan	52	P. Koyan	PL	PL	PL	PL	
128	Bintan	53	P. Mantang	PL	PL	PL	PL	
129	Bintan	54	P. Mapur	PL	PL	PL	PL	
130	Bintan	55	P. Poto	PL	PL	PL	PL	
131	Bintan	56	P. Pulau	PL	PL	PL	PL	
132	Bintan	57	P. Sirai	PL	PL	PL	PL	
133	Bintan	58	P. Telang	PL	PL	PL	PL	
134	Bintan	59	Pelantar Korindo	PL	PL	PL	PL	
135	Bintan	60	Semen Tokojo	PL	PL	PL	PL	
136	Bintan	61	Sungai Enam	PL	PL	PL	PL	
137	Bintan	62	Sungai Kecil	PL	PL	PL	PL	
138	Bintan	63	Teluk Bintan	PL	PL	PL	PL	
139	Bintan	64	Trikora	PL	PL	PL	PL	
140	Karimun	65	Akat	PL	PL	PL	PL	
141	Karimun	66	Batu Gajah (Desa Tulang)	PL	PL	PL	PL	
142	Karimun	67	Batu Lipai	PL	PL	PL	PL	
143	Karimun	68	Buah Rawa	PL	PL	PL	PL	
144	Karimun	69	Buru Kota	PL	PL	PL	PL	
145	Karimun	70	Degong/Serengeh	PL	PL	PL	PL	
146	Karimun	71	Durai Kota	PL	PL	PL	PL	
147	Karimun	72	Dusun Nyiur I	PL	PL	PL	PL	
148	Karimun	73	Gabion	PL	PL	PL	PL	
149	Karimun	74	Gemuruh	PL	PL	PL	PL	
150	Karimun	75	Hang Lukut/Gelugur	PL	PL	PL	PL	
151	Karimun	76	Jang Luar	PL	PL	PL	PL	
152	Karimun	77	Kampung Baru/ Selat Mie	PL	PL	PL	PL	
153	Karimun	78	Kampung Benteng	PL	PL	PL	PL	
154	Karimun	79	Kampung Kang	PL	PL	PL	PL	
155	Karimun	80	Kampung Tanjung/ Selat Mie	PL	PL	PL	PL	
156	Karimun	81	Kampung Tengah	PL	PL	PL	PL	
157	Karimun	82	Keban	PL	PL	PL	PL	
158	Karimun	83	Kericik	PL	PL	PL	PL	
159	Karimun	84	Lebuh 1	PL	PL	PL	PL	
160	Karimun	85	Leho	PL	PL	PL	PL	
161	Karimun	86	Mempoyong	PL	PL	PL	PL	
162	Karimun	87	Moro Dalam	PL	PL	PL	PL	
163	Karimun	88	Moro Luar	PL	PL	PL	PL	
164	Karimun	89	Moro	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
165	Karimun	90	Pasir Panjang	PL	PL	PL	PL	
166	Karimun	91	Sekumbang	PL	PL	PL	PL	
167	Karimun	92	Tanjung Berlian	PL	PL	PL	PL	
168	Karimun	93	Ngai	PL	PL	PL	PL	
169	Karimun	94	P. Bahan Dalam	PL	PL	PL	PL	
170	Karimun	95	Pamak Laut	PL	PL	PL	PL	
171	Karimun	96	Pangke	PL	PL	PL	PL	
172	Karimun	97	Pantai Berangan	PL	PL	PL	PL	
173	Karimun	98	Parit 1	PL	PL	PL	PL	
174	Karimun	99	Parit Rempak	PL	PL	PL	PL	
175	Karimun	100	Pasai	PL	PL	PL	PL	
176	Karimun	101	Pasir Todak	PL	PL	PL	PL	
177	Karimun	102	Pauh/Simba	PL	PL	PL	PL	
178	Karimun	103	Pel. Penumpang Pelni	PL	PL	PL	PL	
179	Karimun	104	Pel. Perikanan Parit Rempak	PL	PL	PL	PL	
180	Karimun	105	Pengaram	PL	PL	PL	PL	
181	Karimun	106	Perasi	PL	PL	PL	PL	
182	Karimun	107	Pongkar I	PL	PL	PL	PL	
183	Karimun	108	Pulau Jaga	PL	PL	PL	PL	
184	Karimun	109	Pulau Kas	PL	PL	PL	PL	
185	Karimun	110	Pulau Patah/ Desa Selat Mie	PL	PL	PL	PL	
186	Karimun	111	Sandam/Semedang	PL	PL	PL	PL	
187	Karimun	112	Sanglar	PL	PL	PL	PL	
188	Karimun	113	Sawang / Muka Limus	PL	PL	PL	PL	
189	Karimun	114	Sebele	PL	PL	PL	PL	
190	Karimun	115	Sei Buluh/Jalan Encik Daud	PL	PL	PL	PL	
191	Karimun	116	Sei Pasir	PL	PL	PL	PL	
192	Karimun	117	Sei Sikop	PL	PL	PL	PL	
193	Karimun	118	Sei Ungar	PL	PL	PL	PL	
194	Karimun	119	Selat Binga	PL	PL	PL	PL	
195	Karimun	120	Selat Kisar	PL	PL	PL	PL	
196	Karimun	121	Semikol	PL	PL	PL	PL	
197	Karimun	122	Separi/ Desa Selat Mie	PL	PL	PL	PL	
198	Karimun	123	Setoteng	PL	PL	PL	PL	
199	Karimun	124	Sri Manda/ Seroja	PL	PL	PL	PL	
200	Karimun	125	Sri Tanjung Gelang / KPK	PL	PL	PL	PL	
201	Karimun	126	Tanjung Batu Kecil/Dekat PT	PL	PL	PL	PL	
202	Karimun	127	Tanjung Hutan	PL	PL	PL	PL	
203	Karimun	128	Tanjung Kilang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
204	Karimun	129	Tanjung Magom/Selat Belia	PL	PL	PL	PL	
205	Karimun	130	Tanjung Pelanduk	PL	PL	PL	PL	
206	Karimun	131	Tanjung Perai	PL	PL	PL	PL	
207	Karimun	132	Tebing	PL	PL	PL	PL	
208	Karimun	133	Tg. Batu- Alai	PL	PL	PL	PL	
209	Karimun	134	Tulang	PL	PL	PL	PL	
210	Kep. Anambas	135	Kuala Maras	PR	PR	PR	PR	
211	Kep. Anambas	136	Matak	PL	PL	PL	PL	
212	Lingga	137	Benan	PL	PL	PL	PL	
213	Lingga	138	Berhala	PR	PR	PR	PR	
214	Lingga	139	Cempa	PL	PL	PL	PL	
215	Lingga	140	Daik Lingga	PL	PL	PL	PL	
216	Lingga	141	Pancur	PL	PL	PL	PL	
217	Lingga	142	Jagoh	PL	PL	PL	PL	
218	Lingga	143	Marok Tua	PL	PL	PL	PL	
219	Lingga	144	Medang	PL	PL	PL	PL	
220	Lingga	145	P. Mas	PL	PL	PL	PL	
221	Lingga	146	Rejai	PL	PL	PL	PL	
222	Lingga	147	Sei Tenam	PL	PL	PL	PL	
223	Lingga	148	Tajur Biru	PL	PL	PL	PL	
224	Lingga	149	Tanjung Buton	PL	PL	PL	PL	
225	Lingga	150	Tanjung Kelit	PL	PL	PL	PL	
226	Natuna	151	Binjai	PL	PL	PL	PL	
227	Natuna	152	Kelarik	PR	PR	PR	PR	
228	Natuna	153	Maro Sulit	PL	PL	PL	PL	
229	Natuna	154	Penagi	PL	PL	PL	PL	
230	Natuna	155	Pulau Laut	PR	PR	PR	PR	
231	Natuna	156	Pulau Tiga	PR	PR	PR	PR	
232	Natuna	157	Sabang Mawang	PL	PL	PL	PL	
233	Natuna	158	Sededap	PL	PL	PL	PL	
234	Natuna	159	Semedang	PL	PL	PL	PL	
235	Natuna	160	Tanjung Kumbik	PL	PL	PL	PL	
236	Natuna	161	Teluk Buton	PR	PR	PR	PR	
237	Tanjung Pinang	162	Daeng Celak	PL	PL	PL	PL	
238	Tanjung Pinang	163	Daeng Marewa	PL	PL	PL	PL	
239	Tanjung Pinang	164	Dompok Sebrang	PL	PL	PL	PL	
240	Tanjung Pinang	165	Kampung Bugis	PL	PL	PL	PL	
241	Tanjung Pinang	166	Kampung Lama Dompok	PL	PL	PL	PL	
242	Tanjung Pinang	167	Kelam Pagi	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
243	Tanjung Pinang	168	Madong	PL	PL	PL	PL	
244	Tanjung Pinang	169	P. Penyengat	PL	PL	PL	PL	
245	Tanjung Pinang	170	Pelantar Asam	PL	PL	PL	PL	
246	Tanjung Pinang	171	Pelantar I	PL	PL	PL	PL	
247	Tanjung Pinang	172	Pelantar II	PL	PL	PL	PL	
248	Tanjung Pinang	173	Sei Jang	PL	PL	PL	PL	
249	Tanjung Pinang	174	Sei Ladi	PL	PL	PL	PL	
250	Tanjung Pinang	175	Sekatap Darat	PL	PL	PL	PL	
251	Tanjung Pinang	176	Senggarang	PL	PL	PL	PL	
252	Tanjung Pinang	177	Tanjung Ayun	PL	PL	PL	PL	
253	Tanjung Pinang	178	Tanjung Duku	PL	PL	PL	PL	
254	Tanjung Pinang	179	Tanjung Geliga	PL	PL	PL	PL	
255	Tanjung Pinang	180	Tanjung Lanjut	PL	PL	PL	PL	
256	Tanjung Pinang	181	Tanjung Sebauk	PL	PL	PL	PL	
257	Tanjung Pinang	182	Tanjung Siambang	PL	PL	PL	PL	
258	Tanjung Pinang	183	Tanjung Unggat	PL	PL	PL	PL	
259	Tanjung Pinang	184	Wisata Penyengat	PL	PL	PL	PL	
V. Provinsi Riau								
260	Bengkalis	1	Buruk Bakul	PL	PL	PL	PL	
261	Bengkalis	2	Melibur	PL	PL	PL	PL	
262	Bengkalis	3	Selat Baru	PL	PL	PL	PL	
263	Bengkalis	4	Teluk Rhu	PL	PL	PL	PL	
264	Bengkalis	5	Bantan Tengah	PL	PL	PL	PL	
265	Bengkalis	6	Belitung	PL	PL	PL	PL	
266	Bengkalis	7	Bukit Batu	PL	PL	PL	PL	
267	Bengkalis	8	Darul Aman	PL	PL	PL	PL	
268	Bengkalis	9	Gunap	PL	PL	PL	PL	
269	Bengkalis	10	Lubuk Muda	PL	PL	PL	PL	
270	Bengkalis	11	Selat Morong	PL	PL	PL	PL	
271	Bengkalis	12	Tanjung Kapal	PL	PL	PL	PL	
272	Bengkalis	13	Teluk Pambang	PL	PL	PL	PL	
273	Bengkalis	14	Titi Akar	PL	PL	PL	PL	
274	Dumai	15	Lubuk Gaung	PL	PL	PL	PL	
275	Dumai	16	Pelintung	PL	PL	PL	PL	
276	Indragiri Hilir	17	Muara Bangkong	PL	PL	PL	PL	
277	Indragiri Hilir	18	Perigi Raja	PL	PL	PL	PL	
278	Indragiri Hilir	19	Sapat	PL	PL	PL	PL	
279	Kep.Meranti	20	Tanjung Kedadu	PL	PL	PL	PL	
280	Pekanbaru	21	Tenayan	PL	PL	PL	PL	
281	Pelalawan	22	Sokoi	PL	PL	PL	PL	
282	Pelalawan	91	Penyalai	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
283	Rokan Hilir	23	Bulu Hala	PL	PL	PL	PL	
284	Rokan Hilir	24	Kubu	PL	PL	PL	PL	
285	Rokan Hilir	25	Pulau Halang	PL	PL	PL	PL	
286	Rokan Hilir	26	Pulau Jemur	PL	PL	PL	PL	
287	Siak	27	Buatan	PL	PL	PL	PL	
288	Siak	28	Kurau/Selat Lalang	PL	PL	PL	PL	
289	Siak	29	Sei Apit	PL	PL	PL	PL	
290	Siak	30	Sungai Siak	PL	PL	PL	PL	
VI. Provinsi Bengkulu								
291	Bengkulu	1	Ketahum	PL	PL	PL	PL	
292	Bengkulu	2	Pulau Tikus	PL	PL	PL	PL	
VII. Provinsi Jambi								
293	Tg. Jabung Barat	1	Betara	PL	PL	PL	PL	
294	Tg. Jabung Barat	2	Muara Delli	PL	PL	PL	PL	
295	Tg. Jabung Timur	3	Air Hitam Laut	PL	PL	PL	PL	
296	Tg. Jabung Timur	4	Kuala Jambi	PL	PL	PL	PL	
297	Tg. Jabung Timur	5	Lambur Luar	PL	PL	PL	PL	
298	Tg. Jabung Timur	6	Pamusiran	PL	PL	PL	PL	
299	Tg. Jabung Timur	7	Pangkal Duri	PL	PL	PL	PL	
VIII. Provinsi Sumatera Selatan								
300	Banyuasin	1	Gasing	PL	PL	PL	PL	
301	Banyuasin	2	Penuguan	PL	PL	PL	PL	
302	Banyuasin	3	Sungai Sembilang	PL	PL	PL	PL	
303	Banyuasin	4	Sungsang	PL	PL	PL	PL	
304	Banyuasin	5	Tanjung Lago	PL	PL	PL	PL	
305	Banyuasin	6	Karang Agung	PL	PL	PL	PL	
306	Banyuasin	7	Musi Rawas	PL	PL	PL	PL	
307	Musi Banyu Asin	8	Bayung Leucir	PL	PL	PL	PL	
308	Musi Banyu Asin	9	Sungai Lilin	PL	PL	PL	PL	
309	OKI	10	Mesuji	PL	PL	PL	PL	
310	OKI	11	Sugihan	PL	PL	PL	PL	
311	Palembang	12	Gandus	PL	PL	PL	PL	
312	Palembang	13	Jakabaring	PL	PL	PL	PL	
313	Palembang	14	Prambatan	PL	PL	PL	PL	
314	Palembang	15	Sungai Lais	PL	PL	PL	PL	
IX. Provinsi Bangka Belitung								
315	Bangka	1	Jelitik	PL	PL	PL	PL	
316	Bangka	2	Pulau Mengkubung	PL	PL	PL	PL	
317	Bangka	3	Pulau Ninjuk	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
318	Bangka	4	Sungai Liat	PL	PL	PL	PL	
319	Bangka Barat	5	Tanjung Kalian	PL	PL	PL	PL	
320	Bangka Barat	6	Tanjung Ular	PL	PL	PL	PL	
321	Bangka Selatan	7	Bangka Kota	PL	PL	PL	PL	
322	Bangka Selatan	8	Pulau Besar	PL	PL	PL	PL	
323	Bangka Selatan	9	Pulau Burung	PL	PL	PL	PL	
324	Bangka Selatan	10	Pulau Celagen	PL	PL	PL	PL	
325	Bangka Selatan	11	Pulau Kelapan	PL	PL	PL	PL	
326	Bangka Selatan	12	Pulau Panjang	PL	PL	PL	PL	
327	Bangka Selatan	13	Pulau Pongok (Pulau Liat)	PL	PL	PL	PL	
328	Bangka Selatan	14	Pulau Tukak	PL	PL	PL	PL	
329	Bangka Selatan	15	Tanjung Gading (Penutuk)	PL	PL	PL	PL	
330	Bangka Tengah	16	Pelabuhan Kurau	PL	PL	PL	PL	
331	Bangka Tengah	17	Pulau Ketawai	PL	PL	PL	PL	
332	Bangka Tengah	18	Pulau Nangka	PL	PL	PL	PL	
333	Bangka Tengah	19	Sungai Selan	PR	PR	PR	PR	
334	Bangka Tengah	20	Tanjung Berikat	PL	PL	PL	PL	
335	Bangka Tengah	21	Tanjung Labu	PL	PL	PL	PL	
336	Bangka Tengah	22	Tanjung Sangkar	PL	PL	PL	PL	
337	Bangka Tengah	23	Tanjung Tedung	PL	PL	PL	PL	
338	Belitung	24	Pulau Sumedang	PL	PL	PL	PL	
339	Belitung	25	Pulau Lengkuas	PL	PL	PL	PL	
340	Belitung	26	Pulau Mendanau	PL	PL	PL	PL	
341	Belitung	27	Pulau Siliu	PL	PL	PL	PL	
342	Belitung	28	Tanjung Roe	PL	PL	PL	PL	
343	Belitung	29	Tanjung Kelayang	PL	PL	PL	PL	
344	Belitung	30	Tanjung Nyato Petaling	PL	PL	PL	PL	
345	Belitung	31	Teluk Gembira	PL	PL	PL	PL	
346	Belitung Timur	32	Dendang	PL	PL	PL	PL	
347	Belitung Timur	33	Pulau Batu	PL	PL	PL	PL	
348	Belitung Timur	34	Pulau Buku Limau	PL	PL	PL	PL	
349	Belitung Timur	35	Pulau Ketapang	PL	PL	PL	PL	
350	Belitung Timur	36	Pulau Long	PL	PL	PL	PL	
351	Belitung Timur	37	Pulau Sekunyit	PL	PL	PL	PL	
352	Belitung Timur	38	Teluk Asam	PL	PL	PL	PL	
353	Pangkalpinang	39	Pulau Semujur	PL	PL	PL	PL	
X. Provinsi Lampung								
354	Lampung Selatan	1	Canti	PL	PL	PL	PL	
355	Lampung Selatan	2	Ranggai	PL	PL	PL	PL	
356	Mesuji	3	KTM SP 8	PL	PL	PL	PL	
357	Mesuji	4	Sungai Sidang	PL	PL	PL	PL	
358	Mesuji	5	Wiralaga	PL	PL	PL	PL	
359	Pesisir Barat	6	Bengkunat	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
360	Tanggamus	7	Kelumbayan	PL	PL	PL	PL	
361	Tanggamus	8	Kiluan	PL	PL	PL	PL	
362	Tulang Bawang	9	Dente Teladas	PL	PL	PL	PL	
XI. Provinsi Banten								
363	Lebak	1	Bayah	PL	PL	PL	PL	
364	Lebak	2	M. Binuangeun	PL	PL	PL	PL	
365	Pandeglang	3	Panimbang	PL	PL	PL	PL	
366	Serang	4	Grenyang-Puloampel	PL	PL	PL	PL	
367	Serang	5	Pasauran	PL	PL	PL	PL	
368	Serang	6	Pulopanjang-Puloampel	PL	PL	PL	PL	
369	Serang	7	Tanjung Leneng	PL	PL	PL	PL	
370	Serang	8	Terate	PL	PL	PL	PL	
371	Serang	9	Pulutunda-Tirtayasa	PL	PL	PL	PL	
372	Serang	10	Lontar-Pontang	PL	PL	PL	PL	
373	Tangerang	11	Muara Dadap	PL	PL	PL	PL	
XII. Provinsi Jawa Barat								
374	Bekasi	1	Tarumajaya	PR	PR	PR	PR	
375	Cianjur	2	Sindang Barang	PL	PL	PL	PL	
376	Cirebon	3	Astanajapura	PL	PL	PL	PL	
377	Cirebon	4	Bondet	PL	PL	PL	PL	
378	Cirebon	5	Gebang Mekar	PL	PL	PL	PL	
379	Cirebon	6	Kejawanan	PL	PL	PL	PL	
380	Garut	7	Pakenjeng	PL	PL	PL	PL	
381	Garut	8	Caringin	PL	PL	PL	PL	
382	Indramayu	9	Balongan	PL	PL	PL	PL	
383	Indramayu	10	Eretan	PL	PL	PL	PL	
384	Indramayu	11	Juntinyuat	PL	PL	PL	PL	
385	Indramayu	12	Karangsong	PL	PL	PL	PL	
386	Indramayu	13	Patrol	PL	PL	PL	PL	
387	Indramayu	14	Sukra	PL	PL	PL	PL	
388	Pangandaran	15	Batu Karas	PL	PL	PL	PL	
389	Pangandaran	16	Majingklak	PL	PL	PL	PL	
390	Pangandaran	17	Pameungpeuk	PL	PL	PL	PL	
391	Pangandaran	18	Parigi	PL	PL	PL	PL	
392	Karawang	19	Muara Bendera	PL	PL	PL	PL	
393	Karawang	20	Sungai Buntu	PL	PL	PL	PL	
394	Subang	21	Ciasem	PL	PL	PL	PL	
395	Subang	22	Mayangan	PL	PL	PL	PL	
396	Subang	23	Muara Tawar	PL	PL	PL	PL	
397	Sukabumi	24	Cisolok	PL	PL	PL	PL	
398	Sukabumi	25	Ciwaru	PL	PL	PL	PL	
399	Sukabumi	26	Ujung Genteng	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
400	Tasikmalaya	27	Cipatujah	PL	PL	PL	PL	
XIII. Provinsi DKI Jakarta								
401	Jakarta Utara	1	Pangkalan Pasir Kalibaru	PL	PL	PL	PL	
402	Jakarta Utara	2	Cakung Drain Cilincing	PL	PL	PL	PL	
403	Jakarta Utara	3	Marina Ancol	PL	PL	PL	PL	
404	Jakarta Utara	4	Muara Kamal	PL	PL	PL	PL	
405	Jakarta Utara	5	Pantai Mutiara	PL	PL	PL	PL	
406	Kep. Seribu	6	P. Bidadari	PL	PL	PL	PL	
407	Kep. Seribu	7	P. Harapan	PL	PL	PL	PL	
408	Kep. Seribu	8	P. Panggang	PL	PL	PL	PL	
409	Kep. Seribu	9	P. Pari	PL	PL	PL	PL	
410	Kep. Seribu	10	P. Payung	PL	PL	PL	PL	
411	Kep. Seribu	11	P. Sebira	PL	PL	PL	PL	
412	Kep. Seribu	12	P. Kelapa	PL	PL	PL	PL	
413	Kep. Seribu	13	P. Lancang	PL	PL	PL	PL	
414	Kep. Seribu	14	P. Tidung	PL	PL	PL	PL	
415	Kep. Seribu	15	P. Untung Jawa	PL	PL	PL	PL	
XIV. Provinsi Jawa Tengah								
416	Batang	1	Celong	PL	PL	PL	PL	
417	Batang	2	Roban	PL	PL	PL	PL	
418	Batang	3	Seklayu	PL	PL	PL	PL	
419	Brebes	4	Losari	PL	PL	PL	PL	
420	Cilacap	5	Bunton	PL	PL	PL	PL	
421	Cilacap	6	Tegalkamulyan	PL	PL	PL	PL	
422	Demak	7	Morodemak	PL	PL	PL	PL	
423	Jepara	8	Bangsri	PL	PL	PL	PL	
424	Jepara	9	Desa Kemujan	PL	PL	PL	PL	
425	Jepara	10	Kelet	PL	PL	PL	PL	
426	Jepara	11	Kartini	PL	PL	PL	PL	
427	Tegal	12	Jongor Tegalsari	PL	PL	PL	PL	
428	Tegal	13	Larangan	PL	PL	PL	PL	
XV. Provinsi Jawa Timur								
429	Bangkalan	1	kamal	PL	PL	PL	PL	
430	Bangkalan	2	Nepa	PL	PL	PL	PL	
431	Bangkalan	3	Poleng	PL	PL	PL	PL	
432	Bangkalan	4	Sepulu	PL	PL	PL	PL	
433	Bangkalan	5	Ujung Piring	PL	PL	PL	PL	
434	Banyu Wangi	6	Blimbing Sari	PL	PL	PL	PL	
435	Banyu Wangi	7	Granjangan	PL	PL	PL	PL	
436	Banyu Wangi	8	Muncar	PL	PL	PL	PL	
437	Banyu Wangi	9	Pancer	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
438	Gresik	10	Camar	PL	PL	PL	PL	
439	Gresik	11	Tambak	PL	PL	PL	PL	
440	Lamongan	12	Paciran	PR	PR	PR	PR	
441	Jember	13	Jember	PL	PL	PL	PL	
442	Malang	14	Sendang Biru	PL	PL	PL	PL	
443	Pasuruan	15	Grati	PL	PL	PL	PL	
444	Pasuruan	16	Lekok	PL	PL	PL	PL	
445	Probolinggo	17	Kalibuntu	PL	PL	PL	PL	
446	Probolinggo	18	Paiton	PL	PL	PL	PL	
447	Sampang	19	Taddan	PL	PR	PR	PR	
448	Sampang	20	Tanlok	PL	PL	PL	PL	
449	Situbondo	21	Besuki	PL	PL	PL	PL	
450	Situbondo	22	Jangkar	PL	PL	PL	PL	
451	Situbondo	23	Meimbo	PL	PL	PL	PL	
452	Situbondo	24	Pasir Putih	PL	PL	PL	PL	
453	Sumenep	25	Ambunten	PL	PL	PL	PL	
454	Sumenep	26	Bintaro	PL	PL	PL	PL	
455	Sumenep	27	Dungkek	PL	PL	PL	PL	
456	Sumenep	28	Gili Genting	PL	PL	PL	PL	
457	Sumenep	29	Giliraja	PL	PL	PL	PL	
458	Sumenep	30	Giliyang	PL	PL	PL	PL	
459	Sumenep	31	Longos	PL	PL	PL	PL	
460	Sumenep	32	Masakambing	PL	PL	PL	PL	
461	Sumenep	33	Nung Gunung	PL	PL	PL	PL	
462	Sumenep	34	Pagar Batu	PL	PL	PL	PL	
463	Sumenep	35	Pagerungan	PL	PL	PL	PL	
464	Sumenep	36	Pasongsongan	PL	PL	PL	PL	
465	Sumenep	37	Pragaan	PL	PL	PL	PL	
466	Sumenep	38	Sepanjang	PL	PL	PL	PL	
467	Sumenep	39	Tanjung Saronggi	PL	PL	PL	PL	
468	Sumenep	40	Sakala	PL	PL	PL	PL	
469	Trenggalek	41	Prigi	PL	PL	PR	PR	
470	Tuban	42	Jenu	PL	PL	PL	PL	
471	Tuban	43	Karang Agung	PL	PL	PL	PL	
472	Tuban	44	Tanjung Awar-awar	PL	PL	PL	PL	
473	Tuban	45	Tuban	PL	PL	PL	PL	
XVI. Provinsi Bali								
474	Buleleng	1	Banyu Wedang	PL	PL	PL	PL	
475	Buleleng	2	Brombong	PL	PL	PL	PL	
476	Buleleng	3	Penuktukan	PL	PL	PL	PL	
477	Buleleng	4	Pegametan	PL	PL	PL	PL	
478	Buleleng	5	Pemaron	PL	PL	PL	PL	
479	Denpasar	6	Kedonganan	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
480	Denpasar	7	Sanur	PL	PL	PL	PL	
481	Denpasar	8	Serangan	PL	PL	PL	PL	
482	Denpasar	9	Tanjung Benoa	PL	PL	PL	PL	
483	Gunaksa	10	Gunaksa	PL	PL	PL	PL	
484	Jembrana	11	Pengambangan	PL	PL	PL	PL	
485	Karangasem	12	Kubu	PL	PL	PL	PL	
486	Karangasem	13	Labuhan Amed	PL	PL	PL	PL	
487	Karangasem	14	Manggis	PL	PL	PL	PL	
488	Klungkung	15	Bias Munjul/Ceningan	PL	PL	PL	PL	
489	Klungkung	16	Buyuk	PL	PL	PL	PL	
490	Klungkung	17	Kusamba	PL	PL	PL	PL	
491	Klungkung	18	Mentigi	PL	PL	PL	PL	
XVII. Provinsi Nusa Tenggara Barat								
492	Dompu	1	Kilo	PL	PL	PL	PL	
493	Dompu	2	Satonda	PL	PL	PL	PL	
494	Dompu	3	Teluk Cempi	PL	PL	PL	PL	
495	Lombok Barat	4	Jeranjang	PL	PL	PL	PL	
496	Lombok Barat	5	Labuhan Poh-Sekotong	PL	PL	PL	PL	
497	Lombok Barat	6	Senggigi	PL	PL	PL	PL	
498	Lombok Barat	7	Teluk Awang	PL	PL	PL	PL	
499	Lombok Barat	8	Teluk Sepi	PL	PL	PL	PL	
500	Lombok Barat	9	Tawun	PL	PL	PL	PL	
501	Lombok Timur	10	Tanjung Luar	PL	PL	PL	PL	
502	Lombok Timur	11	Telong Elong	PL	PL	PL	PL	
503	Lombok Utara	12	Khayangan	PL	PL	PL	PL	
504	Sumbawa	13	Akik Bari	PL	PL	PL	PL	
505	Sumbawa	14	Kartasari	PL	PL	PL	PL	
506	Sumbawa	15	Labangka	PL	PL	PL	PL	
507	Sumbawa	16	Pelabuhan Jambu	PL	PL	PL	PL	
508	Sumbawa	17	Pulau Moyo	PL	PL	PL	PL	
509	Sumbawa	18	Teluk Santong	PL	PL	PL	PL	
510	Sumbawa Barat	19	Labuhan Lalar	PL	PL	PL	PL	
511	Sumbawa Barat	20	Poto Tano	PL	PL	PL	PL	
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur								
512	Alor	1	Alor Kecil	PL	PL	PL	PL	
513	Alor	2	Bakalang	PL	PL	PL	PL	
514	Alor	3	Beang	PL	PL	PL	PL	
515	Alor	4	Kolana	PL	PL	PL	PL	
516	Alor	5	Manatang	PL	PL	PL	PL	
517	Alor	6	Paitoko	PL	PL	PL	PL	
518	Alor	7	Pulau Marica	PL	PL	PL	PL	
519	Alor	8	Wanakaka	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
520	Belu	9	Maubesi Hasan	PL	PL	PL	PL	
521	Ende	10	Pulau Ende	PL	PL	PL	PL	
522	Ende	11	Ropa	PL	PL	PL	PL	
523	Flores Timur	12	Kewapante	PL	PL	PL	PL	
524	Flores Timur	13	Pulau Solor	PL	PL	PL	PL	
525	Flores Timur	14	Sagu	PL	PL	PL	PL	
526	Flores Timur	15	Waidoko	PL	PL	PL	PL	
527	Flores Timur	16	Waiklibang	PL	PL	PL	PL	
528	Kupang	17	Batubao	PL	PL	PL	PL	
529	Kupang	18	Oepoli	PL	PL	PL	PL	
530	Kupang	19	Semau	PL	PL	PL	PL	
531	Kupang	20	Sulamu	PL	PL	PL	PL	
532	Manggarai Barat	21	Kampung Ujung	PL	PL	PL	PL	
533	Manggarai Barat	22	Kukusan	PL	PL	PL	PL	
534	Manggarai Barat	23	Nangalili	PL	PL	PL	PL	
535	Manggarai Timur	24	Nanga Baras	PL	PL	PL	PL	
536	Ngada	25	Riung	PL	PL	PL	PL	
537	Ngada	26	Waebela	PL	PL	PL	PL	
538	Rote Ndao	27	Nuse	PL	PL	PL	PL	
539	Rote Ndao	28	Oelaba	PL	PL	PL	PL	
540	Rote Ndao	29	Pantai Baru	PL	PL	PL	PL	
541	Rote Ndao	30	Pulau Ndana	PL	PL	PL	PL	
542	Sikka	31	Paga	PL	PL	PL	PL	
543	Sikka	32	Pulau Besar	PL	PL	PL	PL	
544	Sikka	33	Pemana	PL	PL	PL	PL	
545	Sikka	34	Sukun	PL	PL	PL	PL	
546	Sumba Barat Daya	35	Pero	PL	PL	PL	PL	
547	Sumba Timur	36	Katundu	PL	PL	PL	PL	
548	Sumba Timur	37	Nggonggi	PL	PL	PL	PL	
549	Timor Tengah Utara	38	Teluk Gurita	PL	PL	PL	PL	
XIX. Provinsi Kalimantan Barat								
550	Bengkayang	1	Tanjung Gondol	PL	PL	PL	PL	
551	Kayong Utara	2	Kerja Pasaguan	PL	PL	PL	PL	
552	Kayong Utara	3	Kerja Satong	PL	PL	PL	PL	
553	Kayong Utara	4	Pasar Sentap	PL	PL	PL	PL	
554	Kayong Utara	5	Pulau Pelapis	PL	PL	PL	PL	
555	Kayong Utara	6	Sungai Tengar	PL	PL	PL	PL	
556	Ketapang	7	Kubu	PL	PL	PL	PL	
557	Mempawah	8	Sambas	PL	PL	PL	PL	
558	Mempawah	9	Sungai Duri	PL	PL	PL	PL	
559	Mempawah	10	Sungai Kakap	PL	PL	PL	PL	
560	Mempawah	11	Teluk Pakedai	PL	PL	PL	PL	
561	Sambas	12	Jawai	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
562	Sambas	13	Serasan	PL	PL	PL	PL	
563	Sambas	14	Temajuk	PL	PL	PL	PL	
XX. Provinsi Kalimantan Tengah								
564	Kapuas	1	Kuala Kapuas	PL	PL	PL	PL	
565	Kapuas	2	Tanjung Tawas	PL	PL	PL	PL	
566	Katingan	3	Pulau Damar	PL	PL	PL	PL	
567	Kotawaringin Barat	4	Sebuai	PL	PL	PL	PL	
568	Kotawaringin Timur	5	Kuala Kuayan	PL	PL	PL	PL	
569	Kotawaringin Timur	6	Parenggean	PL	PL	PL	PL	
570	Palangkaraya	7	Bukit Pinang	PL	PL	PL	PL	
571	Palangkaraya	8	Teluk Sebangau	PL	PL	PL	PL	
572	Pulang Pisau	9	Tanjung Perawan	PL	PL	PL	PL	
573	Sukamara	10	Balai Riang	PL	PL	PL	PL	
574	Sukamara	11	Jambi	PL	PL	PL	PL	
575	Sukamara	12	Pulau Nibung	PL	PL	PL	PL	
XXI. Provinsi Kalimantan Utara								
576	Bulungan	1	Batu Pahat	PL	PL	PL	PL	
577	Bulungan	2	Sei Linuah Kayan	PL	PL	PL	PL	
578	Bulungan	3	Sei Sembakung	PL	PL	PL	PL	
579	Bulungan	4	Sekatak	PL	PL	PL	PL	
580	Bulungan	5	Pindada Tana Kuning	PL	PL	PL	PL	
581	Malinau	6	Kelapis/Malinau	PL	PL	PL	PL	
582	Nunukan	7	Balansiku	PL	PL	PL	PL	
583	Nunukan	8	Sebakis	PL	PL	PL	PL	
584	Nunukan	9	Sebuku	PL	PL	PL	PL	
585	Nunukan	10	Sebatik	PL	PL	PL	PL	
586	Tarakan	11	Bangkudulis	PL	PL	PL	PL	
587	Tarakan	12	Bebatu	PL	PL	PL	PL	
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan								
588	Kotabaru	1	Gunung Batu Besar	PL	PL	PL	PL	
589	Kotabaru	2	Maradapan	PL	PL	PL	PL	
590	Tanah Bumbu	3	Angsana	PL	PL	PL	PL	
591	Tanah Bumbu	4	Pagatan	PL	PL	PL	PL	
592	Tanah Bumbu	5	Sabamban	PL	PL	PL	PL	
593	Tanah Bumbu	6	Sei Cuka	PL	PL	PL	PL	
594	Tanah Bumbu	7	Setarap	PL	PL	PL	PL	
595	Tanah Bumbu	8	Sungai Loban	PL	PL	PL	PL	
596	Tanah Bumbu	9	Tanah Bumbu	PL	PL	PL	PL	
597	Tanah Laut	10	Jorong	PL	PL	PL	PL	
598	Tanah Laut	11	Tanjung Dewa	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur								
599	Balikpapan	1	Kampung baru	PL	PL	PL	PL	
600	Berau	2	Talisayan	PL	PL	PL	PL	
601	Kutai Kertanegara	3	Dondang	PL	PL	PL	PL	
602	Kutai Kertanegara	4	Marangkayu	PL	PL	PL	PL	
603	Kutai Kertanegara	5	Muara Jawa	PL	PL	PL	PL	
604	Kutai Kertanegara	6	Senipah	PL	PL	PL	PL	
605	Paser	7	Teluk Apar	PL	PL	PL	PL	
606	Penajam Pasir Utara	8	Mentawir	PL	PL	PL	PL	
607	Samarinda	9	Mahakam Hulu	PL	PL	PL	PL	
608	Samarinda	10	Muara Berau	PL	PL	PL	PL	
609	Samarinda	11	Sanga-Sanga	PL	PL	PL	PL	
XXIV. Provinsi Sulawesi Utara								
610	B. Mangondow	1	Inobonto	PL	PL	PL	PL	
611	B. Mangondow Selatan	2	Molibagu	PL	PL	PL	PL	
612	B. Mangondow Timur	3	Tutuyan - Jikoblanga	PL	PL	PL	PL	
613	B. Mangondow Utara	4	Boroko	PL	PL	PL	PL	
614	B. Mangondow Utara	5	Tuntun	PL	PL	PL	PL	
615	Bitung	6	Air Tembaga	PL	PL	PL	PL	
616	Kep. Sangihe	7	Babelang	PL	PL	PL	PL	
617	Kep. Sangihe	8	Bentung	PL	PL	PL	PL	
618	Kep. Sangihe	9	Manalu	PL	PL	PL	PL	
619	Kep. Sangihe	10	P. Beng Darat	PL	PL	PL	PL	
620	Kep. Sangihe	11	P. Beng Laut	PL	PL	PL	PL	
621	Kep. Sangihe	12	P. Mahangetang	PL	PL	PL	PL	
622	Kep. Sangihe	13	P. Tinakareng	PL	PL	PL	PL	
623	Kep. Sangihe	14	Pananaru	PL	PL	PL	PL	
624	Kep. Sitaro	15	Pahepa	PL	PL	PL	PL	
625	Kep. Sitaro	16	P. Ruang	PL	PL	PL	PL	
626	Kep. Sitaro	17	Salangka	PL	PL	PL	PL	
627	Manado	18	Bunaken	PL	PL	PL	PL	
628	Manado	19	P. Manado Tua	PL	PL	PL	PL	
629	Manado	20	Siladen	PL	PL	PL	PL	
630	Minahasa	21	Kora-Kora	PL	PL	PL	PL	
631	Minahasa Tenggara	22	Tumbak	PL	PL	PL	PL	
632	Minahasa Utara	23	Bangka	PL	PL	PL	PL	
633	Minahasa Utara	24	Gangga	PL	PL	PL	PL	
634	Minahasa Utara	25	Montehage	PL	PL	PL	PL	
635	Minahasa Utara	26	Nain	PL	PL	PL	PL	
636	Minahasa Utara	27	Talise	PL	PL	PL	PL	
637	Kep. Talaud	28	Damao	PL	PL	PL	PL	
638	Kep. Talaud	29	Gemeh	PL	PL	PL	PL	
639	Kep. Talaud	30	Intata	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
640	Manado	31	Tumumpa	PL	PL	PL	PL	
641	Minahasa	32	Bentenan	PL	PL	PL	PL	
642	Minahasa	33	Ratatotok	PL	PL	PL	PL	
643	Minahasa	34	Tanawangko	PL	PL	PL	PL	
644	Minahasa Utara	35	Wori	PL	PL	PL	PL	
XXV. Provinsi Gorontalo								
645	Boalemo	1	Wongorasi	PL	PL	PL	PL	
646	Gorontalo	2	Molotabu	PL	PL	PL	PL	
647	Gorontalo Utara	3	Biao	PL	PL	PL	PL	
648	Gorontalo Utara	4	Bolontio	PL	PL	PL	PL	
649	Gorontalo Utara	5	Buroko	PL	PL	PL	PL	
650	Gorontalo Utara	6	Gentuma	PL	PL	PL	PL	
651	Gorontalo Utara	7	Monano	PL	PL	PL	PL	
652	Gorontalo Utara	8	Sumalata	PL	PL	PL	PL	
653	Gorontalo Utara	9	Tolinggula	PL	PL	PL	PL	
654	Pohuwato	10	Lemito	PL	PL	PL	PL	
655	Pohuwato	11	Marisa	PL	PL	PL	PL	
656	Pohuwato	12	Popayato	PL	PL	PL	PL	
XXVI. Provinsi Sulawesi Barat								
657	Majene	1	Malunda	PL	PL	PL	PL	
658	Majene	2	Palipi	PR	PR	PR	PR	
659	Majene	3	Pamboang	PL	PL	PL	PL	
660	Majene	4	Sendana	PL	PL	PL	PL	
661	Mamuju	5	Kalukku	PL	PL	PL	PL	
662	Mamuju	6	Sampaga	PL	PL	PL	PL	
663	Mamuju	7	Tappalang	PL	PL	PL	PL	
664	Mamuju Utara	8	Bambaloka	PL	PL	PL	PL	
665	Polewali Mandar	9	Kayuangin	PL	PL	PL	PL	
666	Polewali Mandar	10	Langnga	PL	PL	PL	PL	
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah								
667	Banggai	1	Basabungan	PL	PL	PL	PL	
668	Banggai	2	Bualemo	PL	PL	PL	PL	
669	Banggai	3	Lalong	PL	PL	PL	PL	
670	Banggai	4	Poat	PL	PL	PL	PL	
671	Banggai	5	Balantak	PL	PL	PL	PL	
672	Banggai	6	Dondola	PL	PL	PL	PL	
673	Banggai	7	Kambani	PL	PL	PL	PL	
674	Banggai	8	Leme-Leme	PL	PL	PL	PL	
675	Banggai	9	Pangkalasiang	PL	PL	PL	PL	
676	Banggai	10	Pulau Peling	PL	PL	PL	PL	
677	Banggai	11	Pulau Waleabahi	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
678	Banggai	12	Rata	PL	PL	PL	PL	
679	Banggai	13	Toima	PL	PL	PL	PL	
680	Banggai Kepulauan	14	Boloan	PL	PL	PL	PL	
681	Banggai Kepulauan	15	Lalengan	PL	PL	PL	PL	
682	Banggai Kepulauan	16	Lumbilumbia	PL	PL	PL	PL	
683	Banggai Kepulauan	17	Alasan	PL	PL	PL	PL	
684	Banggai Kepulauan	18	Bakalan	PL	PL	PL	PL	
685	Banggai Kepulauan	19	Batangono	PL	PL	PL	PL	
686	Banggai Kepulauan	20	Boyomoute	PL	PL	PL	PL	
687	Banggai Kepulauan	21	Bulagi	PL	PL	PL	PL	
688	Banggai Kepulauan	22	Bulungkobit	PL	PL	PL	PL	
689	Banggai Kepulauan	23	Kalumbatan	PL	PL	PL	PL	
690	Banggai Kepulauan	24	Kalupapi	PL	PL	PL	PL	
691	Banggai Kepulauan	25	Kindandal	PL	PL	PL	PL	
692	Banggai Kepulauan	26	Komba-Komba	PL	PL	PL	PL	
693	Banggai Kepulauan	27	Lalong	PL	PL	PL	PL	
694	Banggai Kepulauan	28	Liang	PL	PL	PL	PL	
695	Banggai Kepulauan	29	Lipulalongo	PL	PL	PL	PL	
696	Banggai Kepulauan	30	Lolantang	PL	PL	PL	PL	
697	Banggai Kepulauan	31	Lupamenteng	PL	PL	PL	PL	
698	Banggai Kepulauan	32	Mata Maling	PL	PL	PL	PL	
699	Banggai Kepulauan	33	Mbeleang	PL	PL	PL	PL	
700	Banggai Kepulauan	34	Oluno	PL	PL	PL	PL	
701	Banggai Kepulauan	35	Padingtian	PL	PL	PL	PL	
702	Banggai Kepulauan	36	Paisulamo	PL	PL	PL	PL	
703	Banggai Kepulauan	37	Palapat	PL	PL	PL	PL	
704	Banggai Kepulauan	38	Ponding - Ponding	PL	PL	PL	PL	
705	Banggai Kepulauan	39	Sabang/P. Peleng	PL	PL	PL	PL	
706	Banggai Kepulauan	40	Salakan (I,II)	PL	PL	PL	PL	
707	Banggai Kepulauan	41	Sasabobok	PL	PL	PL	PL	
708	Banggai Kepulauan	42	Tabulan	PL	PL	PL	PL	
709	Banggai Kepulauan	43	Tadono	PL	PL	PL	PL	
710	Banggai Kepulauan	44	Talas	PL	PL	PL	PL	
711	Banggai Kepulauan	45	Tataba	PL	PL	PL	PL	
712	Banggai Kepulauan	46	Tebing	PL	PL	PL	PL	
713	Banggai Kepulauan	47	Tinangkung	PL	PL	PL	PL	
714	Banggai Kepulauan	48	Togong Sagu	PL	PL	PL	PL	
715	Banggai Kepulauan	49	Tolulos	PL	PL	PL	PL	
716	Banggai Laut	50	Dodung	PL	PL	PL	PL	
717	Banggai Laut	51	Gonggong	PL	PL	PL	PL	
718	Banggai Laut	52	Kapela	PL	PL	PL	PL	
719	Banggai Laut	53	Kasuari	PL	PL	PL	PL	
720	Banggai Laut	54	Kaukes	PL	PL	PL	PL	
721	Banggai Laut	55	Kokondang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
722	Banggai Laut	56	Lampio	PL	PL	PL	PL	
723	Banggai Laut	57	Lokotoy	PL	PL	PL	PL	
724	Banggai Laut	58	Matanga	PL	PL	PL	PL	
725	Banggai Laut	59	Ndindibung	PL	PL	PL	PL	
726	Banggai Laut	60	Paisubebe	PL	PL	PL	PL	
727	Banggai Laut	61	Panapat	PL	PL	PL	PL	
728	Banggai Laut	62	Panapat/ Konalu	PL	PL	PL	PL	
729	Banggai Laut	63	Panapat/Dendek	PL	PL	PL	PL	
730	Banggai Laut	64	Panapat/Mandel	PL	PL	PL	PL	
731	Banggai Laut	65	Popisi	PL	PL	PL	PL	
732	Banggai Laut	66	Tinakin Laut	PL	PL	PL	PL	
733	Banggai Laut	67	Bungin	PL	PL	PL	PL	
734	Banggai Laut	68	Gasuang	PL	PL	PL	PL	
735	Banggai Laut	69	Lantibung	PL	PL	PL	PL	
736	Banggai Laut	70	Mansalean	PL	PL	PL	PL	
737	Banggai Laut	71	Mbuang-Mbuang	PL	PL	PL	PL	
738	Banggai Laut	72	Sonit (I, II)	PL	PL	PL	PL	
739	Banggai Laut	73	Timpaus	PL	PL	PL	PL	
740	Banggai Laut	74	Toropot	PL	PL	PL	PL	
741	Buol	75	Kumaligon	PL	PL	PL	PL	
742	Buol	76	Lokodidi	PL	PL	PL	PL	
743	Buol	77	Paleleh	PR	PR	PR	PR	
744	Donggala	78	Labean	PL	PL	PL	PL	
745	Donggala	79	Sabang	PL	PL	PL	PL	
746	Donggala	80	Rerang	PL	PL	PL	PL	
747	Morowali	81	Kaleroang	PL	PL	PL	PL	
748	Morowali	82	Sambalagi	PL	PL	PL	PL	
749	Morowali Utara	83	Kolo	PL	PL	PL	PL	
750	Parigi Moutong	84	Parigi II (Toboli)	PL	PL	PL	PL	
751	Tojo Una-Una	85	Kabalutan	PL	PL	PL	PL	
752	Tojo Una-Una	86	Kalia	PL	PL	PL	PL	
753	Tojo Una-Una	87	Katupat	PL	PL	PL	PL	
754	Tojo Una-Una	88	Kuling Kinan	PL	PL	PL	PL	
755	Tojo Una-Una	89	Labuan	PL	PL	PL	PL	
756	Tojo Una-Una	90	Lebiti	PL	PL	PL	PL	
757	Tojo Una-Una	91	Podi	PL	PL	PL	PL	
758	Toli-Toli	92	Lau Lafang	PL	PL	PL	PL	
759	Toli-Toli	93	Lingian	PL	PL	PL	PL	
760	Toli-Toli	94	L. Salendo	PL	PL	PL	PL	
761	Toli-Toli	95	Ogotua	PL	PL	PL	PL	
762	Toli-Toli	96	Simatang	PL	PL	PL	PL	
763	Toli-Toli	97	Tambu	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
XXVIII. Provinsi Sulawesi Tenggara								
764	Bau-Bau	1	Lakologou	PL	PL	PL	PL	
765	Bau-Bau	2	Lembatan Batu	PL	PL	PL	PL	
766	Bau-Bau	3	Sulaa	PL	PL	PL	PL	
767	Bau-Bau	4	Tarafu	PL	PL	PL	PL	
768	Bombana	5	Bambea	PL	PL	PL	PL	
769	Bombana	6	Batuawu	PL	PL	PL	PL	
770	Bombana	7	Dongkala	PL	PL	PL	PL	
771	Bombana	8	Larete	PL	PL	PL	PL	
772	Bombana	9	Malandahi	PL	PL	PL	PL	
773	Bombana	10	Paria	PL	PL	PL	PL	
774	Bombana	11	Pulau Sagori	PL	PL	PL	PL	
775	Buton	12	Dongkala Pasar Wajo	PL	PL	PL	PL	
776	Buton Selatan	13	Batauga	PL	PL	PL	PL	
777	Buton Selatan	14	Sampolawa	PL	PL	PL	PL	
778	Buton Tengah	15	Lombe	PL	PL	PL	PL	
779	Buton Tengah	16	Mawasangka Induk	PL	PL	PL	PL	
780	Buton Tengah	17	Talaga Besar	PL	PL	PL	PL	
781	Buton Utara	18	Waodeburi/Lelamo	PL	PL	PL	PL	
782	Kendari	19	Soropia	PL	PL	PL	PL	
783	Kolaka	20	Malombo	PL	PL	PL	PL	
784	Kolaka Utara	21	Olo-oloho	PL	PL	PL	PL	
785	Konawe Kepulauan	22	Munse	PL	PL	PL	PL	
786	Konawe Selatan	23	Lainea	PL	PL	PL	PL	
787	Konawe Selatan	24	Torobulu	PL	PL	PL	PL	
788	Muna	25	Tampo	PL	PL	PL	PL	
789	Muna	26	Tondasi	PL	PL	PL	PL	
790	Muna Barat	27	Oempu	PL	PL	PL	PL	
791	Muna Barat	28	Pajala	PL	PL	PL	PL	
792	Muna Barat	29	Tanjung Batu	PL	PL	PL	PL	
793	Wakatobi	30	Papalia	PL	PL	PL	PL	
794	Wakatobi	31	Pulau Kapota	PL	PL	PL	PL	
795	Wakatobi	32	Pulau Runduma	PL	PL	PL	PL	
796	Wakatobi	33	Waha/Usuku	PL	PL	PL	PL	
XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan								
797	Barru	1	Lamuru Kung	PL	PL	PL	PL	
798	Barru	2	Waetuo	PL	PL	PL	PL	
799	Bone	3	Cenrana	PL	PL	PL	PL	
800	Bone	4	Lapangkong/ Salameko	PL	PL	PL	PL	
801	Bone	5	P. Salemo	PL	PL	PL	PL	
802	Bulukumba	6	Butung/Kasuso	PL	PL	PL	PL	
803	Bulukumba	7	Bira/Tanah Beru	PL	PL	PL	PL	
804	Jeneponto	8	Tarowang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
805	Luwu	9	Bawa Salo	PL	PL	PL	PL	
806	Luwu	10	Bone Pute	PL	PL	PL	PL	
807	Luwu	11	Kajang	PL	PL	PL	PL	
808	Luwu	12	Pancana / Pute Angin	PL	PL	PL	PL	
809	Luwu Timur	13	Wotu	PL	PL	PL	PL	
810	Luwu Utara	14	Labuange	PL	PL	PL	PL	
811	Makasar	15	Kayu Bangkoa	PL	PL	PL	PL	
812	Makasar	16	Pulau Barrang Caddi	PL	PL	PL	PL	
813	Makasar	17	Pulau Barrang Lompo	PL	PL	PL	PL	
814	Makasar	18	Pulau Bonetambung	PL	PL	PL	PL	
815	Makasar	19	Pulau Kodingareng	PL	PL	PL	PL	
816	Makasar	20	Pulau Lae-Lae	PL	PL	PL	PL	
817	Makasar	21	Pulau Langkai	PL	PL	PL	PL	
818	Makasar	22	Pulau Samalona	PL	PL	PL	PL	
819	Pangkajene Kepulauan	23	P. Badi	PL	PL	PL	PL	
820	Pangkajene Kepulauan	24	P. Balo-Baloang Lompo	PL	PL	PL	PL	
821	Pangkajene Kepulauan	25	P. Dewakang Lompo	PL	PL	PL	PL	
822	Pangkajene Kepulauan	26	P. Doang-Doangan Lompo	PL	PL	PL	PL	
823	Pangkajene Kepulauan	27	P. Gondong Bali	PL	PL	PL	PL	
824	Pangkajene Kepulauan	28	P. Kapoposang Bali	PL	PL	PL	PL	
825	Pangkajene Kepulauan	29	P. Karangrang	PL	PL	PL	PL	
826	Pangkajene Kepulauan	30	P. Kulambing	PL	PL	PL	PL	
827	Pangkajene Kepulauan	31	P. Langkoitang	PL	PL	PL	PL	
828	Pangkajene Kepulauan	32	P. Pamantauang	PL	PL	PL	PL	
829	Pangkajene Kepulauan	33	P. Samatellu	PL	PL	PL	PL	
830	Pangkajene Kepulauan	34	P. Karumpa	PL	PL	PL	PL	
831	Pangkajene Kepulauan	35	P. Madu	PL	PL	PL	PL	
832	Pangkajene Kepulauan	36	P. Rajuni	PL	PL	PL	PL	
833	Pinrang	37	Langga	PL	PL	PL	PL	
834	Pinrang	38	Ujung Lero	PL	PL	PL	PL	
835	Selayar	39	Appatana	PL	PL	PL	PL	
836	Selayar	40	Bangkala	PL	PL	PL	PL	
837	Selayar	41	Cappasalo /Malangke	PL	PL	PL	PL	
838	Selayar	42	Lampia	PL	PL	PL	PL	
839	Selayar	43	Larompong	PL	PL	PL	PL	
840	Selayar	44	P. Batang Mata	PL	PL	PL	PL	
841	Selayar	45	P. Bembe / Tanamalala	PL	PL	PL	PL	
842	Selayar	46	P. Biropa	PL	PL	PL	PL	
843	Selayar	47	P. Bone Lohe	PL	PL	PL	PL	
844	Selayar	48	P. Kalao	PL	PL	PL	PL	
845	Selayar	49	P. Komba-Komba	PL	PL	PL	PL	
846	Selayar	50	P. Lambego	PL	PL	PL	PL	
847	Selayar	51	P. Padang	PL	PL	PL	PL	
848	Selayar	52	P. Tarupa	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
891	Halmahera Selatan	33	Pulau Tapa	PL	PL	PL	PL	
892	Halmahera Selatan	34	Pulau Widi	PL	PL	PL	PL	
893	Halmahera Selatan	35	Samo	PL	PL	PL	PL	
894	Halmahera Selatan	36	Sawanakar	PL	PL	PL	PL	
895	Halmahera Selatan	37	Sum	PL	PL	PL	PL	
896	Halmahera Selatan	38	Tagono	PL	PL	PL	PL	
897	Halmahera Selatan	39	Taneti	PL	PL	PL	PL	
898	Halmahera Selatan	40	Tatewang	PL	PL	PL	PL	
899	Halmahera Selatan	41	Tawa	PL	PL	PL	PL	
900	Halmahera Selatan	42	Tobalai/Woi	PL	PL	PL	PL	
901	Halmahera Tengah	43	Foya	PL	PL	PL	PL	
902	Halmahera Tengah	44	Mesa	PL	PL	PL	PL	
903	Halmahera Tengah	45	Jikohai	PL	PL	PL	PL	
904	Halmahera Tengah	46	Lelilef	PL	PL	PL	PL	
905	Halmahera Tengah	47	Loleo	PL	PL	PL	PL	
906	Halmahera Tengah	48	P. Sayafi	PL	PL	PL	PL	
907	Halmahera Tengah	49	Sakam/Pat	PL	PL	PL	PL	
908	Halmahera Tengah	50	Umiyal	PL	PL	PL	PL	
909	Halmahera Tengah	51	Waleh	PL	PL	PL	PL	
910	Halmahera Tengah	52	Yoi	PL	PL	PL	PL	
911	Halmahera Timur	53	Akelamo	PL	PL	PL	PL	
912	Halmahera Timur	54	Bilolo	PL	PL	PL	PL	
913	Halmahera Timur	55	Ekor	PL	PL	PL	PL	
914	Halmahera Timur	56	Lolasita	PL	PL	PL	PL	
915	Halmahera Timur	57	Lolobata	PL	PL	PL	PL	
916	Halmahera Timur	58	Maba Pura	PL	PL	PL	PL	
917	Halmahera Timur	59	Patilean/Miyaf	PL	PL	PL	PL	
918	Halmahera Timur	60	Wayamli	PL	PL	PL	PL	
919	Halmahera Timur	61	Woci	PL	PL	PL	PL	
920	Halmahera Utara	62	Asmiro	PL	PL	PL	PL	
921	Halmahera Utara	63	Bataka	PL	PL	PL	PL	
922	Halmahera Utara	64	Cera	PL	PL	PL	PL	
923	Halmahera Utara	65	Daru	PL	PL	PL	PL	
924	Halmahera Utara	66	Gisi	PL	PL	PL	PL	
925	Halmahera Utara	67	Gonga	PL	PL	PL	PL	
926	Halmahera Utara	68	Gurua	PL	PL	PL	PL	
927	Halmahera Utara	69	Kakara	PL	PL	PL	PL	
928	Halmahera Utara	70	Kupa-Kupa	PL	PL	PL	PL	
929	Halmahera Utara	71	Ngajam	PL	PL	PL	PL	
930	Halmahera Utara	72	Pacao	PL	PL	PL	PL	
931	Halmahera Utara	73	Salimuli	PL	PL	PL	PL	
932	Halmahera Utara	74	Sopu	PL	PL	PL	PL	
933	Halmahera Utara	75	Susupu	PL	PL	PL	PL	
934	Halmahera Utara	76	Tanjung Pilawang	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
935	Halmahera Utara	77	Tetewang Kao	PL	PL	PL	PL	
936	Halmahera Utara	78	Tupu-tupu	PL	PL	PL	PL	
937	Halmahera Utara	79	Tutumaleo	PL	PL	PL	PL	
938	Kepulauan Sula	80	Auponhia	PL	PL	PL	PL	
939	Kepulauan Sula	81	Baleha	PL	PL	PL	PL	
940	Kepulauan Sula	82	Bapeno	PL	PL	PL	PL	
941	Kepulauan Sula	83	Baruakol	PL	PL	PL	PL	
942	Kepulauan Sula	84	Fuata	PL	PL	PL	PL	
943	Kepulauan Sula	85	Kabau	PL	PL	PL	PL	
944	Kepulauan Sula	86	Manaf	PL	PL	PL	PL	
945	Kepulauan Sula	87	Pas Ipa	PL	PL	PL	PL	
946	Kepulauan Sula	88	Poheha	PL	PL	PL	PL	
947	Kepulauan Sula	89	Waitina	PL	PL	PL	PL	
948	Kepulauan Sula	90	Wailoba	PL	PL	PL	PL	
949	Kepulauan Sula	91	Waisakai	PL	PL	PL	PL	
950	Pulau Morotai	92	Aru	PL	PL	PL	PL	
951	Pulau Morotai	93	Sangowo	PL	PL	PL	PL	
952	Pulau Morotai	94	Tiley	PL	PL	PL	PL	
953	Pulau Taliabu	95	Bapenu	PL	PL	PL	PL	
954	Pulau Taliabu	96	Gela	PL	PL	PL	PL	
955	Pulau Taliabu	97	Jorjoga	PL	PL	PL	PL	
956	Pulau Taliabu	98	Lede	PL	PL	PL	PL	
957	Pulau Taliabu	99	Nggele	PL	PL	PL	PL	
958	Pulau Taliabu	100	Pancorang	PL	PL	PL	PL	
959	Pulau Taliabu	101	Parigi	PL	PL	PL	PL	
960	Pulau Taliabu	102	Penu	PL	PL	PL	PL	
961	Pulau Taliabu	103	Samuya	PL	PL	PL	PL	
962	Ternate	104	Dufa-Dufa	PL	PL	PL	PL	
963	Ternate	105	Hiri	PL	PL	PL	PL	
964	Ternate	106	Jambula	PL	PL	PL	PL	
965	Ternate	107	Mayau	PL	PL	PL	PL	
966	Ternate	108	Sulamadaha	PL	PL	PL	PL	
967	Tidore Kepulauan	109	Akelamo	PL	PL	PL	PL	
968	Tidore Kepulauan	110	Batulak	PL	PL	PL	PL	
969	Tidore Kepulauan	111	Galala	PL	PL	PL	PL	
970	Tidore Kepulauan	112	Galala Oba	PL	PL	PL	PL	
971	Tidore Kepulauan	113	Guruaping Oba	PL	PL	PL	PL	
972	Tidore Kepulauan	114	Kaiyasa	PL	PL	PL	PL	
973	Tidore Kepulauan	115	Loko Oba	PL	PL	PL	PL	
974	Tidore Kepulauan	116	Lola Oba	PL	PL	PL	PL	
975	Tidore Kepulauan	117	Loleo	PL	PL	PL	PL	
976	Tidore Kepulauan	118	Maftutu	PL	PL	PL	PL	
977	Tidore Kepulauan	119	Maitara	PL	PL	PL	PL	
978	Tidore Kepulauan	120	Mare	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
979	Tidore Kepulauan	121	Sofang	PL	PL	PL	PL	
980	Tidore Kepulauan	122	Somahode	PL	PL	PL	PL	
981	Tidore Kepulauan	123	Wama	PL	PL	PL	PL	
XXXI. Provinsi Maluku								
982	Buru	1	Bilorro	PL	PL	PL	PL	
983	Buru	2	Ilath	PL	PL	PL	PL	
984	Buru	3	Teluk Bara	PL	PL	PL	PL	
985	Buru	4	Teluk Namlea	PL	PL	PL	PL	
986	Buru	5	Waplau	PL	PL	PL	PL	
987	Buru Selatan	6	Ambalu	PL	PL	PL	PL	
988	Buru Selatan	7	Ulima	PL	PL	PL	PL	
989	Buru Selatan	8	Waikeka	PL	PL	PL	PL	
990	Buru Selatan	9	Waimalu	PL	PL	PL	PL	
991	Buru Selatan	10	Waimulang	PL	PL	PL	PL	
992	Buru Selatan	11	Wamsisi	PL	PL	PL	PL	
993	Kepulauan Aru	12	Arus Selatan	PL	PL	PL	PL	
994	Kepulauan Aru	13	Jerol	PL	PL	PL	PL	
995	Kepulauan Aru	14	Kojabi	PL	PL	PL	PL	
996	Kepulauan Aru	15	Longgar	PL	PL	PL	PL	
997	Kepulauan Aru	16	Meror	PL	PL	PL	PL	
998	Kepulauan Aru	17	Mesiang	PL	PL	PL	PL	
999	Kepulauan Aru	18	Taberfane	PL	PL	PL	PL	
1000	Kepulauan Aru	19	Warabal	PL	PL	PL	PL	
1001	Kepulauan Aru	20	Warialau	PL	PL	PL	PL	
1002	Maluku Barat Daya	21	Arwala / Sutilarang	PL	PL	PL	PL	
1003	Maluku Barat Daya	22	Kisar	PL	PL	PL	PL	
1004	Maluku Barat Daya	23	Lelang / P. Sermata	PL	PL	PL	PL	
1005	Maluku Barat Daya	24	Leti	PL	PL	PL	PL	
1006	Maluku Barat Daya	25	Lewa/Dai	PL	PL	PL	PL	
1007	Maluku Barat Daya	26	Luang	PL	PL	PL	PL	
1008	Maluku Barat Daya	27	Ruma Kuda	PL	PL	PL	PL	
1009	Maluku Barat Daya	28	Wetang	PL	PL	PL	PL	
1010	Maluku Tengah	29	Aboru	PL	PL	PL	PL	
1011	Maluku Tengah	30	Besi	PL	PL	PL	PL	
1012	Maluku Tengah	31	Kobisadar	PL	PL	PL	PL	
1013	Maluku Tengah	32	Kumber	PL	PL	PL	PL	
1014	Maluku Tengah	33	Laimu	PL	PL	PL	PL	
1015	Maluku Tengah	34	Makariki	PL	PL	PL	PL	
1016	Maluku Tengah	35	Nasalaut	PL	PL	PL	PL	
1017	Maluku Tengah	36	Nila	PL	PL	PL	PL	
1018	Maluku Tengah	37	Paa	PL	PL	PL	PL	
1019	Maluku Tengah	38	Pasanie	PL	PL	PL	PL	
1020	Maluku Tengah	39	Serua	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1021	Maluku Tengah	40	Tahoku	PL	PL	PL	PL	
1022	Maluku Tengah	41	Teon	PL	PL	PL	PL	
1023	Maluku Tenggara	42	Banda Eli	PL	PL	PL	PL	
1024	Maluku Tenggara	43	Hollat	PL	PL	PL	PL	
1025	Maluku Tenggara	44	Langgiar	PL	PL	PL	PL	
1026	Maluku Tenggara	45	Mun	PL	PL	PL	PL	
1027	Maluku Tenggara	46	Ohoiraut	PL	PL	PL	PL	
1028	Maluku Tenggara	47	Sathean	PL	PL	PL	PL	
1029	Maluku Tenggara	48	Uf Mar/Danar	PL	PL	PL	PL	
1030	Maluku Tenggara	49	Ur Pulau	PL	PL	PL	PL	
1031	Maluku Tenggara	50	Weduar	PL	PL	PL	PL	
1032	Maluku Tenggara Barat	51	Adodo Fordata	PL	PL	PL	PL	
1033	Maluku Tenggara Barat	52	Lingat	PL	PL	PL	PL	
1034	Maluku Tenggara Barat	53	Molu	PL	PL	PL	PL	
1035	Maluku Tenggara Barat	54	Nurkat	PL	PL	PL	PL	
1036	Maluku Tenggara Barat	55	Rumean	PL	PL	PL	PL	
1037	Maluku Tenggara Barat	56	Rumyaan	PL	PL	PL	PL	
1038	Maluku Tenggara Barat	57	Soyanin	PL	PL	PL	PL	
1039	Seram Bagian Barat	58	Ely Besar	PL	PL	PL	PL	
1040	Seram Bagian Barat	59	Hatunuru	PL	PL	PL	PL	
1041	Seram Bagian Barat	60	Kelang	PL	PL	PL	PL	
1042	Seram Bagian Barat	61	Lokki	PL	PL	PL	PL	
1043	Seram Bagian Barat	62	Luhu	PL	PL	PL	PL	
1044	Seram Bagian Barat	63	Pelita Jaya	PL	PL	PL	PL	
1045	Seram Bagian Barat	64	Wailey	PL	PL	PL	PL	
1046	Seram Bagian Barat	65	Waisala/Masika Jaya	PL	PL	PL	PL	
1047	Seram Bagian Timur	66	Air Kasar/Kelimo	PL	PL	PL	PL	
1048	Seram Bagian Timur	67	Kailakat / Kotasiri	PL	PL	PL	PL	
1049	Seram Bagian Timur	68	Kelmuri / Undur	PL	PL	PL	PL	
1050	Seram Bagian Timur	69	P. Manawoka/Amarsikaru	PL	PL	PL	PL	
1051	Tual	70	Pulai Ohoiel	PL	PL	PL	PL	
1052	Tual	71	Pulau Fadof	PL	PL	PL	PL	
1053	Tual	72	Pulau Hirit	PL	PL	PL	PL	
1054	Tual	73	Pulau Kaimer	PL	PL	PL	PL	
1055	Tual	74	Pulau Langgiar	PL	PL	PL	PL	
1056	Tual	75	Pulau Mangur	PL	PL	PL	PL	
1057	Tual	76	Pulau Tam	PL	PL	PL	PL	
1058	Tual	77	Pulau Uut	PL	PL	PL	PL	
1059	Tual	78	Pulau Yamru	PL	PL	PL	PL	
1060	Tual	79	Ufmar Timur	PL	PL	PL	PL	
XXXII. Provinsi Papua Barat								
1061	Fak-fak	1	Bomberai	PL	PL	PL	PL	
1062	Fak-fak	2	Goras (Bomberai)	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1063	Fak-fak	3	Karas	PL	PL	PL	PL	
1064	Fak-fak	4	Sagan	PL	PL	PL	PL	
1065	Fak-fak	5	Selasi	PL	PL	PL	PL	
1066	Fak-fak	6	Teluk Patipi	PL	PL	PL	PL	
1067	Fak-fak	7	Weti/Weri	PL	PL	PL	PL	
1068	Kab. Sorong	8	Kasim	PL	PL	PL	PL	
1069	Kab. Sorong	9	Kiamano	PL	PL	PL	PL	
1070	Kab. Sorong	10	Seget Baru	PL	PL	PL	PL	
1071	Kab. Sorong	11	Sele	PL	PL	PL	PL	
1072	Kaimana	12	Adijaya	PL	PL	PL	PL	
1073	Kaimana	13	Afona	PL	PL	PL	PL	
1074	Kaimana	14	Etna	PL	PL	PL	PL	
1075	Kaimana	15	Lobo	PL	PL	PL	PL	
1076	Kaimana	16	Nofa	PL	PL	PL	PL	
1077	Kaimana	17	P. Adi	PL	PL	PL	PL	
1078	Kaimana	18	Senini	PL	PL	PL	PL	
1079	Kaimana	19	Susunu	PL	PL	PL	PL	
1080	Kaimana	20	Tanggaromi	PL	PL	PL	PL	
1081	Kaimana	21	Kanoka	PL	PL	PL	PL	
1082	Kaimana	22	Teluk Arguni	PL	PL	PL	PL	
1083	Kaimana	23	Waripi (Teluk Etna)	PL	PL	PL	PL	
1084	Manokwari	24	Hopmare	PL	PL	PL	PL	
1085	Manokwari	25	Imbuan	PL	PL	PL	PL	
1086	Manokwari	26	Kwoor	PL	PL	PL	PL	
1087	Manokwari	27	Maruni	PL	PL	PL	PL	
1088	Manokwari	28	Masni	PL	PL	PL	PL	
1089	Manokwari	29	Saubeba	PL	PL	PL	PL	
1090	Manokwari	30	Sowi Mampa	PL	PL	PL	PL	
1091	Manokwari	31	Waibem	PL	PL	PL	PL	
1092	Manokwari	32	Wanden	PL	PL	PL	PL	
1093	Manokwari	33	Warmandi	PL	PL	PL	PL	
1094	Manokwari	34	Wau	PL	PL	PL	PL	
1095	Manokwari	35	Werur	PL	PL	PL	PL	
1096	Raja Am pat	36	Fafanlap	PL	PL	PL	PL	
1097	Raja Ampat	37	Gag	PL	PL	PL	PL	
1098	Raja Ampat	38	Harapan Jaya (Pulau Misol)	PL	PL	PL	PL	
1099	Raja Ampat	39	Kabilol	PL	PL	PL	PL	
1100	Raja Ampat	40	Kapadiri	PL	PL	PL	PL	
1101	Raja Ampat	41	Kofiau	PL	PL	PL	PL	
1102	Raja Ampat	42	Limalas	PL	PL	PL	PL	
1103	Raja Ampat	43	Manyaifun	PL	PL	PL	PL	
1104	Raja Ampat	44	Meosmengkara	PL	PL	PL	PL	
1105	Raja Ampat	45	Mneir	PL	PL	PL	PL	
1106	Raja Ampat	46	Mutus	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1149	Asmat	7	Pirimapun	PL	PL	PL	PL	
1150	Asmat	8	Sawaerma	PL	PL	PL	PL	
1151	Asmat	9	Suator	PL	PL	PL	PL	
1152	Asmat	10	Wowi	PL	PL	PL	PL	
1153	Asmat	11	Yamas	PL	PL	PL	PL	
1154	Asmat	12	Yaosakor	PL	PL	PL	PL	
1155	Biak Numfor	13	Bosnik	PL	PL	PL	PL	
1156	Biak Numfor	14	Kameri	PL	PL	PL	PL	
1157	Biak Numfor	15	Korem	PL	PL	PL	PL	
1158	Biak Numfor	16	Manggari	PL	PL	PL	PL	
1159	Biak Numfor	17	Masram	PL	PL	PL	PL	
1160	Biak Numfor	18	Mbromsi	PL	PL	PL	PL	
1161	Biak Numfor	19	P. Insombabi	PL	PL	PL	PL	
1162	Biak Numfor	20	Padaido	PL	PL	PL	PL	
1163	Biak Numfor	21	Samber	PL	PL	PL	PL	
1164	Biak Numfor	22	Saribi	PL	PL	PL	PL	
1165	Biak Numfor	23	Wundi	PL	PL	PL	PL	
1166	Boven Digul	24	Ampera	PL	PL	PL	PL	
1167	Boven Digul	25	Anggamburan	PL	PL	PL	PL	
1168	Boven Digul	26	Boma	PL	PL	PL	PL	
1169	Boven Digul	27	Getenteri	PL	PL	PL	PL	
1170	Boven Digul	28	Mindiptanah	PL	PL	PL	PL	
1171	Boven Digul	29	Tanah Merah	PL	PL	PL	PL	
1172	Boven Digul	30	Ikisi	PL	PL	PL	PL	
1173	Jayapura	31	Demta	PL	PL	PL	PL	
1174	Jayapura	32	Holtekam	PL	PL	PL	PL	
1175	Jayapura	33	Muara Tami	PL	PL	PL	PL	
1176	Mamberamo Raya	34	Bagusa	PL	PL	PL	PL	
1177	Mamberamo Raya	35	Bariworo	PL	PL	PL	PL	
1178	Mappi	36	Kanami	PL	PL	PL	PL	
1179	Mappi	37	Kepi	PL	PL	PL	PL	
1180	Mappi	38	Tagemon	PL	PL	PL	PL	
1181	Merauke	39	Bupul	PL	PL	PL	PL	
1182	Merauke	40	Buraka	PL	PL	PL	PL	
1183	Merauke	41	Cabang Tiga	PL	PL	PL	PL	
1184	Merauke	42	Erambu	PL	PL	PL	PL	
1185	Merauke	43	Kaptel/Bian	PL	PL	PL	PL	
1186	Merauke	44	Kumbe	PL	PL	PL	PL	
1187	Merauke	45	Muting	PL	PL	PL	PL	
1188	Merauke	46	Okaba	PL	PL	PL	PL	
1189	Merauke	47	Semangga	PL	PL	PL	PL	
1190	Merauke	48	Tanah Miring	PL	PL	PL	PL	
1191	Merauke	49	Wanam	PL	PL	PL	PL	
1192	Mimika	50	Agimuga	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1193	Mimika	51	Amar	PL	PL	PL	PL	
1194	Mimika	52	Atuka	PL	PL	PL	PL	
1195	Mimika	53	Ayuka	PL	PL	PL	PL	
1196	Mimika	54	Hiripau	PL	PL	PL	PL	
1197	Mimika	55	Huta	PL	PL	PL	PL	
1198	Mimika	56	Kapiraya	PL	PL	PL	PL	
1199	Mimika	57	Kokonao	PL	PL	PL	PL	
1200	Mimika	58	Manasari	PL	PL	PL	PL	
1201	Mimika	59	Mitro Baru	PL	PL	PL	PL	
1202	Mimika	60	Mupuruka	PL	PL	PL	PL	
1203	Mimika	61	Otakwa	PL	PL	PL	PL	
1204	Mimika	62	Paraoka	PL	PL	PL	PL	
1205	Mimika	63	Petawai Buru	PL	PL	PL	PL	
1206	Mimika	64	Pomako Dua	PL	PL	PL	PL	
1207	Mimika	65	Urumuga	PL	PL	PL	PL	
1208	Mimika	66	Uta	PL	PL	PL	PL	
1209	Nabire	67	Kuatisora	PL	PL	PL	PL	
1210	Nabire	68	Napan	PL	PL	PL	PL	
1211	Nabire	69	P. Mambor	PL	PL	PL	PL	
1212	Nabire	70	P. Moor	PL	PL	PL	PL	
1213	Sarmi	71	Anus	PL	PL	PL	PL	
1214	Sarmi	72	Armo	PL	PL	PL	PL	
1215	Sarmi	73	Armopa	PL	PL	PL	PL	
1216	Sarmi	74	Betaf	PL	PL	PL	PL	
1217	Sarmi	75	D. Rombebai	PL	PL	PL	PL	
1218	Sarmi	76	Liki	PL	PL	PL	PL	
1219	Sarmi	77	Kasonaweja	PL	PL	PL	PL	
1220	Sarmi	78	Kebiti	PL	PL	PL	PL	
1221	Sarmi	79	Matabor	PL	PL	PL	PL	
1222	Sarmi	80	Takar	PL	PL	PL	PL	
1223	Sarmi	81	Puiway	PL	PL	PL	PL	
1224	Sarmi	82	Trimuris	PL	PL	PL	PL	
1225	Sarmi	83	Wakde	PL	PL	PL	PL	
1226	Sarmi	84	Yamna	PL	PL	PL	PL	
1227	Supiori	85	Miosbipondi	PL	PL	PL	PL	
1228	Supiori	86	P. Mapia	PL	PL	PL	PL	
1229	Supiori	87	Sowek	PL	PL	PL	PL	
1230	Supiori	88	Wardo	PL	PL	PL	PL	
1231	Waropen	89	Koweda	PL	PL	PL	PL	
1232	Waropen	90	P. Nauw	PL	PL	PL	PL	
1233	Waropen	91	Sungai Sanggei	PL	PL	PL	PL	
1234	Waropen	92	Sungai Waren	PL	PL	PL	PL	
1235	Waropen	93	Wapoga	PL	PL	PL	PL	
1236	Yahukimo	94	Dekai	PL	PL	PL	PL	

No.	RENCANA LOKASI DAN HIERARKI PELABUHAN							KET
	Kabupaten / Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan				
				2011	2015	2020	2030	
1237	Yapen	95	Ambai	PL	PL	PL	PL	
1238	Yapen	96	Ampimoi	PL	PL	PL	PL	
1239	Yapen	97	Angkaisera	PL	PL	PL	PL	
1240	Yapen	98	Kabuena	PL	PL	PL	PL	
1241	Yapen	99	Kurudu	PL	PL	PL	PL	
1242	Yapen	100	Miosnum	PL	PL	PL	PL	
1243	Yapen	101	Randawaya	PL	PL	PL	PL	
1244	Yapen	102	Sumberbaba	PL	PL	PL	PL	
1245	Yapen	103	Wainapi	PL	PL	PL	PL	
1246	Yapen	104	Wooi	PL	PL	PL	PL	

LAMPIRAN A4
LOKASI TERMINAL UMUM (BAGIAN DARI PELABUHAN)

No.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL UMUM		
	Kabupaten / Kota	No.	Terminal Umum
I. Provinsi Aceh			
-	-	-	-
II. Provinsi Sumatera Utara			
1	Batu bara	1	Terminal Multipurpose Kuala Tanjung
2	Medan	2	Terminal Petikemas Belawan Fase 1
3	Medan	3	Terminal Petikemas Belawan Fase 2
III. Provinsi Sumatera Barat			
-	-	-	-
IV. Provinsi Kepulauan Riau			
4	Batam	1	Kabil
5	Batam	2	Nongsa
6	Batam	3	Sekupang
7	Batam	4	Telaga Punggur
8	Batam	5	Batam Center
9	Batam	6	Harbour Bay
10	Tanjung Pinang	7	Balai Adat Indra Sakti
11	Tanjung Pinang	8	Batu Anam
12	Batam	9	STS Perairan Nipah-Pulau Sambu
13	Batam	10	STS Perairan Selat Durian-Pulau Sambu
14	Karimun	11	STS Tanjung Balai Karimun
V. Provinsi Riau			
-	-	-	-
VI. Provinsi Bengkulu			
-	-	-	-
VII. Provinsi Jambi			
15	Muaro Jambi	1	Terminal Petikemas Muaro Jambi
VIII. Provinsi Sumatera Selatan			
16	Banyuasin	1	Tanjung Carat
IX. Provinsi Bangka Belitung			
-	-	-	-
X. Provinsi Lampung			
-	-	-	-

No.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL UMUM		
	Kabupaten / Kota	No.	Terminal Umum
XI. Provinsi Banten			
17	Cilegon	1	Terminal Multipurpose KBS Cigading
XII. Provinsi Jawa Barat			
-	-	-	-
XIII. Provinsi DKI Jakarta			
18	Jakarta Utara	1	Terminal Petikemas Kalibaru
19	Jakarta Utara	2	Terminal Umum KCN Marunda
20	Jakarta Utara	3	Terminal Tarumanegara
XIV. Provinsi Jawa Tengah			
-	-	-	-
XV. Provinsi Jawa Timur			
21	Gresik	1	Manyar
22	Gresik	2	Terminal Multipurpose Teluk Lamong
23	Bangkalan	3	Socah
24	Bangkalan	4	Tanjung Bulu Pandan
XVI. Provinsi Bali			
-	-	-	-
XVII. Provinsi Nusa Tenggara Barat			
25	Bima	1	Oituiwera
XVIII. Provinsi Nusa Tenggara Timur			
26	Sumba Timur	1	Pelra Waingapu
XIX. Provinsi Kalimantan Barat			
27	Mempawah	1	Kijing Sei Kuyit
28	Mempawah	2	Terminal Pontianak Baru (Jungkat)
29	Pontianak	3	Terminal Jeruju (Indo Kontainer Sarana)
XX. Provinsi Kalimantan Tengah			
-	-	-	-
XXI. Provinsi Kalimantan Utara			
30	Nunukan	1	Liem Hie Jung
XXII. Provinsi Kalimantan Selatan			
31	Banjarmasin	-	STS Banjarmasin

No.	PENETAPAN LOKASI TERMINAL UMUM		
	Kabupaten / Kota	No.	Terminal Umum
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur			
32	Balikpapan	1	Kariangau
33	Samarinda	2	Palaran
34	Kutai Kertanegara	3	STS Muara Jawa
35	Samarinda	4	STS Muara Berau
XXIV. Provinsi Sulawesi Utara			
-	-	-	-
XXV. Provinsi Gorontalo			
-	-	-	-
XXVI. Provinsi Sulawesi Barat			
-	-	-	-
XXVII. Provinsi Sulawesi Tengah			
-	-	-	-
XXVIII. Provinsi Sulawesi Tenggara			
-	-	-	-
XXIX. Provinsi Sulawesi Selatan			
36	Makassar	1	Terminal Petikemas Makassar New Port
XXX. Provinsi Maluku Utara			
-	-	-	-
XXXI. Provinsi Maluku			
-	-	-	-
XXXII. Provinsi Papua Barat			
-	-	-	-
XXXIII. Provinsi Papua			
-	-	-	-

SUB LAMPIRAN A5
PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI
ANGKUTAN PENYEBERANGAN

No.	Nama Pelabuhan penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
1 Aceh				
1	Balohan	Kota Sabang	Operasi	KELAS I
2	Ulee lheu	Kota Banda Aceh	Operasi	KELAS I
3	Lamteng	Kab. Kab. Aceh Besar	Operasi	KELAS I
4	Meulaboh	Kab. Aceh Barat	Operasi	KELAS I
5	Labuhan Haji	Kab. Aceh Selatan	Operasi	KELAS I
6	Sinabang	Kab. Simeuleu	Operasi	KELAS II
7	Singkil	Kab. Aceh Singkil	Operasi	KELAS I
8	Pulau Banyak	Kab. Aceh Singkil	Operasi	KELAS II
9	Sibigo	Kab. Simeulue	Rencana	KELAS III
2 Sumatera Utara				
1	Sibolga	Sibolga	Operasi	KELAS I
2	Gunungsitoli	Kab. Nias	Rencana	KELAS I
3	Teluk Dalam	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS I
4	Pulau Telo	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS III
5	Tanah Massa	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS III
6	Tanah Balla	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS III
7	Pulau Pini	Kab. Nias Selatan	Rencana	KELAS III
8	Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	Rencana	KELAS III
9	Pulau Berhala	Kab. Serdang Bedagai	Rencana	KELAS III
10	Natal	Kab. Mandailing Natal	Rencana	KELAS II
3 Sumatera Barat				
1	Teluk Bungus	Kota. Padang	Operasi	KELAS I
2	Siberut	Kab. Kepulauan Mentawai	Operasi	KELAS III
3	Tua Pejat	Kab. Kepulauan Mentawai	Operasi	KELAS III
4	Sikakap	Kab. Kepulauan Mentawai	Operasi	KELAS II
5	Pagai Selatan	Kab. Kepulauan Mentawai	Rencana	KELAS III
6	Sinakak/Carocok	Kab. Kepulauan Mentawai	Rencana	KELAS III
7	Sikabalu	Kab. Kepulauan Mentawai	Rencana	KELAS III
8	Sagitci	Kab. Kepulauan Mentawai	Rencana	KELAS III
4 Kepulauan Riau				
1	Tanjung Balai Karimun	Kab. Karimun	Operasi	KELAS I
2	Telaga Punggur	Kota Batam	Operasi	KELAS I
3	Tanjung Uban	Kab. Bintan	Operasi	KELAS I
4	Dabo/Jagoh	Kab. Lingga	Operasi	KELAS II
5	Dompok/Tanjung Pinang	Kabupaten Bintan	Operasi	KELAS II
6	Selat Belia	Kabupaten Karimun	Operasi	KELAS II
7	Pulau Lingga/Penarik	Kepulauan Riau/Kab. Lingga	Operasi	KELAS II
8	Matak	Kab. Anambas	Rencana	KELAS I
9	Selat Lampah / Penagi	Kab. Natuna	Rencana	KELAS I
10	Tambelan	Kab. Natuna	Rencana	KELAS I

No.	Nama Pelabuhan penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
11	Serasan	Kab. Natuna	Rencana	KELAS III
12	Tarempa	Kab. Natuna	Rencana	KELAS I
13	Sebangka	Kab. Lingga	Rencana	KELAS III
14	Pulau Letung	Kab. Natuna	Rencana	KELAS I
15	Sedanau	Kab. Natuna	Rencana	KELAS II
5	Riau			
1	Air Putih/Bengkalis	Kab. Bengkalis	Operasi	KELAS II
2	Mengkapan	Kab. Siak	Operasi	KELAS I
3	Rupat	Kab. Bengkalis	Operasi	KELAS II
4	Sei Selari	Kab. Siak	Operasi	KELAS II
5	Kampung Balak	Kab. Bengkalis	Operasi	KELAS I
6	Dumai	Kota Dumai	Operasi	KELAS I
7	Pecah Buyung	Kab. Bengkalis	Rencana	KELAS II
8	Pulau Padang	Kab. Bengkalis	Rencana	KELAS II
9	Sei Guntung	Kab. Siak	Rencana	KELAS II
10	Alai Insit	Kab. Siak	Rencana	KELAS II
11	Kuala Enok	Kab. Indragiri Hilir	Rencana	KELAS II
12	P. Burung	Kab. Indragiri Hilir	Rencana	KELAS III
13	Meranti Bunting	Kab. Kepulauan Meranti	Rencana	KELAS III
14	Pulau Merbau	Kab. Kepulauan Meranti	Rencana	KELAS III
15	Dakal	Kab. Kepulauan Meranti	Rencana	KELAS III
16	Ketam Putih	Kab. Bengkalis	Rencana	KELAS III
17	Tanjung Medang	Kab. Bengkalis	Rencana	KELAS III
6	Sumatera Selatan			
1	Tanjung Api-Api	Kab. Banyuasin	Operasi	KELAS I
7	Jambi			
1	Kuala Tungkal	Kab. Tanjung Jabung Barat	Operasi	KELAS I
2	Tanah Tumbuh	Kab. Bungo	Rencana	KELAS III
8	Bengkulu			
1	Pulau Baai	Kota Bengkulu	Operasi	KELAS I
2	Kahyapu	Kab. Bengkulu Utara	Operasi	KELAS III
3	Mukomuko	Kab. Mukomuko	Rencana	KELAS I
4	Linau	Kab. Kaur	Rencana	KELAS III
5	Ketahun	Kab. Bengkulu Utara	Rencana	KELAS III
6	Bado	Kab. Bengkulu Tengah	Rencana	KELAS III
9	Lampung			
1	Bakauheni	Kab. Lampung Selatan	Operasi	KELAS I
2	Ketapang (Lampung)	Kab. Lampung Selatan	Rencana	KELAS I
3	Tabuan	Kab. Lampung Selatan	Rencana	KELAS III
4	Madang	Kab. Tanggamus	Rencana	KELAS III
5	Pulau Sebesi	Kab. Lampung Selatan	Rencana	KELAS III
6	Canti	Kab. Lampung Selatan	Rencana	KELAS III
7	Teluk Betung	Kota Bandar Lampung	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
10 Bangka Belitung				
1	Muntok/Tanjung Kalian	Kab. Bangka Selatan	Operasi	KELAS I
2	Sadal	Kab. Bangka Selatan	Operasi	KELAS I
3	Tanjung RU	Kab. Belitung	Operasi	KELAS I
4	Manggar	Kab. Belitung Timur	Operasi	KELAS I
5	Pulau Lepar	Kab. Bangka Selatan	Rencana	KELAS III
6	Mendanau	Kab. Belitung	Rencana	KELAS II
7	Sungai Selan	Kab. Bangka Tengah	Rencana	KELAS III
8	Pulau Besar	Kab. Bangka Tengah	Rencana	KELAS III
9	Tanjung Pura	Kab. Bangka Selatan	Rencana	KELAS III
10	Gersik	Kab. Belitung	Rencana	KELAS III
11	Tanjung Nyato	Kab. Belitung	Rencana	KELAS III
12	Teluk Gembira	Kab. Belitung	Rencana	KELAS III
13	Seliu	Kab. Belitung	Rencana	KELAS III
14	Belinyu	Kab. Bangka	Rencana	KELAS III
15	Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Rencana	KELAS II
11 DKI Jakarta				
1	Pulau Tidung	Kab. Kepulauan Seribu	Rencana	KELAS III
2	Pulau Kelapa	Kab. Kepulauan Seribu	Rencana	KELAS III
3	Pulau Pramuka	Kab. Kepulauan Seribu	Rencana	KELAS III
4	Pulau Untung Jawa	Kab. Kepulauan Seribu	Rencana	KELAS III
5	Muara Angke	Kota Jakarta Utara	Rencana	KELAS II
12 Jawa Barat				
1	Majingklak	Pangandaran	Operasi	KELAS II
13 Jawa Tengah				
1	Kendal	Kab. Kendal	Operasi	KELAS I
2	Jepara	Kab. Jepara	Operasi	KELAS I
3	Karimun Jawa	Kab. Jepara	Operasi	KELAS III
4	Parang	Kab. Jepara	Rencana	KELAS III
5	Genting	Kab. Jepara	Rencana	KELAS III
6	Nyamuk	Kab. Jepara	Rencana	KELAS III
14 Jawa Timur				
1	Paciran	Kab. Lamongan	Operasi	KELAS I
2	Bawean	Kab. Gresik	Operasi	KELAS II
3	Kamal	Kab. Bangkalan	Operasi	KELAS I
4	Ujung	Kota Surabaya	Operasi	KELAS I
5	Kalianget	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
6	Jangkar	Kab. Situbondo	Operasi	KELAS III
7	Sapeken	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
8	Pulau Raas	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
9	Kangean	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
10	Sapudi	Kab. Sumenep	Operasi	KELAS III
11	Ketapang	Kab. Banyuwangi	Operasi	KELAS I
12	Gili Ketapang	Kab. Probolinggo	Rencana	KELAS III

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
13	Probolinggo	Kab. Probolinggo	Rencana	KELAS II
14	Pulau Poteran	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III
15	Pulau Masalembu	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III
16	Pulau Sepanjang	Kab. Sumenep	Rencana	KELAS III
15	Banten			
1	Merak	Kab. Serang	Operasi	KELAS I
2	Margagiri (Banten)	Kab. Serang	Rencana	KELAS I
16	Bali			
1	Gilimanuk	Kab. Jembrana	Operasi	KELAS I
2	Padang Bai	Kab. Karangasem	Operasi	KELAS I
3	Nusa Penida	Kab. Klungkung	Operasi	KELAS III
4	Gunaksa	Kab. Klungkung	Rencana	KELAS I
5	Singaraja	Kab. Buleleng	Rencana	KELAS II
17	NTB			
1	Lembar	Kab. Lombok Barat	Operasi	KELAS I
2	Kayangan	Kab. Lombok Timur	Operasi	KELAS I
3	Pototano	Kab. Sumbawa Barat	Operasi	KELAS I
4	Sape	Kab. Sumbawa Barat	Operasi	KELAS I
5	Sekotong	Kab. Lombok Barat	Rencana	KELAS II
6	Telong Elong	Kab. Lombok Timur	Rencana	KELAS II
7	Benete	Kab. Sumbawa Barat	Rencana	KELAS II
8	Senggigi	Kab. Lombok Barat	Rencana	KELAS II
9	Tawun	Kab. Lombok Barat	Rencana	KELAS II
10	Teluk Santong	Kab. Sumbawa	Rencana	KELAS II
11	Bima	Kab. Bima	Rencana	KELAS II
12	Calabai	Kab. Dompu	Rencana	KELAS II
13	Labuan Kenanga	Kab. Bima	Rencana	KELAS II
14	Empang	Kab. Sumbawa	Rencana	KELAS II
15	Waworoda	Kab. Bima	Rencana	KELAS II
16	Cempi	Kab. Dompu	Rencana	KELAS II
17	Pulau Moyo	Kab. Bima	Rencana	KELAS III
18	Lua Air	Kab. Bima	Rencana	KELAS III
18	NTT			
1	Waikelo	Kab. Sumba Barat Daya	Operasi	KELAS II
2	Labuan Bajo	Kab. Manggarai Barat	Operasi	KELAS I
3	Aimere	Kab. Ngada	Operasi	KELAS I
4	Waingapu	Kab. Sumba Timur	Operasi	KELAS II
5	Marapokot	Kab. Nagekeo	Operasi	KELAS I
6	Seba	Kab. Sabu Raijua	Operasi	KELAS I
7	Bolok	Kab. Kupang	Operasi	KELAS I
8	Kalabahi	Kab. Alor	Operasi	KELAS I
9	Teluk Gurita	Kab. Belu	Operasi	KELAS I
10	Hansisi	Kab. Kupang	Operasi	KELAS III
11	Adonara	Kab. Flores Timur	Operasi	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
12	Pulau Solor	Kab. Flores Timur	Operasi	KELAS II
13	Pantai Baru/Rote	Kab. Rote Ndao	Operasi	KELAS III
14	Ndao	Kab. Rote Ndao	Operasi	KELAS II
15	Kewapante	Kab. Sikka	Operasi	KELAS II
16	Pamana	Kab. Sikka	Operasi	KELAS II
17	Nangakeo	Kab. Ende	Operasi	KELAS II
18	Baranusa	Kab. Alor	Operasi	KELAS I
19	Waiwerang	Kab. Flores Timur	Operasi	KELAS I
20	Larantuka	Kab. Flores Timur	Operasi	KELAS I
21	Lewoleba	Kab. Lembata	Operasi	KELAS II
22	Raijua	Kab. Rote Ndao	Rencana	KELAS II
23	Waibalun	Kab. Flores Timur	Rencana	KELAS III
24	P. Ende	Kab. Ende	Rencana	KELAS II
25	Wairiang	Kab. Lembata	Rencana	KELAS III
26	Mulez	Kab. Manggarai Timur	Rencana	KELAS III
27	Waiwole	Kab. Manggarai Timur	Rencana	KELAS III
28	Terang	Kab. Manggarai Barat	Rencana	KELAS III
29	longos	Kab. Manggarai Barat	Rencana	KELAS III
30	Kadajoi	Kab. Sikka	Rencana	KELAS III
31	Sukun	Kab. Sikka	Rencana	KELAS III
32	Maritaing	Kab. Alor	Rencana	KELAS I
33	Bakalang	Kab. Alor	Rencana	KELAS II
34	Wini	Kab. Timor Tengah Utara	Rencana	KELAS II
35	Naikliu	Kab. Kupang	Rencana	KELAS II
36	Alumang	Kab. Alor	Rencana	KELAS III
19	KALIMANTAN BARAT			
1	Telok Kalong	Kab. Sambas	Operasi	KELAS II
2	Tanjung Harapan	Kab. Sambas	Operasi	KELAS II
3	Rasau Jaya	Kab. Kubu Raya	Operasi	KELAS I
4	Pinang Luar	Kab. Kubu Raya	Operasi	KELAS II
5	Teluk Batang	Kab. Kayong Utara	Operasi	KELAS III
6	Parit Sarem	Kab. Kubu Raya	Operasi	KELAS III
7	Sungai Nipah	Kab. Kubu Raya	Operasi	KELAS III
8	Ketapang	Kab. Ketapang	Operasi	KELAS I
9	Sintete	Kab. Sambas	Rencana	KELAS I
10	Pulau Maya	Kab. Kayong Utara	Rencana	KELAS II
11	Karimata	Kayong Utara	Rencana	KELAS III
12	Sedau Singkawang	Kota Singkawang	Rencana	KELAS II
13	Sekadau	Kab. Sekadau	Rencana	KELAS III
20	Kalimantan Tengah			
1	Kumai	Kab. Kota Waringin Barat	Operasi	KELAS I
2	Bahaur	Kab. Kapuas	Rencana	KELAS I
3	Jelapat	Kab. Barito Kuala	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
21 Kalimantan Selatan				
1	Batulicin	Kab. Tanah Bumbu	Operasi	KELAS I
2	Tanjung Serdang	Kab. Kota Baru	Operasi	KELAS II
3	Pulau Laut Timur	Kab. Kota Baru	Operasi	KELAS II
4	Sebuku	Kab. Kota Baru	Rencana	KELAS II
5	Pandalaman	Kab. Kota Baru	Rencana	KELAS II
22 Kalimantan Timur				
1	Kariangau	Kota Balikpapan	Operasi	KELAS I
2	Penajam	Kab. Penajam Paser Utara	Operasi	KELAS I
3	Desa Sakka	Kab. Kutai Timur	Rencana	KELAS III
4	Tenggarong	Kab. Kutai Barat	Rencana	KELAS II
5	S. Meriam	Kab. Kutai Barat	Rencana	KELAS III
6	Handil II	Kab. Kutai Barat	Rencana	KELAS III
7	Gunung Tabur	Kab. Berau	Rencana	KELAS III
23 Kalimantan Utara				
1	Juwata Laut / Tarakan	Kota Tarakan	Operasi	KELAS I
2	Ancam	Kota Tarakan	Operasi	KELAS II
3	Sebatik	Kab. Nunukan	Operasi	KELAS II
4	Simanggaris	Kab. Nunukan	Operasi	KELAS II
5	Sei Jepun	Kab. Nunukan	Rencana	KELAS II
6	Liang Bunyu	Kota Tarakan	Rencana	KELAS II
7	Pulau Bunyu	Kab. Bulungan	Rencana	KELAS II
24 Sulawesi Utara				
1	Amurang	Kab. Minahasa Selatan	Operasi	KELAS I
2	Melonguane	Kab. Kep. Talaud	Operasi	KELAS II
3	Pananaru	Kab. Kep. Sangihe	Operasi	KELAS II
4	Marore	Kab. Kep. Sangihe	Operasi	KELAS III
5	Likupang	Kab. Minahasa Utara	Operasi	KELAS II
6	Bitung	Kota Bitung	Operasi	KELAS I
7	Siau	Kab. Kep. Sitaro	Operasi	KELAS II
8	Lembeh	Kota Bitung	Operasi	KELAS III
9	Biaro	Kab. Kep. Sitaro	Operasi	KELAS II
10	Tagulandang	Kab. Kep. Sitaro	Operasi	KELAS III
11	Musi	Kab. Kep. Talaud	Operasi	KELAS III
12	Marampit	Kab. Kep. Talaud	Operasi	KELAS III
13	Kabaruan	Kab. Kep. Talaud	Operasi	KELAS II
14	Miangas	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS I
15	Kawaluso	Kab. Kep. Sangihe	Rencana	KELAS III
16	Bunaken	Kota Manado	Rencana	KELAS III
17	Siladen	Kota Manado	Rencana	KELAS III
18	Talise	Kab. Minahasa Utara	Rencana	KELAS III
19	Manado Tua	Kota Manado	Rencana	KELAS III
20	Mangarang	Kab. Kep. Talaud	Rencana	KELAS III
21	Molibagu	Kab. Bolaang Mongindow Selatan	Rencana	KELAS II
22	Makalehi	Kab. Kep. Sitaro	Rencana	KELAS III

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
27	Sulawesi Selatan			
1	Garongkong	Kab. Barru	Operasi	KELAS I
2	Siwa	Kab. Siwa	Operasi	KELAS I
3	Bajo'e	Kab. Bone	Operasi	KELAS I
4	Bira	Kab. Bulukumba	Operasi	KELAS I
5	Pattumbukan	Kab. Selayar	Operasi	KELAS II
6	Pamatata	Kab. Selayar	Operasi	KELAS II
7	Timampu	Kab. Sidrap	Operasi	KELAS III
8	Beau	Kab. Sidrap	Rencana	KELAS III
9	Kayuadi	Kab. Selayar	Rencana	KELAS III
10	Bonerate	Kab. Selayar	Rencana	KELAS III
11	Kalatoa	Kab. Selayar	Rencana	KELAS III
12	Munte	Kab. Luwu Utara	Rencana	KELAS III
13	Sinjai/Pasimaranu	Kota Sinjai	Rencana	KELAS III
14	Gangga	Kab. Gowa	Rencana	KELAS III
15	Takalar	Kab. Takalar	Rencana	KELAS III
16	Jampea	Kab. Selayar	Rencana	KELAS III
28	Sulawesi Barat			
1	Mamuju	Kab. Mamuju	Operasi	KELAS I
2	Pasangkayu	Kab. Mamuju Utara	Rencana	KELAS II
3	Balabalakang	Kab. Mamuju	Rencana	KELAS II
29	Sulawesi Tenggara			
1	Lasusua	Kab. Kolaka Utara	Operasi	KELAS I
2	Kolaka	Kab. Kolaka	Operasi	KELAS I
3	Lenggara	Kab. Kendari	Operasi	KELAS II
4	Kendari	Kota Kendari	Operasi	KELAS II
5	Torobulu	Kab. Konawe Selatan	Operasi	KELAS II
6	Wawonii	Kab. Konawe Kepulauan	Operasi	KELAS II
7	Tolandona	Kab. Buton	Operasi	KELAS II
8	Dongkala	Kab. Bombana	Operasi	KELAS II
9	Tondasi	Kab. Muna	Operasi	KELAS II
10	Baubau	Kota Baubau	Operasi	KELAS II
11	Tampo	Kab. Muna	Operasi	KELAS II
12	Waara	Kab. Buton Tengah	Operasi	KELAS II
13	Mawasangka	Kab. Buton Tengah	Operasi	KELAS II
14	Kamaru	Kab. Buton	Operasi	KELAS II
15	Amalengo	Kab. Konawe Selatan	Operasi	KELAS II
16	Labuan	Kab. Buton	Operasi	KELAS II
17	Wanci	Kab. Wakatobi	Rencana	KELAS II
18	Sikeli	Sulawesi Tenggara/Bombana	Rencana	KELAS II
19	Bambea/Bombana	Kab. Bombana	Rencana	KELAS II
20	Raha	Kab. Muna	Rencana	KELAS II
21	Pure	Kab. Muna	Rencana	KELAS II
22	Siompu	Kab. Buton Selatan	Rencana	KELAS II
23	Kasipute	Kab. Bombana	Rencana	KELAS II
24	Konawe Utara	Kab. Konawe Utara	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
25	Kaledupa	Kab. Wakatobi	Rencana	KELAS II
26	Tomia/Tomea	Kab. Wakatobi	Rencana	KELAS II
27	Binongko	Kab. Wakatobi	Rencana	KELAS II
28	P. Siompu	Kab. Buton Selatan	Rencana	KELAS III
29	P. Batu Atas	Kab. Buton Tengah	Rencana	KELAS III
30	P. Kadatua	Kab. Buton Selatan	Rencana	KELAS III
31	P. Talaga	Kab. Buton Tengah	Rencana	KELAS III
32	P. Gala	Kab. Muna Barat	Rencana	KELAS III
33	P. Katela	Kab. Muna Barat	Rencana	KELAS III
34	Laonti	Kab. Konawe Selatan	Rencana	KELAS II
35	Liana Banggai	Buton Barat	Rencana	KELAS II
30	Maluku			
1	Namlea	Kab. Buru	Operasi	KELAS I
2	Ambalau	Kab. Buru Selatan	Operasi	KELAS II
3	Teluk Bara	Kab. Buru	Operasi	KELAS I
4	Galala	Kota Ambon	Operasi	KELAS II
5	Poka	Kota Ambon	Operasi	KELAS II
6	Geser	Kab. Seram Bagian Timur	Operasi	KELAS I
7	Waipirit	Kab. Seram Bagian Barat	Operasi	KELAS I
8	Waisala	Kab. Seram Bagian Barat	Operasi	KELAS II
9	Wahai	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS I
10	Hunimua	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS I
11	Waeriang	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS II
12	Saparua	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS II
13	Jazirah Salahutu	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS II
14	Letwurung	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
15	Lakor	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
16	Kisar	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
17	Ilwaki	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
18	Haruku	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS I
19	Tepa	Kab. Maluku Barat Daya	Operasi	KELAS I
20	Nusa Laut	Kab. Maluku Tengah	Operasi	KELAS II
21	Larat	Kab. Maluku Tenggara Barat	Operasi	KELAS I
22	Saumlaki	Kab. Maluku Tenggara Barat	Operasi	KELAS I
23	Pulau Tayandu	Kota Tual	Operasi	KELAS I
24	Tual	Kota Tual	Operasi	KELAS I
25	Dobo	Kab. Aru	Operasi	KELAS I
26	Benjina	Kab. Aru	Operasi	KELAS I
27	Lamerang	Kab. Aru	Operasi	KELAS III
28	Airmanang	Kab. Seram Bagian Timur	Operasi	KELAS I
29	Amahai	Kab. Seram Bagian Timur	Operasi	KELAS II
30	Gorom	Kab. Seram Bagian Timur	Operasi	KELAS I
31	Tior	Kab. Seram Bagian Timur	Rencana	KELAS II
32	Kesui	Kab. Seram Bagian Timur	Rencana	KELAS III
33	Wailey	Kab. Seram Bagian Barat	Rencana	KELAS II
34	Waai	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II
35	Umeputi	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
36	Nalahia	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS III
37	Tulehu	Kota Ambon	Rencana	KELAS II
38	Iiath	Kab. Buru	Rencana	KELAS III
39	Ambalau	Kab. Buru Selatan	Rencana	KELAS III
40	Namrole	Kab. Buru Selatan	Rencana	KELAS III
41	Inamarina	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS III
42	Tehoru	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II
43	Banda	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II
44	Leihitu	Kab. Maluku Tengah	Rencana	KELAS II
45	Faan	Kab. Maluku Tenggara	Rencana	KELAS II
46	Pulau Sermata	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS I
47	Serwaru	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS I
48	Leti	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS I
49	Moa	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS I
50	Damer	Kab. Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS III
51	Pulau Lirang	Maluku Barat Daya	Rencana	KELAS III
52	Elat	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS II
53	Sera	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS II
54	Yaru	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS III
55	Wunlah	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS III
56	Seira	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS III
57	Adaut	Kab. Maluku Tenggara Barat	Rencana	KELAS II
58	Ohoiraut	Kab. Maluku Tenggara	Rencana	KELAS III
59	Pulau Kur	Kota Tual	Rencana	KELAS I
60	Kur	Kota Tual	Rencana	KELAS III
61	Teor	Kota Tual	Rencana	KELAS III
62	Batu Goyang	Kab. Aru	Rencana	KELAS III
63	Meror	Kab. Aru	Rencana	KELAS III
64	Tabarfane	Kab. Kep. Aru	Rencana	KELAS III
65	Wokam	Kab. Kep Aru	Rencana	KELAS III
66	Luhu	Kab. Seram Barat	Rencana	KELAS III
31	Maluku Utara			
1	Tobelo	Kab. Halmahera Utara	Operasi	KELAS II
2	Doro Kao	Kab. Halmahera Utara	Operasi	KELAS II
3	Daruba	Kab. Pulau Morotai	Operasi	KELAS II
4	Bastiong	Kota Ternate	Operasi	KELAS I
5	Kayoa	Kab. Halmahera Selatan	Operasi	KELAS II
6	Makian	Kab. Halmahera Selatan	Operasi	KELAS II
7	Saketa	Kab. Halmahera Selatan	Operasi	KELAS II
8	Babang	Kab. Halmahera Selatan	Operasi	KELAS I
9	Patani	Kab. Halmahera Tengah	Operasi	KELAS I
10	Gebe	Kab. Halmahera Tengah	Operasi	KELAS I
11	Sidangole	Kab. Halmahera Tengah	Operasi	KELAS II
12	Rum	Kab. Tidore Kepulauan	Operasi	KELAS II
13	Soffi	Kab. Tidore Kepulauan	Operasi	KELAS I
14	Subaim	Kab. Halmahera Timur	Operasi	KELAS II
15	Mangole	Kab. Tidore Kepulauan	Operasi	KELAS I

No.	Nama Pelabuhan Penyeberangan	Kabupaten/Kota	Status Pencapaian	Hierarki Pelabuhan
16	Sanana	Kab. Kepulauan Sula	Operasi	KELAS I
17	Obi	Kab. Kepulauan Obi	Operasi	KELAS II
18	Batang Dua	Kab. Sula	Operasi	KELAS II
19	Bobong	Kab. Sula	Operasi	KELAS II
20	Moti	Kota Ternate	Rencana	KELAS II
21	Pulau Kasiruta	Kab. Halmahera Tengah	Rencana	KELAS III
22	Pulau Mandioli	Kab. Halmahera Tengah	Rencana	KELAS III
23	Weda	Kab. Halmahera Tengah	Rencana	KELAS III
24	Morotai	Kab. Pulau Morotai	Rencana	KELAS II
32	Papua			
1	Mokmer	Kab. Biak Numfor	Operasi	KELAS I
2	Kabuena	Kab. Kep. Yapen	Operasi	KELAS I
3	Samabusa/Nabire	Kab. Nabire	Operasi	KELAS I
4	Pomako	Kab. Mimika	Operasi	KELAS I
5	Kelapalima Merauke	Kota Merauke	Operasi	KELAS I
6	Waren	Kab. Waropen	Rencana	KELAS I
7	Saubeba	Kab. Kep. Yapen	Rencana	KELAS II
8	Agats	Kab. Asmat	Rencana	KELAS I
9	Sawai	Kab. Sarmi	Rencana	KELAS I
10	Mamberamo	Kab. Mamberamo Raya	Rencana	KELAS II
11	Bade	Kab. Mappi	Rencana	KELAS I
12	Kepi	Kab. Mappi	Rencana	KELAS I
13	Kaonda	Kab. Kep. Yapen	Rencana	KELAS II
14	Numfor	Kab. Biak Numfor	Rencana	KELAS II
15	Kimaam	Kab. Merauke	Rencana	KELAS I
33	Papua Barat			
1	Waigeo (Raja Ampat)	Kab. Raja Ampat	Operasi	KELAS I
2	Klademak	Kota Sorong	Operasi	KELAS II
3	Arar (sorong)	Kab. Sorong	Operasi	KELAS I
4	Manokwari	Kab. Manokwari	Operasi	KELAS I
5	Fak-Fak	Kab. Fak-fak	Operasi	KELAS I
6	Foley	Kab. Raja Ampat	Rencana	KELAS II
7	Wasior	Kab. Teluk Wondana	Rencana	KELAS II
8	Salawati	Kab. Raja Ampat	Rencana	KELAS III
9	Batanta	Kab. Raja Ampat	Rencana	KELAS II
10	Kaimana	Kab. Kaimana	Rencana	KELAS I
11	Inanwatan	Kab. Sorong selatan	Rencana	KELAS II
12	Aranday	Kab. Teluk Bintuni	Rencana	KELAS II
13	Kokas	Kab. Fak-fak	Rencana	KELAS II

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
24	Lengguru	rencana	Pengumpan
25	Minamo	rencana	Pengumpan
26	Dermaga Danau Anggi Gidi	rencana	Pengumpan
27	Dermaga Danau Anggi Gida	rencana	Pengumpan
28	Dermaga Danau Uter	rencana	Pengumpan

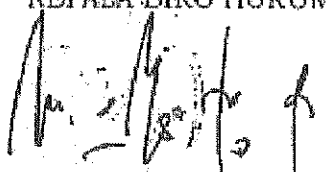
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan, sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
52	Banamepe	operasi	Pengumpan
53	Bayun	operasi	Pengumpan
54	Kamur	operasi	Pengumpan
55	Boven Digul	rencana	Pengumpul
56	Dermaga Danau Sentani	operasi	Pengumpan
57	Dermaga Danau Rombebai	operasi	Pengumpan
58	Dermaga Danau Biru	rencana	Pengumpan
59	Dermaga Danau Paniai	operasi	Pengumpan
60	Dermaga Danau Ti Bi	rencana	Pengumpan
61	Dermaga Danau Tonjida	rencana	Pengumpan
62	Dermaga Danau Yamur	rencana	Pengumpan
63	Dermaga Danau Yamasi	rencana	Pengumpan
27	Papua Barat		
1	Sorong	operasi	Pengumpul
2	Segun	rencana	Pengumpan
3	Maldan	rencana	Pengumpan
4	Fak-fak	operasi	Pengumpan
5	Inanwatan	operasi	Pengumpan
6	Yahadian	rencana	Pengumpan
7	Puragi	rencana	Pengumpan
8	Matemani Kais	rencana	Pengumpan
9	Sungai Kasuweri	rencana	Pengumpan
10	Kalitami	rencana	Pengumpan
11	Wunini	rencana	Pengumpan
12	Aranday	rencana	Pengumpan
13	Tembuni	rencana	Pengumpan
14	Tafereh	rencana	Pengumpan
15	Bintuni	rencana	Pengumpan
16	Babo	operasi	Pengumpan
17	Aroba	rencana	Pengumpan
18	Kambrau	rencana	Pengumpan
19	Arguni Bawah	rencana	Pengumpan
20	Kaimana	rencana	Pengumpan
21	Sokuwa	rencana	Pengumpan
22	Tobu-tobu	rencana	Pengumpan
23	Kaimana	rencana	Pengumpan

**SUB LAMPIRAN A6
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU**

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
1	Aceh		
1	Dermaga Danau Laut Tawar	rencana	Pengumpan
2	Dermaga Danau Laut Realoih	rencana	Pengumpan
3	Dermaga Danau Aneuk Laot	rencana	Pengumpan
2	Sumatera Utara		
1	Dermaga Haranggaol	operasi	Pengumpan
2	Dermaga Tiga Ras	operasi	Pengumpan
3	Dermaga Tiga Raja	operasi	Pengumpan
4	Dermaga Aji Bata	operasi	Pengumpan
5	Dermaga Ferry Aji Bata	operasi	Pengumpan
6	Dermaga Balige	operasi	Pengumpan
7	Dermaga KM Putih Muara I	operasi	Pengumpan
8	Dermaga Swasta P. Sibandang	operasi	Pengumpan
9	Dermaga P. Sibandang	operasi	Pengumpan
10	Dermaga Muara	operasi	Pengumpan
11	Dermaga Simangu Lape	operasi	Pengumpan
12	Dermaga Onan Labu	operasi	Pengumpan
13	Dermaga Marbun Taruan	operasi	Pengumpan
14	Dermaga Tipang	operasi	Pengumpan
15	Dermaga Onan Baru	operasi	Pengumpan
16	Dermaga Mogang	operasi	Pengumpan
17	Dermaga Nainggolan	operasi	Pengumpan
18	Dermaga Sipinggalan	operasi	Pengumpan
19	Dermaga Sitinjak	operasi	Pengumpan
20	Dermaga Onan Runggu	operasi	Pengumpan
21	Dermaga Sitamiang	operasi	Pengumpan
22	Dermaga Wisata Onan Runggu	operasi	Pengumpan
23	Dermaga Lagundi	operasi	Pengumpan
24	Dermaga Pardamuan Lottung	operasi	Pengumpan
25	Dermaga Lapo Parindo	operasi	Pengumpan
26	Dermaga Wisata Tomok	operasi	Pengumpan
27	Dermaga Sumber Sari	operasi	Pengumpan
28	Dermaga Ferry Tomok	operasi	Pengumpan
29	Dermaga Wisata Tuktuk	operasi	Pengumpan
30	Dermaga Simanindo	operasi	Pengumpan
31	Dermaga Parbaba	operasi	Pengumpan
32	Dermaga Aek Rangat	operasi	Pengumpan
33	Dermaga Silalahi	operasi	Pengumpan
34	Dermaga Tangging	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
35	Dermaga Siallogan	operasi	Pengumpan
36	Dermaga Pantai Indah Situngkir	operasi	Pengumpan
3	Sumatera Barat		
1	Dermaga Danau Maninjau	operasi	Pengumpan
2	Dermaga Danau Diatas	operasi	Pengumpan
3	Dermaga Danau Singkarak	operasi	Pengumpan
4	Dermaga Danau Kerinci	operasi	Pengumpan
5	Dermaga Danau Dibawah	operasi	Pengumpan
4	Riau		
1	Dumai	operasi	Pengumpan
2	Kepenuhan	rencana	Pengumpan
3	Tanah Putih Tanjung Melawan	operasi	Pengumpan
4	Bonai Darussalam	rencana	Pengumpan
5	Kunto Darussalam	rencana	Pengumpan
6	Rokan IV Koto	operasi	Pengumpan
7	Parawang	rencana	Pengumpan
8	Pekalar	rencana	Pengumpan
9	Siak Kecil	rencana	Pengumpan
10	Sungai Mandau	operasi	Pengumpan
11	Mandau	operasi	Pengumpan
12	Pekanbaru	operasi	Pengumpul
13	Teluk Dalam	operasi	Pengumpan
14	Pangkalan Kerinci	operasi	Pengumpan
15	Langgam	operasi	Pengumpan
16	Kampar Kiri Hulu	operasi	Pengumpan
17	Teratahbulah	rencana	Pengumpan
18	Bangkinang	rencana	Pengumpan
19	Tembilahan	operasi	Pengumpul
20	Kuala Gaung	operasi	Pengumpan
21	Lahang Tengah	rencana	Pengumpan
22	Simpang Gaung	rencana	Pengumpan
23	Pulau Pisang	rencana	Pengumpan
24	Sungai Guntung	operasi	Pengumpan
25	Rantau Panjang	rencana	Pengumpan
26	Rotan Semulu	rencana	Pengumpan
27	Teluk Sebah	rencana	Pengumpan
28	Teluk Kinai	rencana	Pengumpan
29	Teluk Kiambang	operasi	Pengumpan
30	Rengat	operasi	Pengumpan
31	Teluk Kuantan	rencana	Pengumpan
32	Cerenti	rencana	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
33	Peranap	rencana	Pengumpan
34	Muara Petai	rencana	Pengumpan
35	Tanjung Pasir	operasi	Pengumpan
36	Kuala Enok	operasi	Pengumpan
37	Sungai Udang	rencana	Pengumpan
38	Pulau Kijang	operasi	Pengumpan
39	Keritang	operasi	Pengumpan
40	Kuala Cenaku	operasi	Pengumpan
41	Pangkalansai	rencana	Pengumpan
42	Batang Cenaku	rencana	Pengumpan
43	Teluk Lancang	operasi	Pengumpan
44	Buatan	operasi	Pengumpan
45	Rimbapandan	rencana	Pengumpan
46	Siak Sri Indrapura	rencana	Pengumpan
47	Sabak Auh	rencana	Pengumpan
48	Sungai Apit	operasi	Pengumpan
49	Merbau	operasi	Pengumpan
50	Tebing Tinggi	operasi	Pengumpan
5	Sumatera Selatan		
1	16 Ilir	operasi	Pengumpul
2	Sei Lais	operasi	Pengumpan
3	Api-Api	operasi	Pengumpan
4	Upang	operasi	Pengumpan
5	Makarti Jaya	operasi	Pengumpan
6	Muara Telang	rencana	Pengumpan
7	Upang bagian hilir	operasi	Pengumpan
8	Merah Mata	operasi	Pengumpan
9	Mukti Jaya	rencana	Pengumpan
10	Gasing	rencana	Pengumpan
11	Tanjung Lago	rencana	Pengumpul
12	Sebalik	rencana	Pengumpan
13	Sri Menanti	operasi	Pengumpan
14	Karangbaru	operasi	Pengumpan
15	Simpang PU	operasi	Pengumpan
16	Sungsang I	operasi	Pengumpan
17	Bayung Lencir	operasi	Pengumpan
18	Karang Agung	operasi	Pengumpan
19	Sungai Lilin	operasi	Pengumpan
20	Kuala Puntian	operasi	Pengumpan
21	Penuguan	operasi	Pengumpan
22	Teluk Betung	operasi	Pengumpan
23	Suka Damai	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
24	Salek Mukti	operasi	Pengumpan
25	Muara Padang	operasi	Pengumpan
26	Cinta Manis	operasi	Pengumpan
27	Desa Kanal Sugihan	operasi	Pengumpan
28	Muara Sugihan	operasi	Pengumpan
29	Desa di sungai Batang	operasi	Pengumpan
30	Rambutan	operasi	Pengumpan
31	Tulung Selapan	operasi	Pengumpan
32	Desa Sungai Pasir	rencana	Pengumpan
33	Desa Jeruju	operasi	Pengumpan
34	Sungai Lumpur	rencana	Pengumpan
35	Lebung Itam	rencana	Pengumpan
36	Desa Pidada	operasi	Pengumpan
37	Cengal	operasi	Pengumpan
38	Pagar Dewa (Sumsel)	operasi	Pengumpan
39	Sungai Menang	rencana	Pengumpan
40	Pedamaran Timur	operasi	Pengumpan
41	Lempuing Jaya	operasi	Pengumpan
42	Mesuji Raya	operasi	Pengumpan
43	Wiralaga	operasi	Pengumpan
44	Sungai Sidang	rencana	Pengumpan
45	desa kawasan pesisir	operasi	Pengumpan
46	Jaka Baring	operasi	Pengumpan
47	Kayu Agung	operasi	Pengumpan
48	Madang Suku II	rencana	Pengumpan
49	Jejawi	rencana	Pengumpan
50	Sirah Pulau Padang	rencana	Pengumpan
51	Pampangan	operasi	Pengumpan
52	Pangkalan Lapam	rencana	Pengumpan
53	Cempaka	rencana	Pengumpan
54	Semendawai Barat	rencana	Pengumpan
55	Buay Pemuka Peliung	rencana	Pengumpan
56	Martapura	operasi	Pengumpan
57	Muaradua	operasi	Pengumpan
58	Indralaya Utara	operasi	Pengumpan
59	Beringin	rencana	Pengumpan
60	Indralaya	rencana	Pengumpan
61	Peninjauan	rencana	Pengumpan
62	Pemulutan Barat	operasi	Pengumpan
63	Pemulutan	rencana	Pengumpan
64	Tanjung Batu	rencana	Pengumpan
65	Pemulutan Selatan	operasi	Pengumpan
66	Tanjung Raja	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
67	Kandis	rencana	Pengumpan
68	Rantau Alai	rencana	Pengumpan
69	Lubuk Keliat	rencana	Pengumpan
70	Muara Kuang	operasi	Pengumpan
71	Penghumbuk	operasi	Pengumpan
72	Penukal Utara	rencana	Pengumpan
73	Muara Belida	rencana	Pengumpan
74	Sungai Rotan	operasi	Pengumpan
75	Tebat Agung	rencana	Pengumpan
76	Muara Enim	operasi	Pengumpan
77	Merapi Barat	rencana	Pengumpan
78	Tangga Buntung	operasi	Pengumpan
79	Pangkalan Bulian	operasi	Pengumpan
80	Tanah Abang	operasi	Pengumpan
81	Teluk Bintai	rencana	Pengumpan
82	Sukasuban	operasi	Pengumpan
83	Teluk Kijing	rencana	Pengumpan
84	Sekayu	rencana	Pengumpul
85	Babat	operasi	Pengumpan
86	Muara Rupit	operasi	Pengumpan
87	Muara Rawas (Sangadesa)	rencana	Pengumpan
88	Bingin Teluk	operasi	Pengumpan
89	Rawas Ulu	operasi	Pengumpan
90	Karang Jaya	operasi	Pengumpan
91	Muara Kelingi	operasi	Pengumpan
92	Bulan Tengah Suku Ulu	operasi	Pengumpan
93	Muara Beliti	operasi	Pengumpan
94	Muara Lakitan	operasi	Pengumpan
95	Jarai	rencana	Pengumpan
96	Banding Agung	rencana	Pengumpan
97	Kota Batu	operasi	Pengumpan
98	Pariwisata Air Panas	operasi	Pengumpan
99	Dermaga Danau Teloko	rencana	Pengumpan
100	Dermaga Danau Ranau Sumsel	rencana	Pengumpan
101	Dermaga Danau Matana	rencana	Pengumpan
102	Dermaga Danau Jembawan	rencana	Pengumpan
103	Dermaga Danau Air Hitam	rencana	Pengumpan
6	Jambi		
1	Muara Tembesi	rencana	Pengumpan
2	Muara Tebo	rencana	Pengumpan
3	Muara Sabak	operasi	Pengumpan
4	Nipah Panjang	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
6	Jambi	operasi	Pengumpan
7	Muara Bulian	operasi	Pengumpul
8	Pauh	operasi	Pengumpan
9	Sarolangun	operasi	Pengumpan
10	Kuala Tungkal	operasi	Pengumpan
11	Mendahara	rencana	Pengumpan
12	Dermaga Danau Dacampat	rencana	Pengumpan
13	Dermaga Danau Sipin	rencana	Pengumpan
7	Bengkulu		
1	Dermaga Danau Tes	rencana	Pengumpan
2	Dermaga Danau Emas	rencana	Pengumpan
3	Dermaga Danau Dendam Tak Sudah	rencana	Pengumpan
8	Lampung		
1	Wiralaga	operasi	pengumpul
2	Mesuji Timur	operasi	pengumpan
3	Sungai Sidang	operasi	pengumpan
4	Pagar Dewa	operasi	pengumpan
5	Menggala	rencana	pengumpul
6	Gedung Aji	rencana	pengumpan
7	Rawajitu	rencana	pengumpan
8	Bahuga	rencana	pengumpan
9	Tulang Bawang	rencana	pengumpul
10	Kuala	rencana	pengumpan
11	Dermaga Lombok	operasi	pengumpan
12	Sekau	operasi	pengumpan
13	Dermaga Danau Ranau Lampung	operasi	pengumpan
14	Dermaga Danau Jepara	rencana	pengumpan
15	Dermaga Waduk Way Ralem	rencana	pengumpan
16	Heniarong	rencana	pengumpan
17	Sukabanjar	rencana	pengumpan
18	Kota Agung	rencana	pengumpan
9	DKI Jakarta		
1	Penjaringan	rencana	pengumpan
2	Tambora	rencana	pengumpan
3	Palmerah	rencana	pengumpan
4	Tanah Abang	rencana	pengumpan
5	Cilincing	rencana	pengumpan
6	Cakung	rencana	pengumpul
7	Cengkareng	rencana	pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
10	Jawa Barat		
1	Cilamaya Kulon	rencana	pengumpan
2	Patok Beusi	rencana	pengumpan
3	Sagalاهرang	rencana	pengumpan
4	Muaragembong	operasi	pengumpul
5	Muara Bendera	operasi	pengumpan
6	Citarum Hilir	rencana	pengumpan
7	Jatiluhur	operasi	pengumpul
8	Tegalbuleud	operasi	pengumpan
9	Sindangkerta	rencana	pengumpan
10	Cibeber	rencana	pengumpan
11	Bojongpicung	rencana	pengumpan
12	Sukaluyu	rencana	pengumpan
13	Ciranjang	rencana	pengumpan
14	Saguling	operasi	pengumpan
15	Cihampelas	operasi	pengumpul
16	Batujajar	rencana	pengumpan
17	Ibun	operasi	pengumpan
18	Sindang	rencana	pengumpan
19	Lohbener	rencana	pengumpan
20	Jatibarang	rencana	pengumpan
21	Widasari	rencana	pengumpan
22	Kertasemaya	rencana	pengumpan
23	Bangodua	rencana	pengumpan
24	Losari	rencana	pengumpan
25	Ciledug	rencana	pengumpan
26	Waled	rencana	pengumpan
27	Cidahu	rencana	pengumpan
28	Astanajapura	rencana	pengumpan
29	Lemahabang	rencana	pengumpan
30	Gunung Sembung	rencana	pengumpan
31	Tomo	rencana	pengumpan
32	Panyingkiran	rencana	pengumpan
33	Jatigede	rencana	pengumpan
34	Losarang	rencana	Kawio
35	Cikedung	rencana	pengumpan
36	Kalipucang	operasi	pengumpul
37	Padaherang	rencana	pengumpan
38	Lakbok	operasi	pengumpan
39	Langensari	operasi	pengumpan
40	Purwaharja	rencana	pengumpan
41	Pataruman	operasi	pengumpan
42	Cijulang	rencana	pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
43	Parigi	rencana	pengumpan
44	Cisewu	rencana	pengumpan
45	Cidaun	rencana	pengumpan
46	Talegong	rencana	pengumpan
47	Naringgul	rencana	pengumpan
48	Warungkiara	rencana	pengumpan
49	Cikembar	rencana	pengumpan
50	Nyalindung	rencana	pengumpan
51	Gegerbitung	rencana	pengumpan
52	Sindangbarang	rencana	pengumpan
53	Cibinong	rencana	pengumpan
11	Jawa Tengah		
1	Lohmanis	operasi	pengumpul
2	Wijayapura	operasi	pengumpan
3	Sodong	operasi	pengumpan
4	Prenca	operasi	pengumpan
5	Alas Malang	operasi	pengumpan
6	Jojok	operasi	pengumpan
7	Pekuyan	operasi	pengumpan
8	Cigintung	rencana	pengumpan
9	Motehan	operasi	pengumpan
10	Klaces	operasi	pengumpan
11	Donan	operasi	pengumpan
12	Wadaslintang	operasi	pengumpul
13	Wuryantoro	rencana	pengumpan
14	Wonogiri	rencana	pengumpan
15	Baturetno	rencana	pengumpan
16	Eromoko	rencana	pengumpan
17	Giriwoyo	rencana	pengumpan
18	Selogiri	rencana	pengumpan
19	Karangdowo	rencana	pengumpan
20	Tangen	operasi	pengumpan
21	Miri	operasi	pengumpan
22	Sumberlawang	operasi	pengumpan
23	Garung	operasi	pengumpan
24	Kejajarangan	rencana	pengumpan
25	Mojotengah	rencana	pengumpan
26	Seleko	rencana	pengumpan
12	D.I Yogyakarta		
1	Dermaga Waduk Sermo	rencana	pengumpan
2	Kokap	rencana	pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
13	Jawa Timur		
1	Krain	rencana	pengumpan
2	Porong	rencana	pengumpan
3	Bangsals	rencana	pengumpan
4	Mojosari	rencana	pengumpan
5	Pungging	rencana	pengumpan
6	Ngoro	rencana	pengumpan
7	Ngraho	rencana	pengumpan
8	Bojonegoro	rencana	pengumpul
9	Kepanjen	operasi	pengumpan
10	Pakisaji	operasi	pengumpan
11	Bululawang	operasi	pengumpan
12	Kanigoro	operasi	pengumpan
13	Binangun	operasi	pengumpan
14	Gedeg	operasi	pengumpan
15	Jetis	operasi	pengumpul
16	Sumberpucung	rencana	pengumpan
17	Karangates	rencana	pengumpan
14	Banten		
1	Panimbang	rencana	pengumpan
2	Bojongmanik	rencana	pengumpan
3	Pontang	rencana	pengumpan
4	Tirtayasa	rencana	pengumpan
5	Carenang	rencana	pengumpan
6	Kragian	rencana	pengumpan
7	Cikande	rencana	pengumpan
8	Kasemen	rencana	pengumpan
9	Cihara	rencana	pengumpan
10	Pakuhaji	rencana	pengumpan
11	Sepetan	rencana	pengumpan
15	Bali		
1	Dermaga Danau Bratan	operasi	pengumpan
2	Dermaga Danau Tamblingan	operasi	pengumpan
3	Dermaga Danau Buyan	operasi	pengumpan
4	Dermaga Wisata Danau Bedugul	operasi	pengumpan
5	Dermaga Danau Desa Kedisan	operasi	pengumpan
6	Dermaga Danau Trunyan	operasi	pengumpan
7	Dermaga Danau Kuburan Trunyan	operasi	pengumpan
8	Dermaga Danau Toyabungkah	operasi	pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
16	KALIMANTAN BARAT		
1	Putussibau	operasi	Pengumpul
2	Tayan Hilir	rencana	Pengumpan
3	Sanggau	operasi	Pengumpul
4	Entikong	operasi	Pengumpan
5	Belitang	rencana	Pengumpan
6	Belitang Hulu	rencana	Pengumpan
7	Ketungau Hilir	rencana	Pengumpan
8	Ketungau Tengah	rencana	Pengumpan
9	Ketungau Hulu	rencana	Pengumpan
10	Silat Hilir	operasi	Pengumpan
11	Silat Hulu	operasi	Pengumpan
12	Selimbau	operasi	Pengumpan
13	Batang Lupar	operasi	Pengumpan
14	Sintang	operasi	Pengumpul
15	Nanga Pinoh	operasi	Pengumpan
16	Putussibau Utara	rencana	Pengumpan
17	Sekadau	operasi	Pengumpan
18	Nanga Mahap	rencana	Pengumpan
19	Dedai	operasi	Pengumpan
20	Ambalau	operasi	Pengumpan
21	Bunut Hilir	operasi	Pengumpan
22	Embaluh Hilir	rencana	Pengumpan
23	Kuala Keriau	rencana	Pengumpan
24	Ngabang	operasi	Pengumpan
25	Air Besar	rencana	Pengumpan
26	Rasau Jaya	operasi	Pengumpan
27	Pontianak	operasi	Pengumpul
28	Batu Ampar	operasi	Pengumpan
29	Kubu	operasi	Pengumpan
30	Sungai Kakap	operasi	Pengumpan
31	Terentang	operasi	Pengumpan
32	Pemangkat	rencana	Pengumpan
33	Tanjung Harapan	rencana	Pengumpul
34	Sekura	operasi	Pengumpan
35	Galing	operasi	Pengumpan
36	Teluk Batang	operasi	Pengumpan
37	Toba	rencana	Pengumpan
38	Simpang Hilir	operasi	Pengumpan
39	Sandai	operasi	Pengumpan
40	Nanga Tayap	operasi	Pengumpan
41	Sungai Laur	rencana	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
42	Matan Hilir Selatan	rencana	Pengumpan
43	Delta Pawan	operasi	Pengumpul
44	Sukamara	operasi	Pengumpan
45	Manis Mata	rencana	Pengumpan
46	Air Hitam Besar	operasi	Pengumpan
47	Dermaga Danau Sentarum	rencana	Pengumpan
48	Dermaga Danau Bekuan	rencana	Pengumpan
49	Dermaga Danau Belida	rencana	Pengumpan
50	Dermaga Danau Genali	rencana	Pengumpan
51	Dermaga Danau Tang	rencana	Pengumpan
52	Tebas Kuala	Operasi	Pengumpan
53	Perigi Piai	Operasi	Pengumpan
54	Sumpit	Operasi	Pengumpan
55	Ciremai	Operasi	Pengumpan
56	Tayan	Operasi	Pengumpan
57	Teraju	Operasi	Pengumpan
58	Sei Asam	Operasi	Pengumpan
59	Sekadau	Operasi	Pengumpan
60	Bardan	Operasi	Pengumpan
61	Siantan	Operasi	Pengumpan
62	Parit Sarem	Operasi	Pengumpan
63	Sungai Nipah	Operasi	Pengumpan
64	Telok Batang	Operasi	Pengumpan
65	Madya	Rencana	Pengumpan
66	Mayam	Rencana	Pengumpan
67	Buayan BHD	Rencana	Pengumpan
68	Sunyat	Rencana	Pengumpan
69	Kenanai	Rencana	Pengumpan
70	Sejangkung	Rencana	Pengumpan
71	Nunuk	Rencana	Pengumpan
72	Prapakan Jawai	Rencana	Pengumpan
73	Rengas	Rencana	Pengumpan
74	Jungkat	Rencana	Pengumpan
75	Wajok	Rencana	Pengumpan
76	Sungai Ayak	Rencana	Pengumpan
77	Teluk Malike	Rencana	Pengumpan
78	Kubu	Rencana	Pengumpan
79	Jangkang Dua	Rencana	Pengumpan
80	Tl. Kelang Kubu	Rencana	Pengumpan
81	Padang Tikar	Rencana	Pengumpan
82	Kendawangan Kota	Rencana	Pengumpan
83	Kendawangan Kanan	Rencana	Pengumpan
84	Parit Raja	Rencana	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
85	Semitau	Rencana	Pengumpan
86	Semitau Seberang	Rencana	Pengumpan
87	Perigi Kiri (Nanga Silat) Kab. Kapuas	Rencana	Pengumpan
88	Perigi Kanan (Nanga Silat)	Rencana	Pengumpan
89	Kemboja	Rencana	Pengumpan
17	Kalimantan Tengah		
1	Buntok	operasi	Pengumpul
2	Sumber Barito	rencana	Pengumpan
3	Muara Teweh	operasi	pengumpul
4	Jenamas	operasi	Pengumpan
5	Kurau Kuala	operasi	Pengumpan
6	Danau Panggang	operasi	Pengumpan
7	Dusun Utara	operasi	Pengumpan
8	Pematang Karau	operasi	Pengumpan
9	Montalat	operasi	Pengumpan
10	Gunung Purei	operasi	Pengumpan
11	Lahei	operasi	Pengumpan
12	Permata Intan	rencana	Pengumpan
13	Puruk Cahu	operasi	Pengumpul
14	Kapuas Kuala	operasi	Pengumpan
15	Timpah	operasi	Pengumpan
16	Kapuas Hulu	operasi	Pengumpan
17	Mentangai	operasi	Pengumpan
18	Banamatingang	operasi	Pengumpan
19	Pahandut	operasi	Pengumpan
20	Mihing Raya	operasi	Pengumpan
21	Damang Batu	rencana	Pengumpan
22	Bapuju	rencana	Pengumpan
23	Kanamit	rencana	Pengumpan
24	Manuhing	rencana	Pengumpan
25	Sebangau Kuala	operasi	Pengumpan
26	Tumbangnus	rencana	Pengumpan
27	Katingan Hulu / Tumbangsanaman	rencana	Pengumpan
28	Katingan Hilir	operasi	Pengumpan
29	Palangkaraya	operasi	Pengumpul
30	Sampit	operasi	Pengumpan
31	Pegatan Hilir	operasi	Pengumpan
32	Tumbang Samba	operasi	Pengumpan
33	Kandang	rencana	Pengumpan
34	Pulau Hanaut	operasi	Pengumpan
35	Mentaya Hulu	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
36	Antang Kalang	rencana	Pengumpan
37	Kuala Pembuang	operasi	Pengumpan
38	Tanjung Kanau	rencana	Pengumpan
39	Tumbang Manjul	operasi	Pengumpan
40	Seruyan Tengah	operasi	Pengumpan
41	Pangkalan Lada	rencana	Pengumpan
42	Pandau	rencana	Pengumpan
43	Lamandau	operasi	Pengumpan
44	Delang	rencana	Pengumpan
45	Kotawaringin Lama	operasi	Pengumpan
46	Pangkalanbun	operasi	Pengumpul
47	Kumai	operasi	Pengumpan
48	Kuala Jelai	operasi	Pengumpan
49	Balai Riam	operasi	Pengumpan
50	Dermaga Danau Mare	operasi	Pengumpul
51	Dermaga Danau Tete	rencana	Pengumpan
52	Dermaga Danau Terusan	rencana	Pengumpan
53	Dermaga Danau Sembuluh	rencana	Pengumpan
54	Dermaga Danau Raya	rencana	Pengumpan
55	Dermaga Danau Mepara	rencana	Pengumpan
56	Dermaga Danau Matur	rencana	Pengumpan
57	Dermaga Danau Limut	rencana	Pengumpan
58	Dermaga Danau Kenampul	rencana	Pengumpan
59	Dermaga Danau Gatel	rencana	Pengumpan
60	Dermaga Danau Ganting	rencana	Pengumpan
61	Dermaga Danau Cembulu	rencana	Pengumpan
62	Dermaga Danau Bamberan	rencana	Pengumpan
18	Kalimantan Selatan		
1	Belawang	operasi	Pengumpan
2	Bakumpai	operasi	Pengumpan
3	Margasari	operasi	Pengumpan
4	Labuan Amas Utara	rencana	Pengumpan
5	Negara	operasi	Pengumpan
6	Babirik	operasi	Pengumpan
7	Amuntai	operasi	Pengumpul
8	Marabahan	operasi	Pengumpul
9	Kuripan	operasi	Pengumpan
10	Tabukan	operasi	Pengumpan
11	Paminggir	rencana	Pengumpan
12	Tabunganen	operasi	Pengumpan
13	Aluh-aluh	operasi	Pengumpan
14	Tamban	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
15	Mekarsari	operasi	Pengumpan
16	Kurau	operasi	Pengumpan
17	Tabanio/Takisung	operasi	Pengumpan
18	Pasar Baru	operasi	Pengumpan
19	Sei Tabuk	rencana	Pengumpan
20	Martapura Barat	operasi	Pengumpan
21	Martapura	operasi	Pengumpan
22	Mataraman	rencana	Pengumpan
23	Pengaron	operasi	Pengumpan
24	Danau Aranio	rencana	Pengumpan
25	nau lain	rencana	Pengumpan
26	Pasar Baru	operasi	Pengumpan
27	Alalak	operasi	Pengumpan
28	Mandastana	operasi	Pengumpan
29	Jejangkit	operasi	Pengumpan
30	Simpang Empat	rencana	Pengumpan
31	Satui	rencana	Pengumpan
32	Kintap	operasi	Pengumpan
33	Batu Licin	operasi	Pengumpan
34	Kusan Hulu	rencana	Pengumpan
35	Kota Baru	operasi	Pengumpan
36	Pamukan Selatan	operasi	Pengumpan
37	Pamukan Utara	operasi	Pengumpan
38	Sampanahan	operasi	Pengumpan
39	Sungai Durian	operasi	Pengumpan
40	Kelumpang Barat	rencana	Pengumpan
41	Dermaga Danau Bangkau	rencana	Pengumpan
42	Dermaga Danau Bitin	rencana	Pengumpan
43	Banjar Raya	Operasi	Pengumpan
44	Saka Kajang	Rencana	Pengumpan
45	Mantuil	Rencana	Pengumpan
46	Tamban	Rencana	Pengumpan
47	Sei Gampa	Rencana	Pengumpan
19	Kalimantan Timur		
1	Long Kali	operasi	Pengumpan
2	Tanah Grogot	rencana	Pengumpan
3	Sebulu	operasi	Pengumpan
4	Kota Bangun	operasi	Pengumpan
5	Muara Pahu	operasi	Pengumpan
6	Melak	operasi	Pengumpan
7	Long Iram	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
8	Long Hubung	rencana	Pengumpan
9	Long Bagun	operasi	Pengumpan
10	Long Pahangai	rencana	Pengumpan
11	Long Apari	operasi	Pengumpan
12	Tenggarong	operasi	Pengumpan
13	Loa Kulu	operasi	Pengumpan
14	Penyinggahan	operasi	Pengumpan
15	Muara Muntai	operasi	Pengumpan
16	Bongan	rencana	Pengumpan
17	Siluq Ngurai	rencana	Pengumpan
18	Muara Lawa	rencana	Pengumpan
19	Damai	operasi	Pengumpan
20	Kayan Selatan	operasi	Pengumpan
21	Kenohan	operasi	Pengumpan
22	Kembang Janggut	rencana	Pengumpan
23	Tabang	operasi	Pengumpan
24	Samarinda	operasi	Pengumpul
25	Muara Wis	operasi	Pengumpan
26	Muara Kaman	operasi	Pengumpan
27	Muara Bengkal	rencana	Pengumpan
28	Long Mesanggat	rencana	Pengumpan
29	Muara Wahau	operasi	Pengumpan
30	Muara Ancalong	operasi	Pengumpan
31	Busang	rencana	Pengumpan
32	Karangan	operasi	Pengumpan
33	Sangkulirang	operasi	Pengumpan
34	Kaliorang	operasi	Pengumpan
35	Tanjung Redeb	operasi	Pengumpan
36	Teluk Bayur	operasi	Pengumpan
37	Segah	rencana	Pengumpan
38	Sambaliung	operasi	Pengumpan
39	Kelay	rencana	Pengumpan
40	Sekatak	operasi	Pengumpan
41	Tanjung Selor	operasi	Pengumpan
42	Tanjung Palas Barat	rencana	Pengumpan
43	Peso Hilir	operasi	Pengumpan
44	Peso	operasi	Pengumpan
45	Dermaga Danau Semayang	rencana	Pengumpan
46	Dermaga Danau Jempang	rencana	Pengumpan
20	Kalimantan Utara		
1	Tarakan	operasi	Pengumpul
2	Sesayap Hilir	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
3	Sesayap	operasi	Pengumpan
4	Malinau Kota	operasi	Pengumpan
5	Mentarang	operasi	Pengumpan
6	Malinau Barat	operasi	Pengumpan
7	Malinau Selatan	rencana	Pengumpan
8	Tana Lia	operasi	Pengumpan
9	Sembakung	operasi	Pengumpan
10	Lumbis	rencana	Pengumpan
11	Dermaga Danau Malintang	rencana	Pengumpan
21	Sulawesi Utara		
1	Dermaga Danau Tondano	operasi	Pengumpan
2	Dermaga Danau Moat	rencana	Pengumpan
3	Dermaga Danau Linouw	operasi	Pengumpan
4	Dermaga Danau Tondok	rencana	Pengumpan
5	Dermaga Danau Malakehi	rencana	Pengumpan
22	Gorontalo		
1	Dermaga Danau Limboto	rencana	Pengumpan
23	Sulawesi Tengah		
1	Dermaga Danau Poso	operasi	Pengumpan
2	Dermaga Danau Lindu	rencana	Pengumpan
24	Sulawesi Selatan		
1	Dermaga Danau Towuti	rencana	Pengumpan
2	Dermaga Danau Tempe	rencana	Pengumpan
3	Dermaga Danau Matano	operasi	Pengumpan
4	Dermaga Danau Sindereng	rencana	Pengumpan
5	Dermaga Danau Mahalona	rencana	Pengumpan
25	Sulawesi Tenggara		
1	Dermaga Danau Napabele	rencana	Pengumpan
26	Papua		
1	Tor Atas	rencana	Pengumpan
2	Sarmi	operasi	Pengumpan
3	Apawer Hulu	rencana	Pengumpan
4	Dabra	operasi	Pengumpan
5	Burmeso	operasi	Pengumpan
6	Kasonaweja	operasi	Pengumpan
7	Bagusa	operasi	Pengumpan
8	Kaiy	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
9	Pagai	operasi	Pengumpan
10	Batom Hauser	operasi	Pengumpan
11	Demba	operasi	Pengumpan
12	Risei Sayeti	rencana	Pengumpan
13	Wapoga	rencana	Pengumpan
14	Waren	operasi	Pengumpan
15	Pomako	operasi	Pengumpan
16	Uta	rencana	Pengumpan
17	Kamora	rencana	Pengumpan
18	Fanamo	rencana	Pengumpan
19	Jita	rencana	Pengumpan
20	Sawaerma	rencana	Pengumpan
21	Agats	operasi	Pengumpan
22	Akat	rencana	Pengumpan
23	Atsy	operasi	Pengumpan
24	Fayit	rencana	Pengumpan
25	Komor	operasi	Pengumpan
26	Buagani	operasi	Pengumpan
27	Yuguru	rencana	Pengumpan
28	Ndunga	rencana	Pengumpan
29	Binam	rencana	Pengumpan
30	Dekai	rencana	Pengumpan
31	Manggalum	operasi	Pengumpan
32	Tanah Merah	operasi	Pengumpan
33	Mindiptana	rencana	Pengumpan
34	Gatentiri	operasi	Pengumpan
35	Harapan	rencana	Pengumpan
36	Jinak	operasi	Pengumpan
37	Keppi	rencana	Pengumpan
38	Kelapa Lima	operasi	Pengumpan
39	Kimaam	operasi	Pengumpan
40	Dodalim	rencana	Pengumpan
41	Animha	rencana	Pengumpan
42	Bade	operasi	Pengumpul
43	Tomor	rencana	Pengumpan
44	Waganu	rencana	Pengumpan
45	Cabang Tlga	rencana	Pengumpan
46	Amasue	rencana	Pengumpan
47	Minyamur	rencana	Pengumpan
48	Haju Lsiyuliana	rencana	Pengumpan
49	Moor	operasi	Pengumpan
50	Eci/Asgon	operasi	Pengumpan
51	Senggo	operasi	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan Sungai Danau	Status Pencapaian	Hierarki
52	Banamepe	operasi	Pengumpan
53	Bayun	operasi	Pengumpan
54	Kamur	operasi	Pengumpan
55	Boven Digul	rencana	Pengumpul
56	Dermaga Danau Sentani	operasi	Pengumpan
57	Dermaga Danau Rombebai	operasi	Pengumpan
58	Dermaga Danau Biru	rencana	Pengumpan
59	Dermaga Danau Paniai	operasi	Pengumpan
60	Dermaga Danau Ti Bi	rencana	Pengumpan
61	Dermaga Danau Tonjida	rencana	Pengumpan
62	Dermaga Danau Yamur	rencana	Pengumpan
63	Dermaga Danau Yamasi	rencana	Pengumpan
27	Papua Barat		
1	Sorong	operasi	Pengumpul
2	Segun	rencana	Pengumpan
3	Maldan	rencana	Pengumpan
4	Fak-fak	operasi	Pengumpan
5	Inanwatan	operasi	Pengumpan
6	Yahadian	rencana	Pengumpan
7	Puragi	rencana	Pengumpan
8	Matemani Kais	rencana	Pengumpan
9	Sungai Kasuweri	rencana	Pengumpan
10	Kalitami	rencana	Pengumpan
11	Wunini	rencana	Pengumpan
12	Aranday	rencana	Pengumpan
13	Tembuni	rencana	Pengumpan
14	Tafereh	rencana	Pengumpan
15	Bintuni	rencana	Pengumpan
16	Babo	operasi	Pengumpan
17	Aroba	rencana	Pengumpan
18	Kambrau	rencana	Pengumpan
19	Arguni Bawah	rencana	Pengumpan
20	Kaimana	rencana	Pengumpan
21	Sokuwa	rencana	Pengumpan
22	Tobu-tobu	rencana	Pengumpan
23	Kaimana	rencana	Pengumpan

No.	Nama Pelabuhan/Sungai/Danau	Status/Pencapaian	Hierarki
24	Lengguru	rencana	Pengumpan
25	Minamo	rencana	Pengumpan
26	Dermaga Danau Anggi Gidi	rencana	Pengumpan
27	Dermaga Danau Anggi Gida	rencana	Pengumpan
28	Dermaga Danau Uter	rencana	Pengumpan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001